Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

kementerian Perhubungan

2024

PANDUAN PENGISIAN

PENILAIAN MANDIRI

INDIKATOR I (55 POIN)

A. PPID
B. PELAPORAN
C. SARANA DAN PRASARANA
D. AKSESIBILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

INDIKATOR II (41 POIN)

A. DIUMUMKAN BERKALA
B. DIUMUMKAN SETIAP SAAT
C. DIUMUMKAN SERTA MERTA

INDIKATOR III (4 POIN)

A. INOVASI DALAM PELAYANAN

INDIKATOR I

A. PPID

1. Apakah unit kerja Saudara telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/ Penetapan PPID yang masih berlaku)

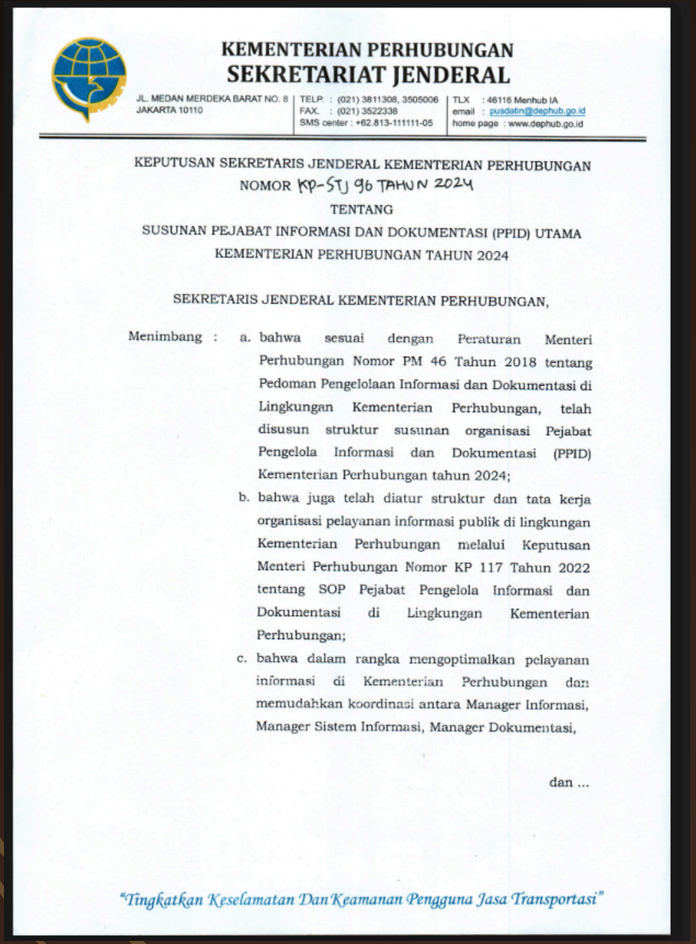

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP. : (021) 3811308, 3505006 FAX. : (021) 3522338 SMS center : +62.813-111111-05 | TLX : 46116 Menhub IA email : pusdatin@dephub.go.id home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-STJ 96 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah disusun struktur susunan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan tahun 2024;
b. bahwa juga telah diatur struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi di Kementerian Perhubungan dan memudahkan koordinasi antara Manager Informasi, Manager Sistem Informasi, Manager Dokumentasi,

dan ...

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

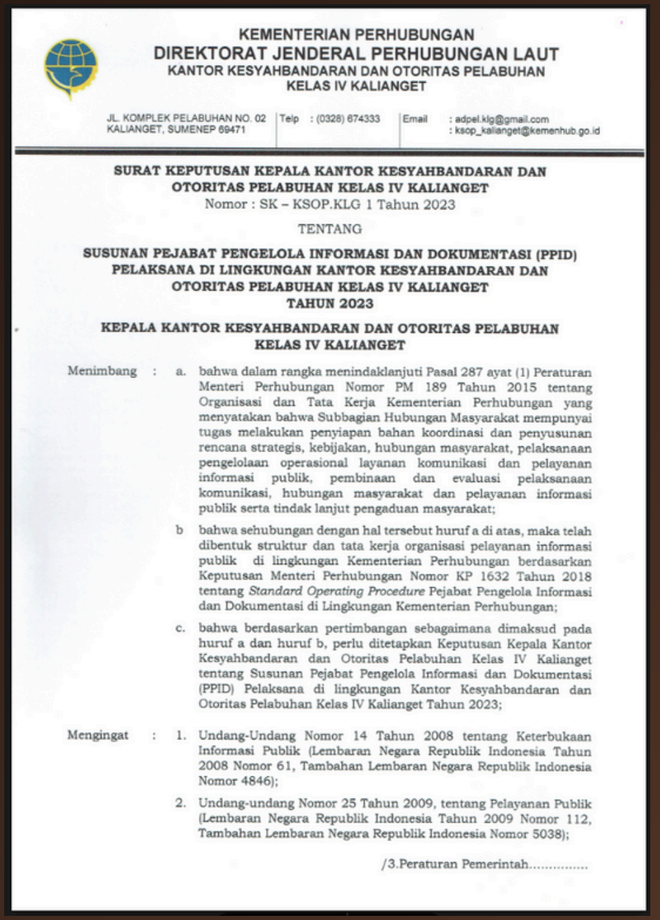

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV KALIANGET

JL. KOMPLEK PELABUHAN NO. 02 KALIANGET, SUMENEP 69471 | Telp : (0328) 674333 | Email : adpel.klg@gmail.com : ksop_kalianget@kemenhub.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KALIANGET
Nomor : SK – KSOP.KLG 1 Tahun 2023

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KALIANGET TAHUN 2023

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KALIANGET

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

/3.Peraturan Pemerintah.....

Lampirkan bukti yang menunjukkan bahwa unit kerja Saudara telah memiliki SK kepengurusan layanan PPID. Bisa berupa link dari SK yang diunggah atau dokumen SK dimaksud

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/drive/folders/1Wxs-s5cb9YCT3Vl9ws9umkk1SA6eZiro?usp=sharing

2. Apakah unit kerja Saudara mengetahui/memiliki/menguasai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan?

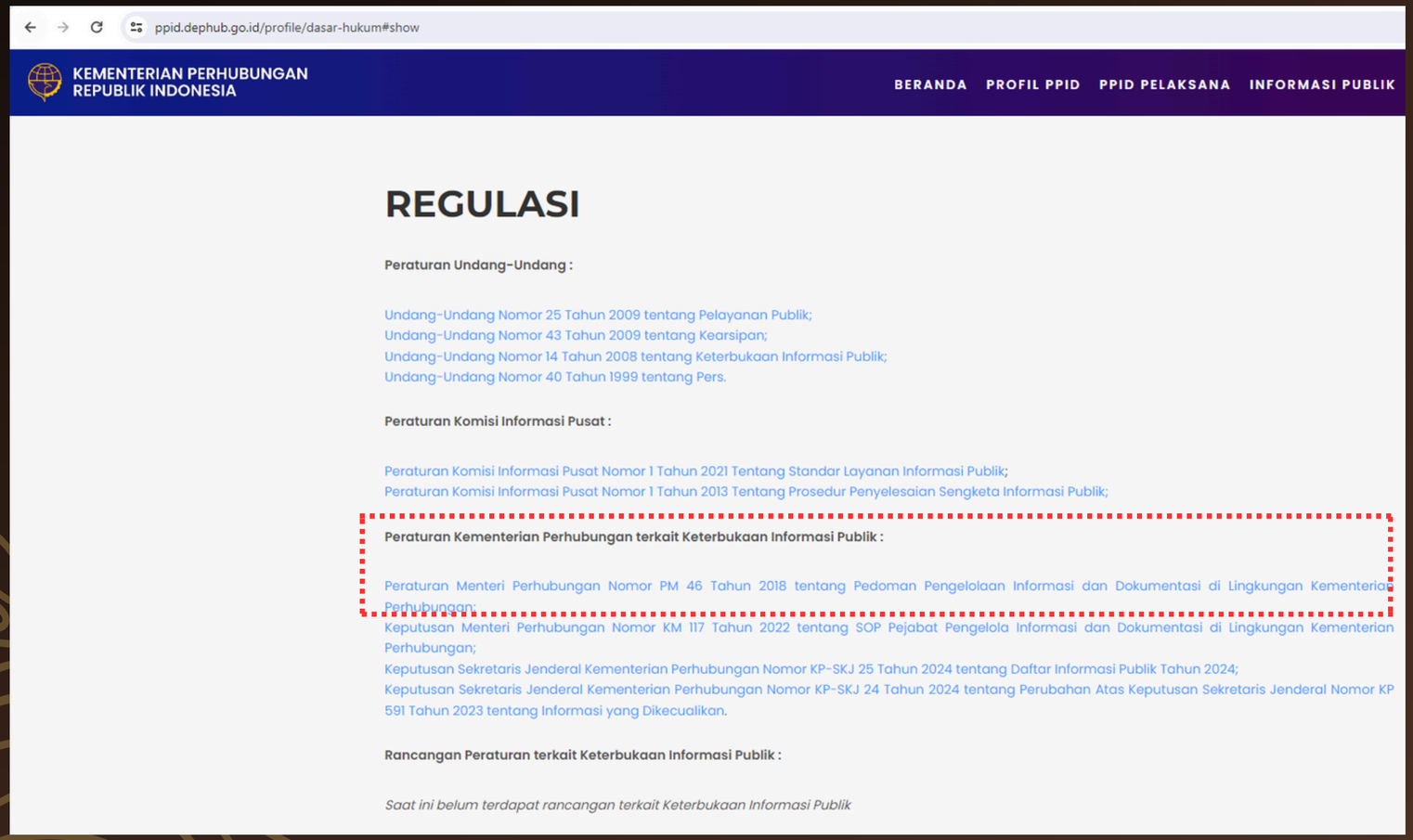

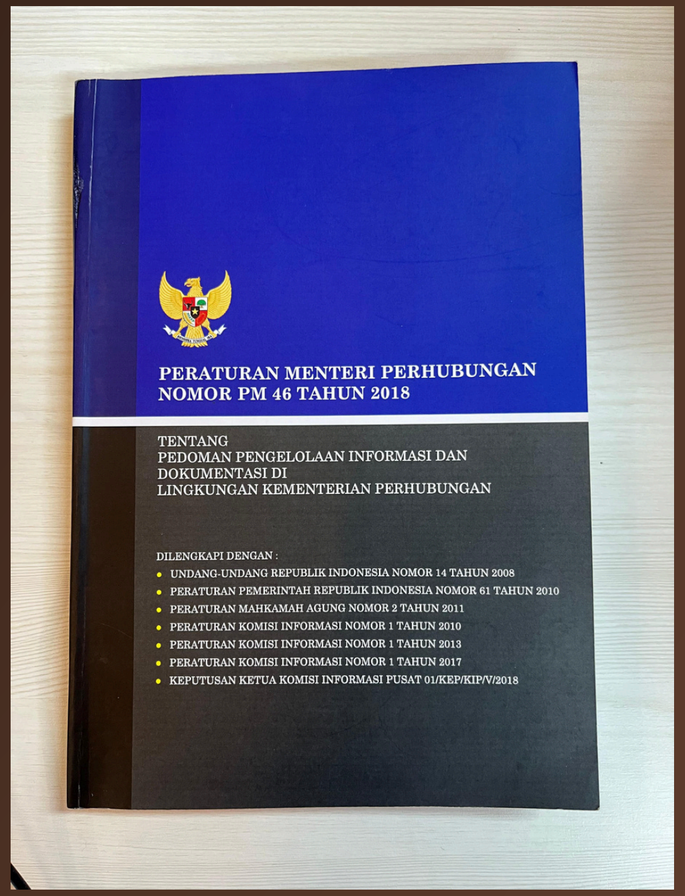

https://ppid.dephub.go.id/profile/dasar-hukum#show

Lampiran bukti dukung: bisa berupa link website yang menunjukkan PM 46 Tahun 2018 sudah diunggah ke website atau media sosial. Bukti dukung juga bisa berupa foto dari kepemilikan PM 46 tahun 2018 yang dicetak berupa dokumen/buku dan ditaruh di ruang PPID unit kerja Saudara.

Link PM 46 Tahun 2018: https://drive.google.com/drive/folders/11MmFIprMAf2PnNz0w86xfyrBC8zdyXzT?usp=sharing

3. Apakah unit kerja Saudara mengetahui/memiliki/menguasai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan?

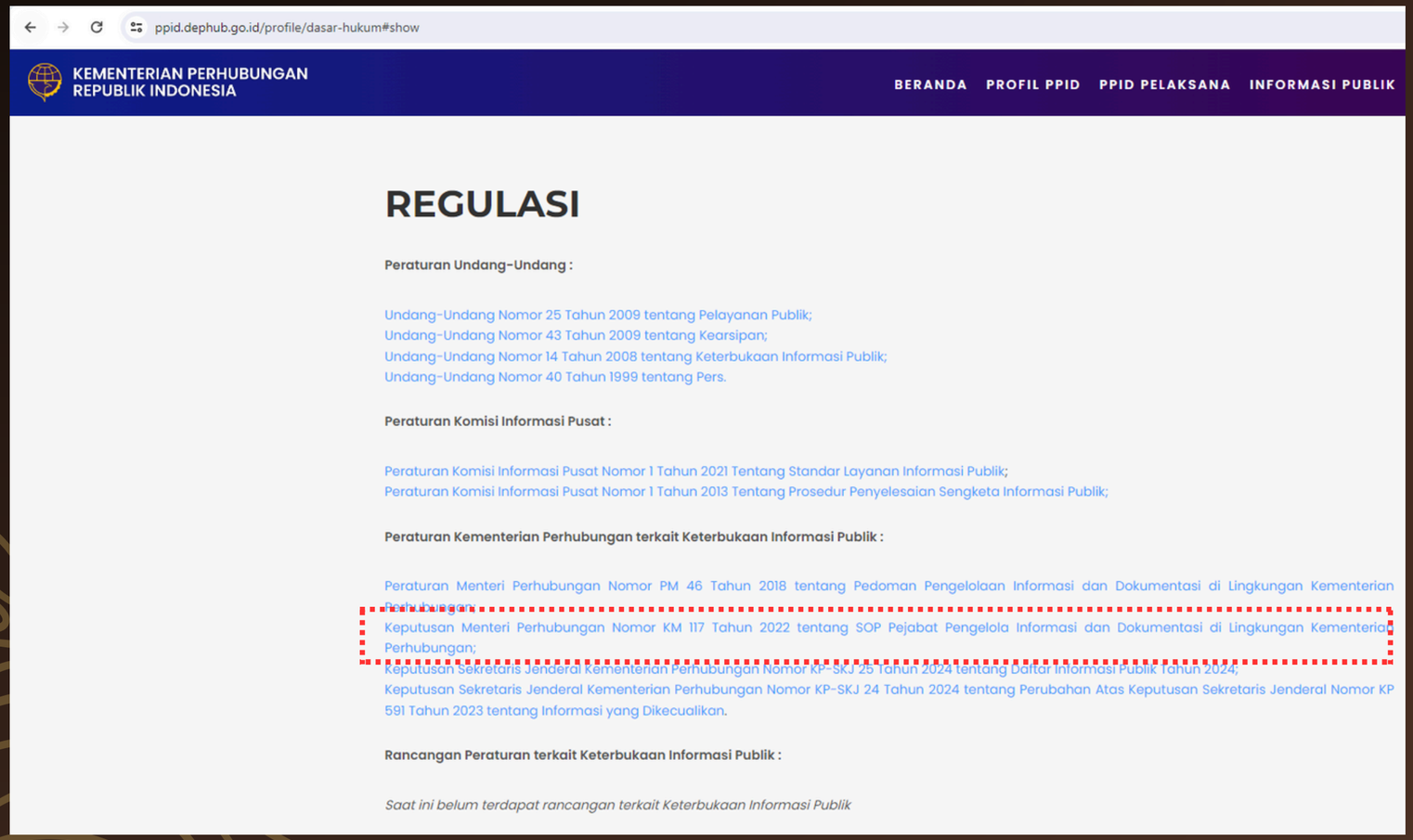

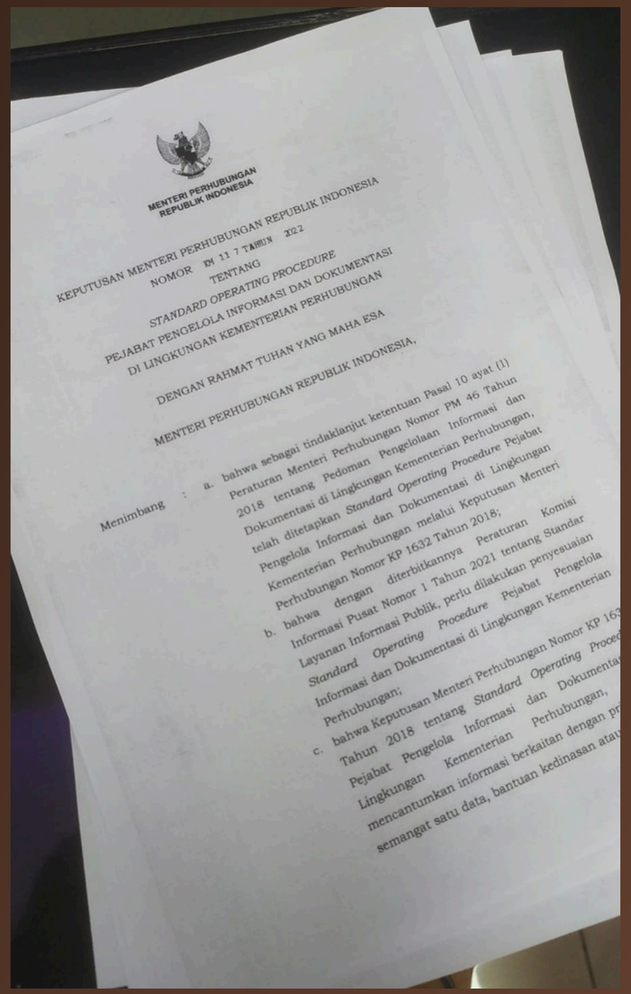

https://ppid.dephub.go.id/profile/dasar-hukum#show

Lampiran bukti dukung: bisa berupa link website yang menunjukkan KP 117 Tahun 2022 sudah diunggah ke website atau media sosial. Bukti dukung juga bisa berupa foto dari kepemilikan KP 117 Tahun 2022 yang dicetak berupa dokumen/buku dan ditaruh di ruang PPID unit kerja Saudara.

Link KP 117 Tahun 2022: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lRdmfzzJIJY8wnN-aYKVDfwwph9I0qas

4. Apakah unit kerja Saudara memiliki informasi mengenai profil singkat tentang organisasi PPID di unit kerja saudara? (narasi singkat mengenai keterbukaan informasi publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)

https://ppid.dephub.go.id/profile/ppid

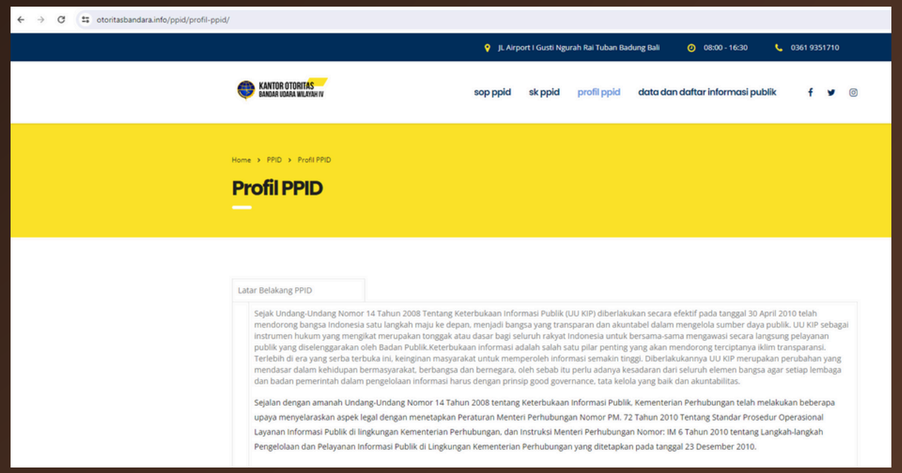

https://otoritasbandara.info/ppid/profil-ppid/

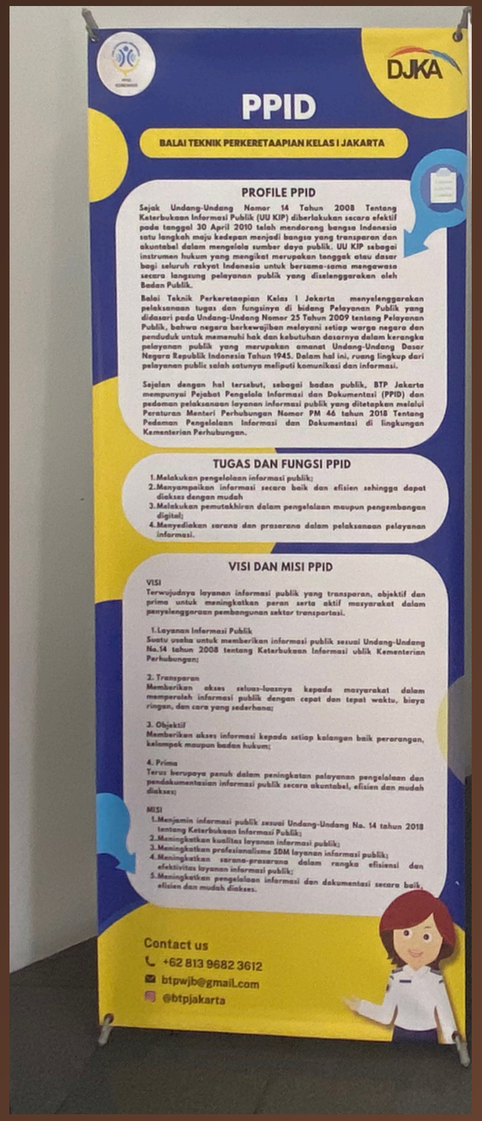

Lampiran bukti dukung: bisa berupa link website yang menunjukkan PROFIL PPID sudah diunggah ke website atau media sosial. Bukti dukung juga bisa berupa foto dari terpasangnya/tercetaknya narasi tentang profil PPID di ruang PPID unit kerja Saudara. Bukti dukung dapat berupa banner.

5. Apakah unit kerja Saudara memiliki informasi mengenai Tugas Fungsi PPID?

https://ppid.dephub.go.id/profile/tugas-fungsi#show

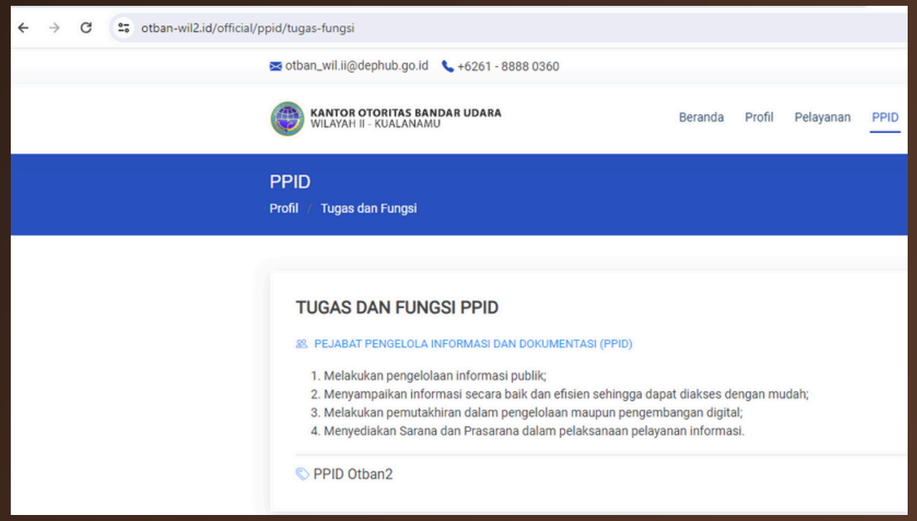

https://otban-wil2.id/official/ppid/tugas-fungsi

Lampiran bukti dukung: bisa berupa link website yang menunjukkan PROFIL PPID sudah diunggah ke website atau media sosial. Bukti dukung juga bisa berupa foto dari terpasangnya narasi tentang profil PPID di ruang PPID unit kerja Saudara. Dapat berupa banner.

Tugas dan Fungsi PPID untuk PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT mengikuti Tugas dan Fungsi PPID Utama. Saudara cukup menyalin ulang tugas dan fungsi PPID yang sudah terdapat di web ppid.dephub.go.id untuk dipasang di web unit kerja Saudara atau dicetak lalu dipajang di ruang PPID unit kerja Saudara.

PERTANYAN ADALAH TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PPID. BUKAN TUGAS FUNGSI UNIT KERJA

6. Apakah unit kerja Saudara memiliki informasi mengenai Struktur Organisasi PPID?

https://ppid.dephub.go.id/profile/struktur-organisasi#show

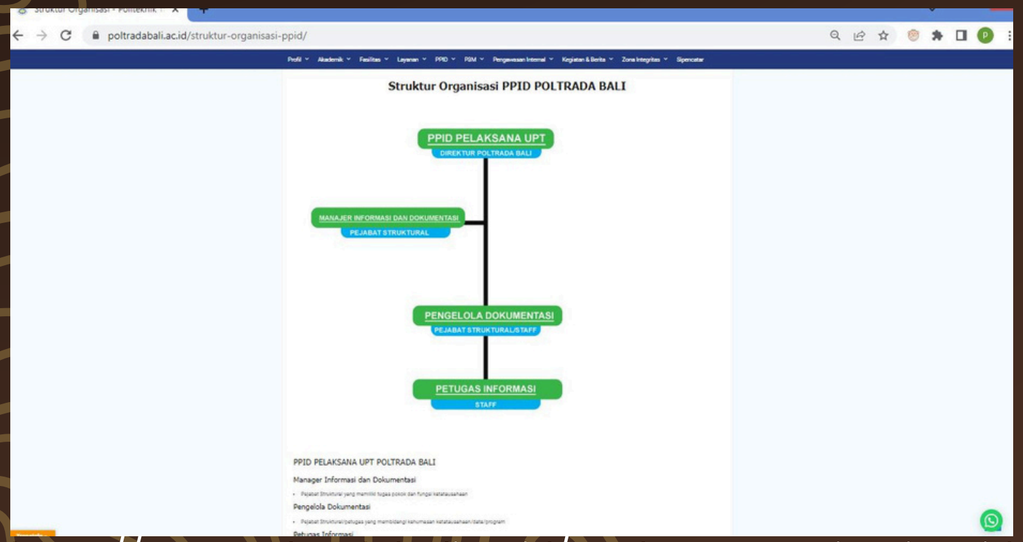

https://www.poltradabali.ac.id/struktur-organisasi-ppid/

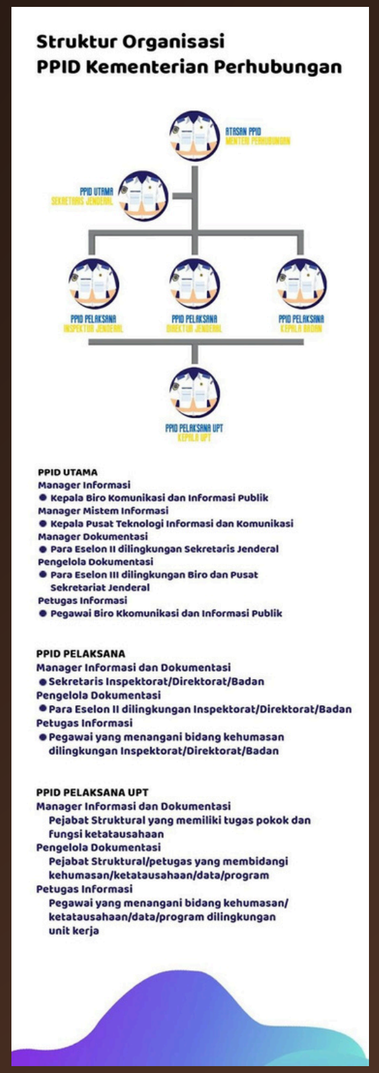

Lampiran bukti dukung: bisa berupa link website yang menunjukkan STRUKTUR ORGANISASI PPID sudah diunggah ke website atau media sosial. Bukti dukung juga bisa berupa foto dari terpasangnya STRUKTUR ORGANISASI PPID di ruang PPID unit kerja Saudara. Dapat berupa banner.

Struktur organisasi mengacu pada PM 46 Tahun 2018, link PM 46 tahun 2018: Link PM 46 Tahun 2018: https://drive.google.com/drive/folders/11MmFIprMAf2PnNz0w86xfyrBC8zdyXzT?usp=sharing

7. Apakah unit kerja Saudara memiliki informasi mengenai Visi Misi PPID?

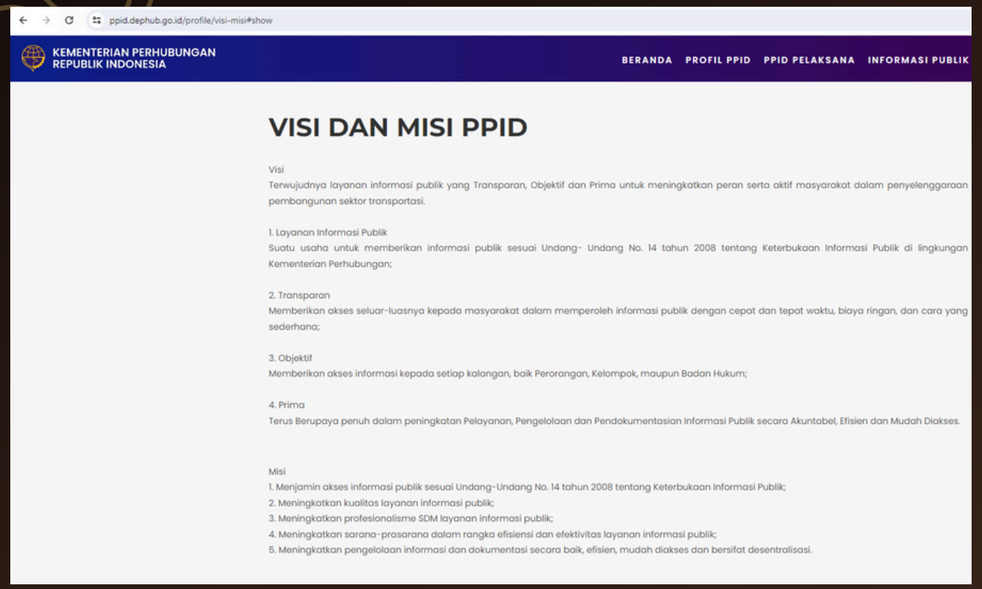

https://ppid.dephub.go.id/profile/visi-misi#show

Lampiran bukti dukung: bisa berupa link website yang menunjukkan VISI DAN MISI PPID sudah diunggah ke website atau media sosial. Bukti dukung juga bisa berupa foto dari terpasangnya/tercetaknya VISI DAN MISI PPID di ruang PPID unit kerja Saudara. Dapat berupa banner.

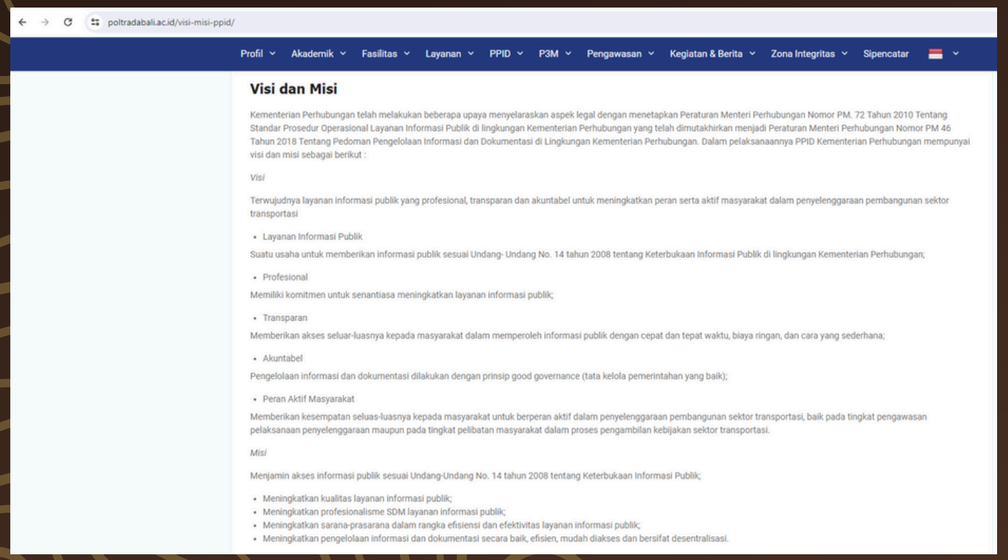

https://www.poltradabali.ac.id/visi-misi-ppid/

Visi dan Misi untuk PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT mengikuti Visi dan Misi PPID Utama. Saudara cukup menyalin ulang Visi dan Misi PPID yang sudah terdapat di web ppid.dephub.go.id untuk dipasang di web unit kerja Saudara atau dicetak lalu dipajang di ruang PPID unit kerja Saudara.

8. Apakah unit kerja Saudara menyelenggarakan forum, FGD, rapat terkait pengelolaan pelayanan informasi?

Lampirkan bukti dukung berupa foto kegiatan. Kegiatan bisa berupa sosialisasi mengenai PPID di internal unit kerja, rapat pembahasan terkait pelayanan informasi, zoom kegiatan penyelenggaraan bimtek pelayanan informasi, dsb. Kegiatan tidak terpaku pada kegiatan yang besar.

INDIKATOR I

B. PELAPORAN

1. Apakah unit kerja Saudara memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2023 (a. Jumlah permohonan informasi yang diminta, b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi, c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak , d. Alasan penolakan permohonan informasi) ?

Selama tahun 2023, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 230 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

PPID Utama : 24
PPID Pelaksana 172

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

BULAN	PPID UTAMA	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BKT	BPSDMP	BPTJ	ITJEN	TOTAL
JANUARI	3	1	7	4	0	0	0	0	0	15
FEBRUARI	3	6	4	4	0	3	0	0	0	20
MARET	2	15	4	3	2	0	0	0	0	26
APRIL	1	5	1	0	2	0	0	0	0	9
MEI	1	4	1	3	4	0	0	2	0	15
JUNI	6	9	2	3	1	1	0	0	0	22
JULI	1	0	1	4	1	0	0	0	0	7
AGUSTUS	2	6	5	3	3	1	0	1	0	21
SEPTEMBER	1	5	2	2	4	0	0	0	0	14
OKTOBER	2	14	2	6	3	0	1	0	0	28
NOVEMBER	1	6	1	1	0	0	0	1	0	10
DESEMBER	1	3	1	4	0	0	0	0	0	9
TOTAL										196

INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 196 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan,sebanyak 192 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 4 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2023, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 196 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 14 hari kerja.

Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2023 telah masuk sebanyak 230 permohonan informasi ke PPID Utama dan PPID Pelaksana, terdapat 196 permohonan informasi yang diterima dan 34 permohonan informasi yang ditolak antara lain karena tidak menyertakan identitas diri, informasi yang diminta tidak jelas juga yang bukan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

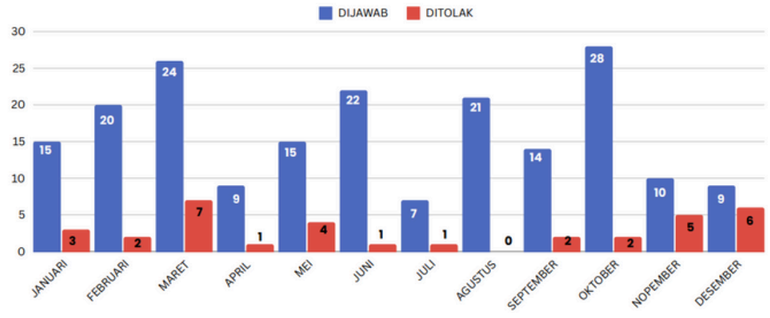

Lampirkan bukti yang link yang memuat Laporan Layanan Informasi Publik di Unit Kerja Saudara dengan detail yang mencakup: a. Jumlah permohonan informasi yang diminta, b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi, c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak , d. Alasan penolakan permohonan informasi)

Contoh dokumen: https://ppid.dephub.go.id/laporan-tahunan/preview?id=TXpNPQ==

2. Apakah unit kerja Saudara telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2023 ke PPID Utama? (Pelaporan dilakukan secara berjenjang. PPID Pelaksana UPT kepada PPID Pelaksana dan diteruskan oleh PPID Pelaksana kepada PPID Utama)

Lampirkan bukti surat/email korespondensi/bukti kirim jasa pos untuk penyampaian laporan layanan informasi tahun 2023 :

- Apabila dari PPID Pelaksana UPT: surat yang ditujukan kepada PPID Pelaksana dengan tembusan PPID Utama, tembusan BKIP
- Apabila dari PPID Pelaksana: surat yang ditujukan kepada PPID Utama, tembusan BKIP.

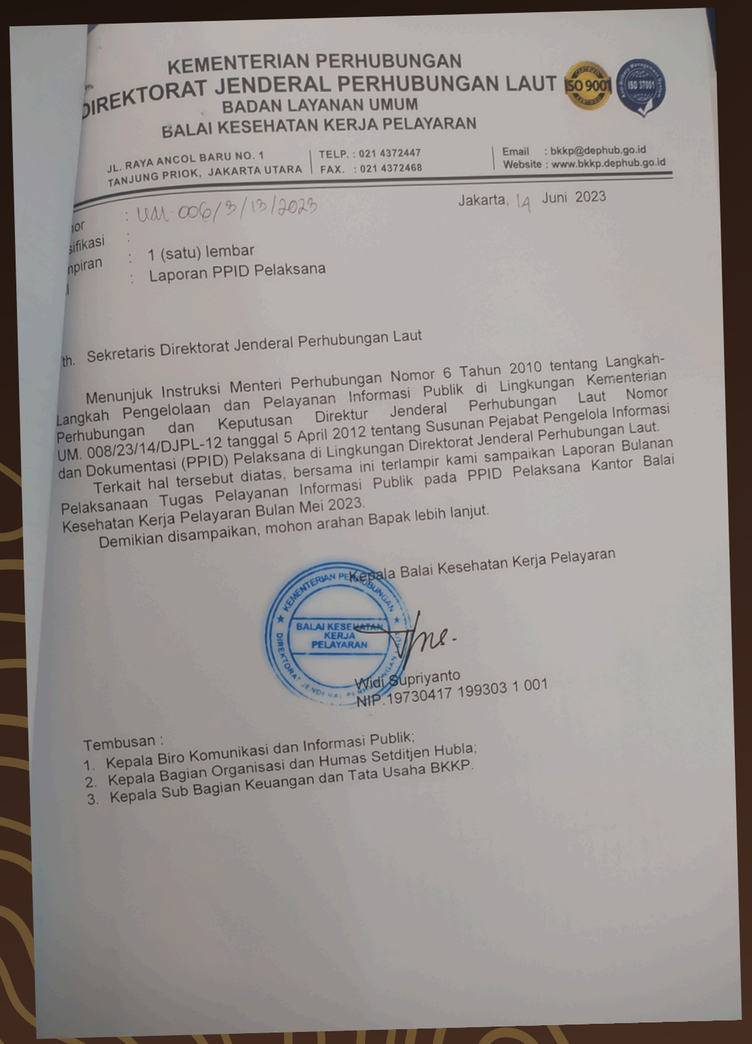

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

JL. RAYA ANCOL BARU NO. 1 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA | TELP. : 021 4372447 FAX. : 021 4372468 | Email : bkkp@dephub.go.id Website : www.bkkp.dephub.go.id

Nomor : UM. 006/3/13/2023 Jakarta, 14 Juni 2023
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) lembar
: Laporan PPID Pelaksana

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Menunjuk Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008/23/14/DJPL-12 tanggal 5 April 2012 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Terkait hal tersebut diatas, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Bulan Mei 2023.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Widi Supriyanto
NIP 19730417 199303 1 001

Tembusan :
1. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Humas Setditjen Hubla;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha BKKP.

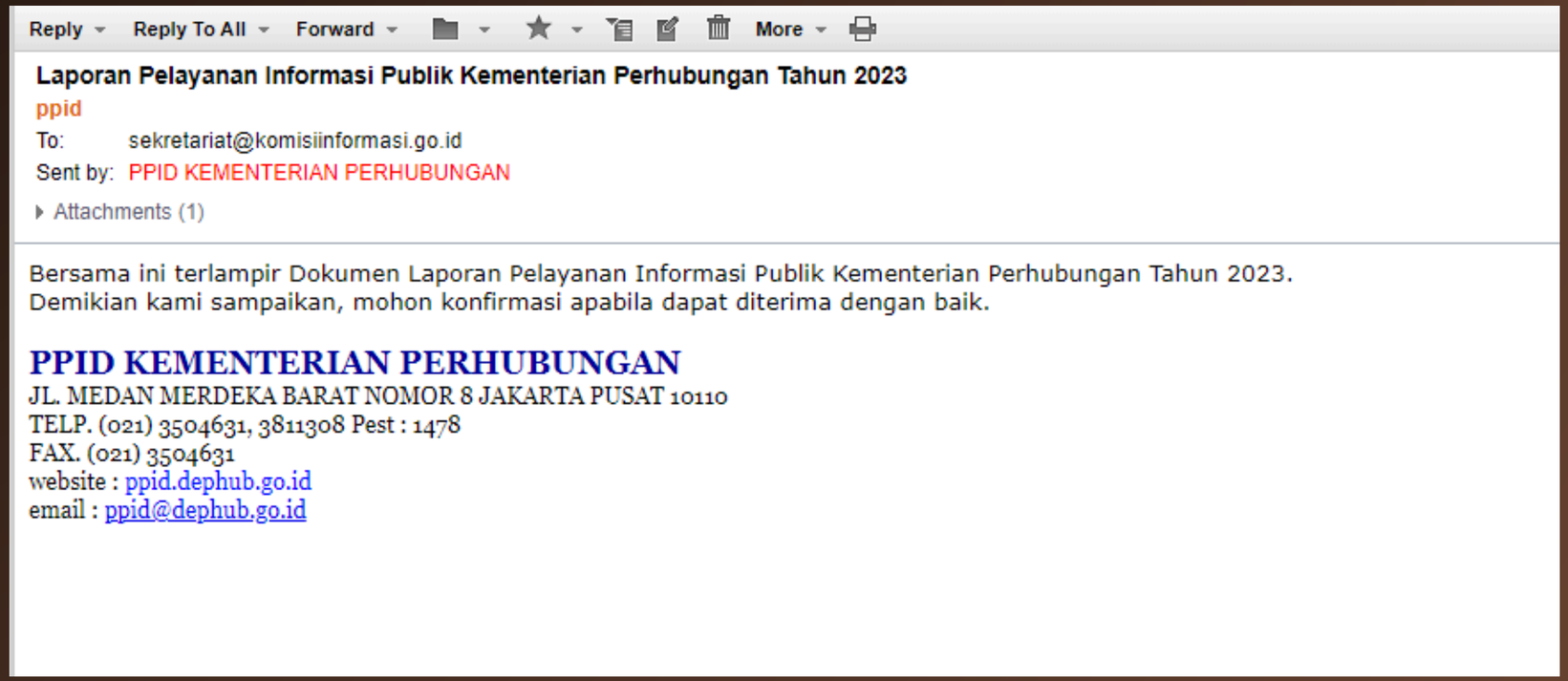

Reply | Reply To All | Forward | More

Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2023
ppid
To: sekretariat@komisiinformasi.go.id
Sent by: PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Attachments (1)

Bersama ini terlampir Dokumen Laporan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2023.
Demikian kami sampaikan, mohon konfirmasi apabila dapat diterima dengan baik.

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 8 JAKARTA PUSAT 10110
TELP. (021) 3504631, 3811308 Pest : 1478
FAX. (021) 3504631
website : ppid.dephub.go.id
email : ppid@dephub.go.id

INDIKATOR I

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Apakah unit kerja Saudara menyediakan Meja Layanan Informasi/PPID?

Lampirkan link yang berisi foto ruangan PPID di unit kerja Saudara beserta fasilitas yang ada di ruang tersebut. Foto harus menunjukkan bahwa ruangan telah representatif menjadi ruang PPID yang mampu mengakomodasi pemohon informasi yang datang langsung.

2. Apakah unit kerja Saudara menyediakan Formulir Permohonan Informasi?

a. Formulir Permohonan Informasi cetak
b. Formulir Permohonan secara online

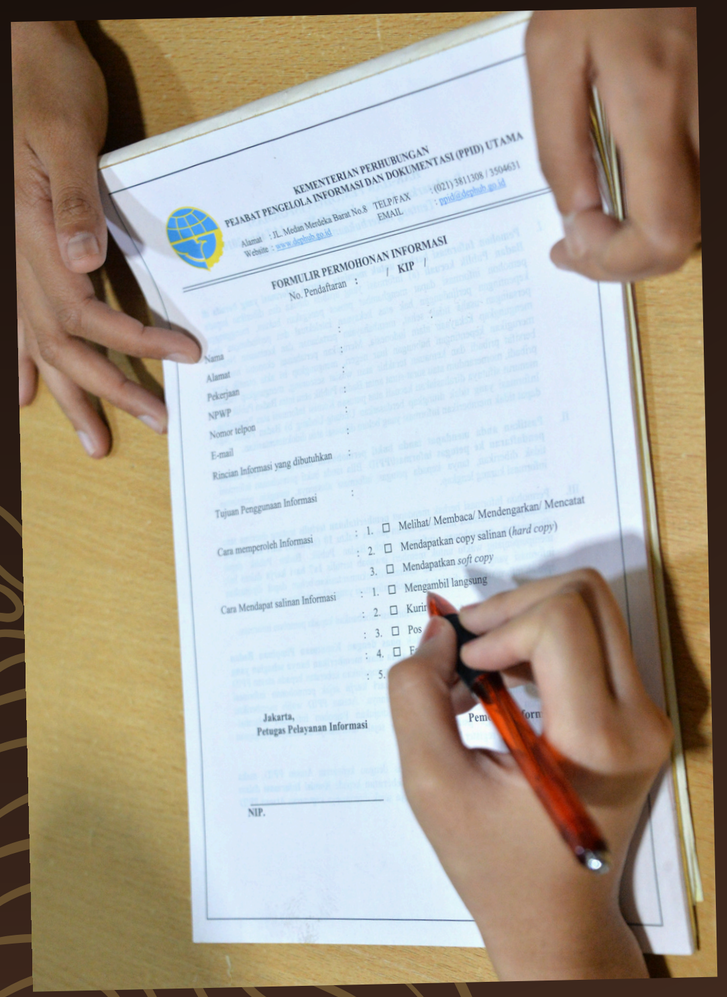

formulir permohonan informasi

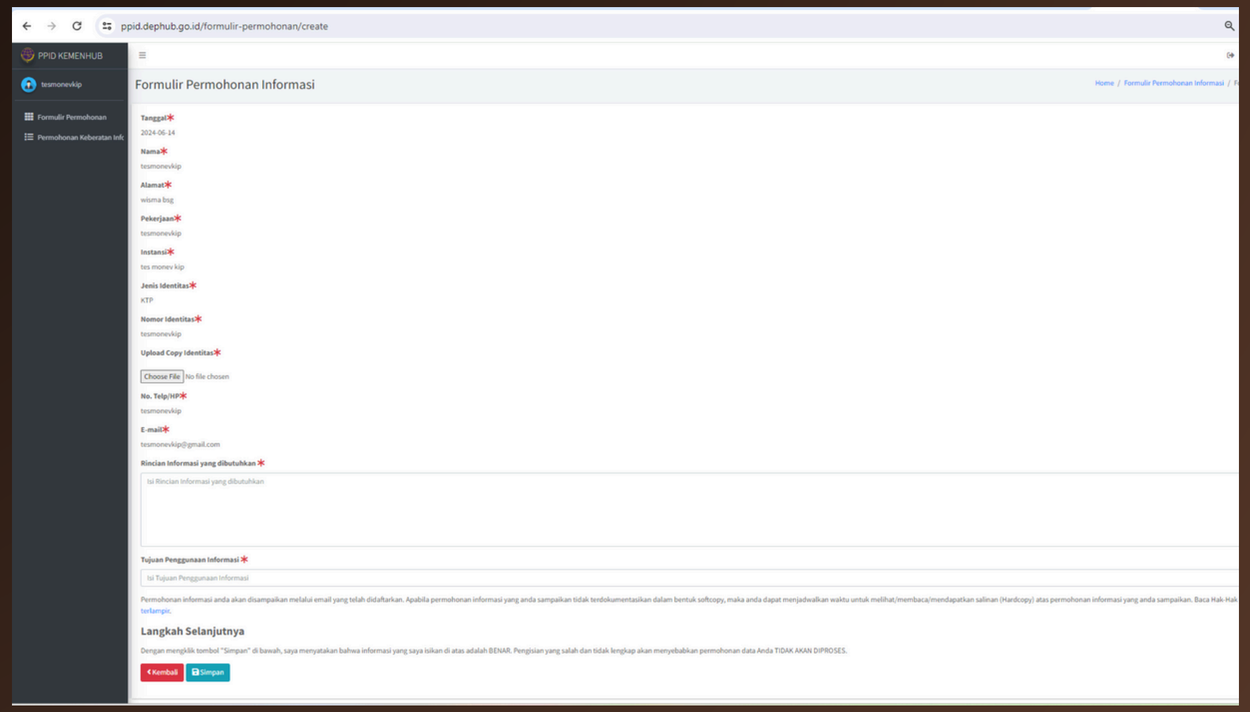

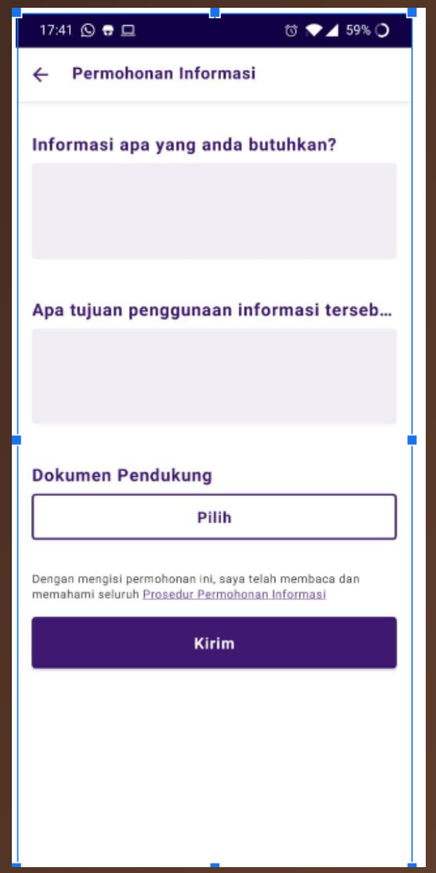

dashboard ppid.dephub.go.id

Lampirkan bukti dukung berupa formulir permohonan informasi yang dicetak dan disediakan di ruang PPID unit kerja Saudara serta lampirkan formulir permohonan informasi online yang bisa diakses masyarakat melalui website unit kerja Saudara

Formulir Permohonan Informasi mengacu pada PM 46 Tahun 2018 dan bisa diunduh melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1s7vCQ9dz86DxcD2a519-NlpkBdktd5Z5?usp=drive_link

3. Apakah unit kerja Saudara menyediakan Daftar Register Permohonan tahun 2023?

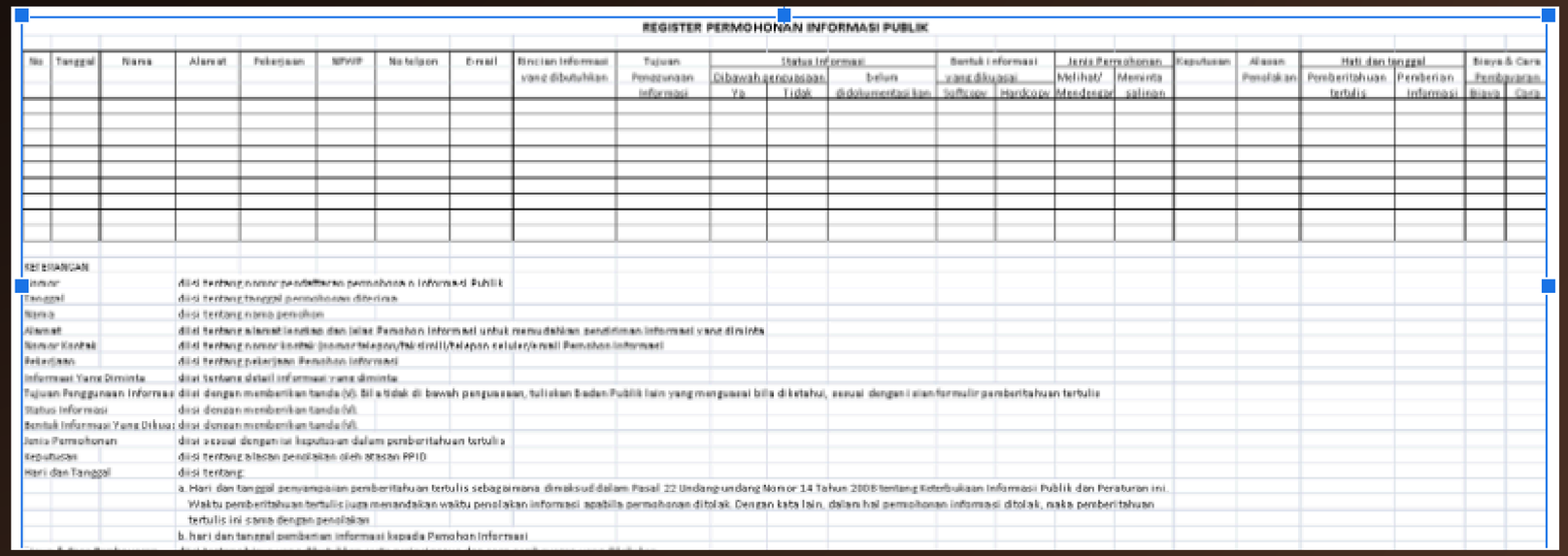

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tanggal	Nama	Alamat	Pekerjaan	NPWP	No telpon	E-mail	Rincian Informasi yang dibutuhkan	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
										Dibawah penguasaan		belum didokumentasikan	softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mendengar	Meminta salinan			Pemberitahuan tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
										Ya	Tidak											

KETERANGAN

Nomor	diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik
Tanggal	diisi tentang tanggal permohonan diterima
Nama	diisi tentang nama pemohon
Alamat	diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan penyampaian informasi yang diminta
Nomor Kontak	diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/handphone/telepon seluler/email Pemohon Informasi
Pekerjaan	diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi
Informasi Yang Diminta	diisi tentang detail informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi	diisi dengan memberikan tanda (V). Bila tidak di bawah penguasaan, tulisan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian formulir pemberitahuan tertulis
Status Informasi	diisi dengan memberikan tanda (V).
Bentuk Informasi Yang Dikuasai	diisi dengan memberikan tanda (V).
Jenis Permohonan	diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis
Keputusan	diisi tentang bilasan penolakan oleh Atasan PPID
Hari dan Tanggal	diisi tentang:
	a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan
	b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi

Daftar Register Permohonan mengacu pada PM 46 Tahun 2018 dan bisa diunduh melalui tautan berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1s7vCQ9dz86DxcD2a519-NlpkBdktd5Z5?usp=drive_link

Silakan isi register permohonan informasi tersebut dengan seluruh permohonan informasi yang masuk ke unit kerja Saudara. Register tersebut selanjutnya bisa dilampirkan lewat link atau unggah dokumen.

4. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan jadwal pelayanan informasi publik?

Lampirkan banner ataupun pengumuman yang menunjukkan jadwal pelayanan informasi PPID sudah dipasang di ruang PPID Unit Kerja Saudara

https://poltektranssdp-palembang.ac.id/kontak-ppid/

Bisa juga melampirkan link beserta screen capture laman website yang menunjukkan jadwal layanan informasi PPID di unit kerja Saudara

5. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik?

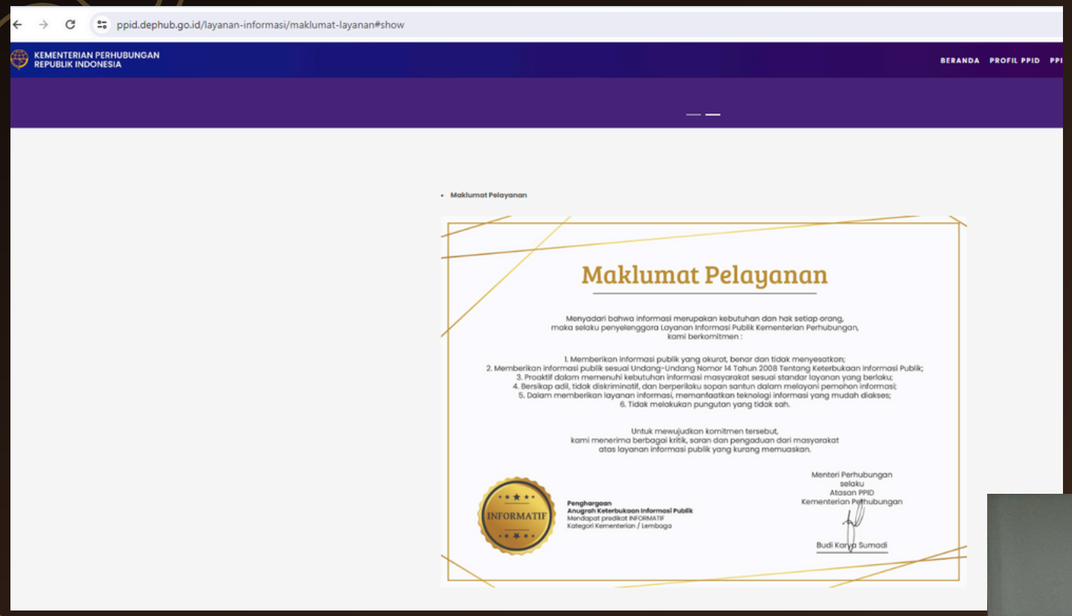

https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/maklumat-layanan#show

https://poltektranssdp-palembang.ac.id/maklumat-pelayanan/

Lampirkan foto yang menunjukkan Maklumat Pelayanan sudah terpasang di ruang PPID unit kerja Saudara atau capture bukti tayang Maklumat Pelayanan yang disampaikan di website unit kerja Saudara.

Isi Maklumat Pelayanan untuk seluruh PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT adalah sama. Silakan menyalin isinya yang dapat dilihat melalui tautan berikut: https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/maklumat-layanan#show

6. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan kebijakan mengenai Standar Biaya Perolehan Informasi Publik?

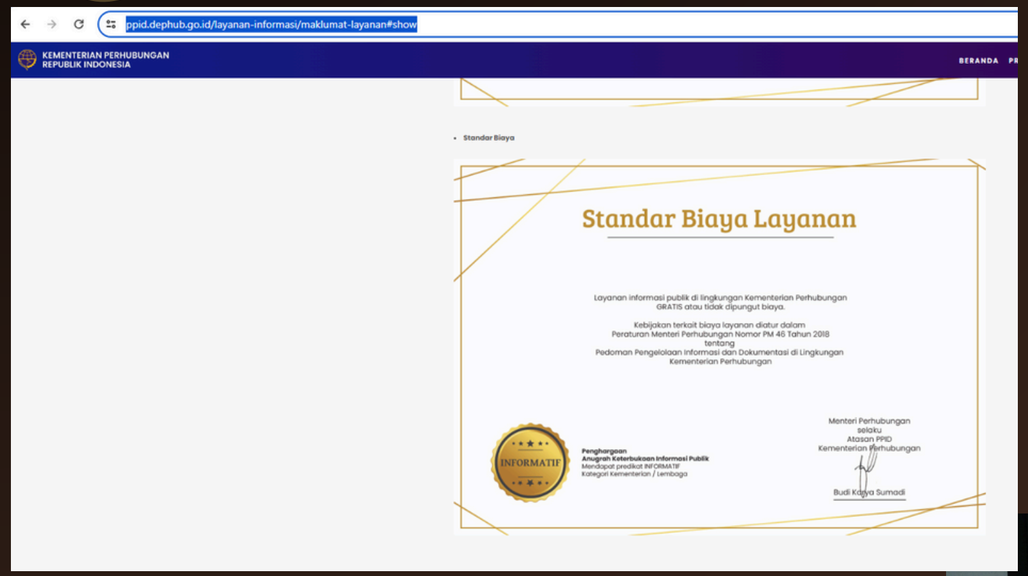

https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/maklumat-layanan#show

https://poltektranssdp-palembang.ac.id/maklumat-pelayanan/

Lampirkan foto yang menunjukkan Standar Biaya Layanan sudah terpasang di ruang PPID unit kerja Saudara atau capture bukti tayang Standar Biaya Layanan yang disampaikan di website unit kerja Saudara.

Isi Standar Biaya Layanan untuk seluruh PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT adalah sama. Silakan menyalin isinya yang dapat dilihat melalui tautan berikut: https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/maklumat-layanan#show

7. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan Informasi mengenai tata cara permohonan informasi?

https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/prosedur-permohonan-informasi#show

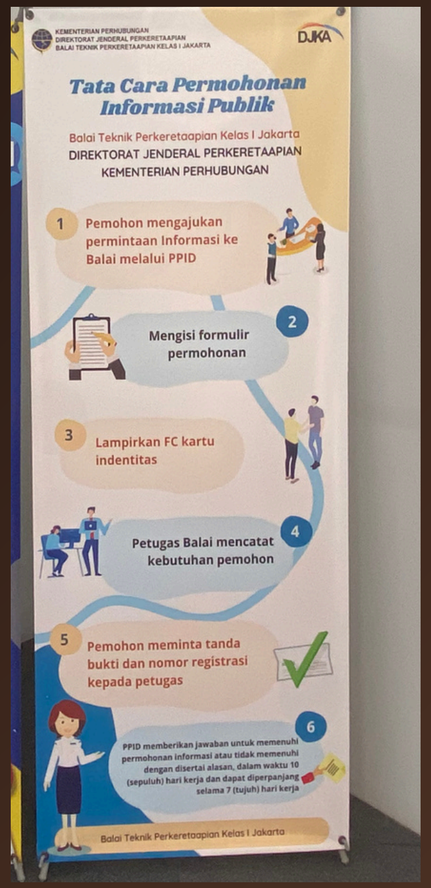

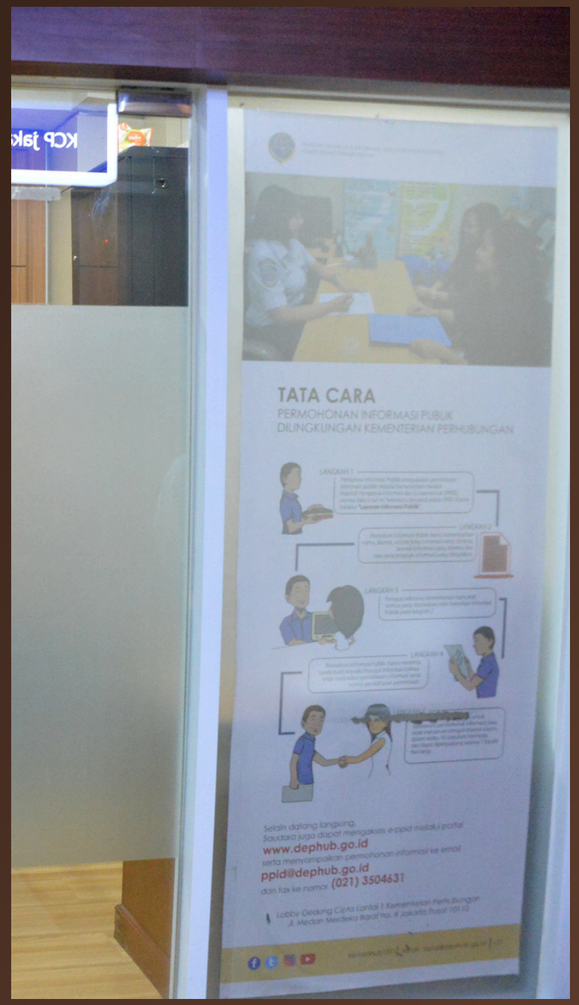

Lampirkan data dukung berupa foto yang menunjukkan tata cara permohonan informasi publik dipajang di ruang PPID unit kerja Saudara atau lampirkan tangkap layar halaman website yang memuat tata cara permohonan informasi publik

8. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan Informasi mengenai tata cara pengajuan keberatan?

https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/prosedur-permohonan-keberatan-informasi#show

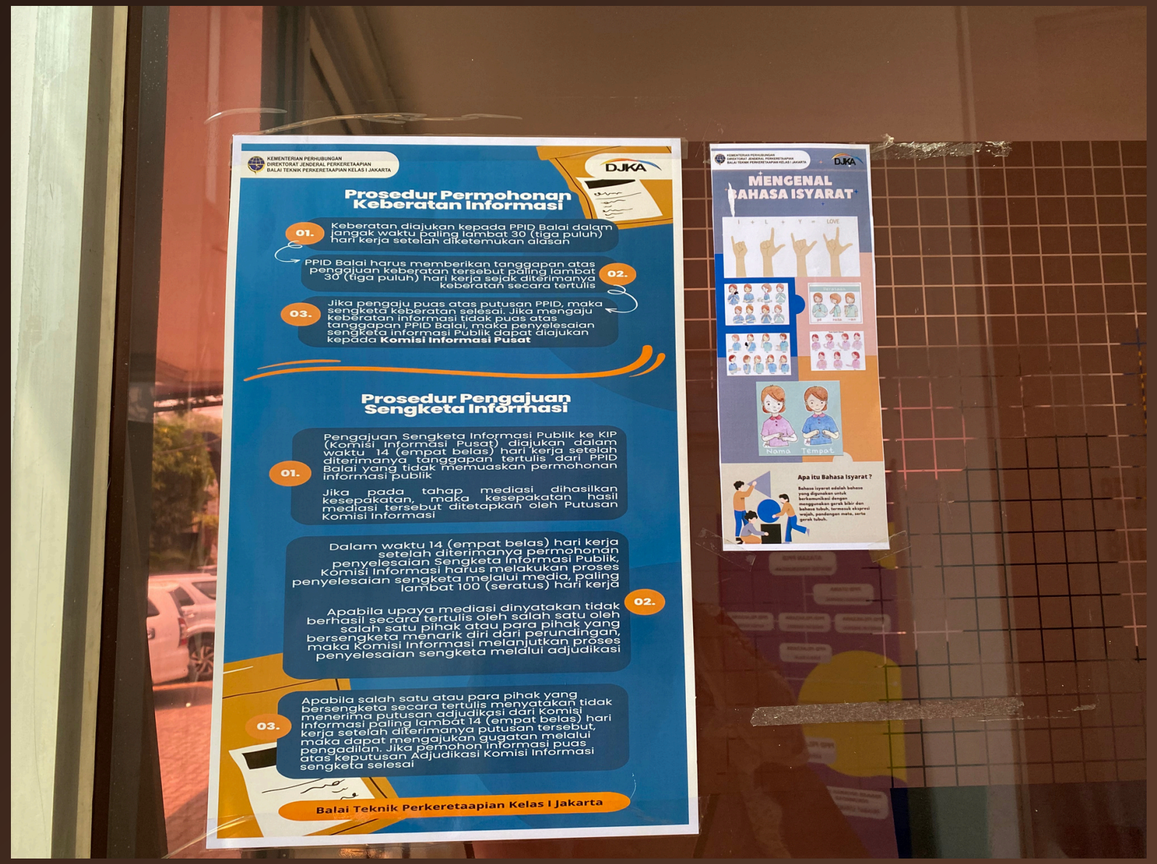

Lampirkan data dukung berupa foto yang menunjukkan tata cara pengajuan keberatan dipajang di ruang PPID unit kerja Saudara atau lampirkan tangkap layar halaman website yang memuat tata cara pengajuan keberatan

9. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan Informasi mengenai tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi?

https://ppid.dephub.go.id/layanan-informasi/prosedur-pengajuan-sengketa#show

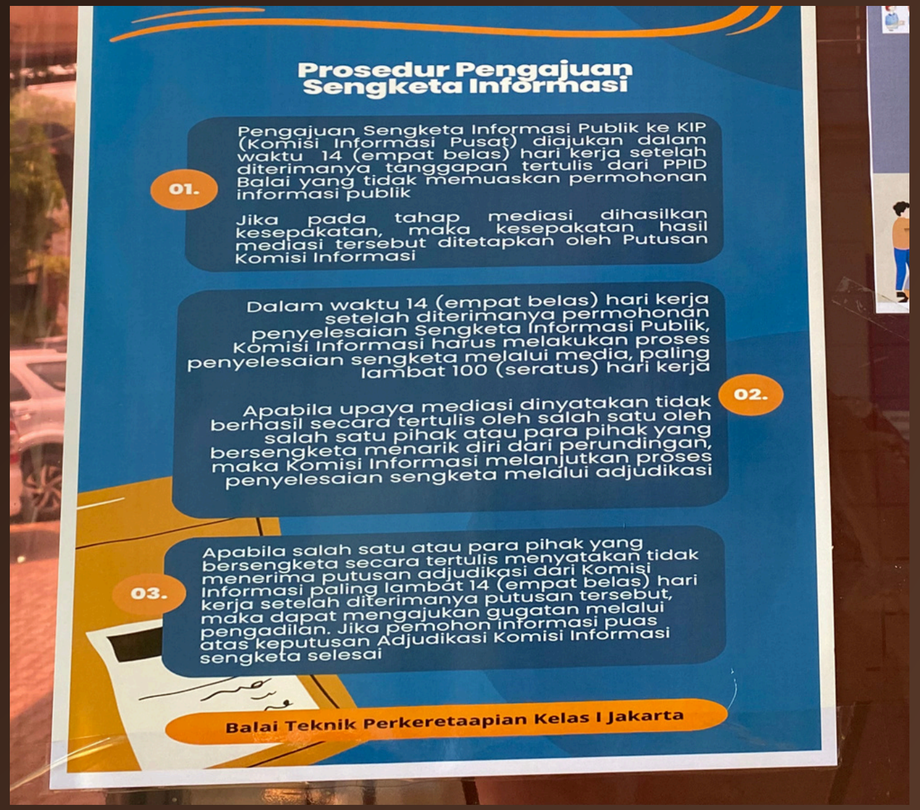

Lampirkan data dukung berupa foto yang menunjukkan tata cara pengajuan sengketa informasi yang dipajang di ruang PPID unit kerja Saudara atau lampirkan tangkap layar halaman website yang memuat tata cara pengajuan keberatan

INDIKATOR I

D. AKSESIBILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Apakah unit kerja Saudara memiliki web/ laman/ menu/ direktori khusus PPID/ Keterbukaan Informasi Publik/ Informasi Publik?

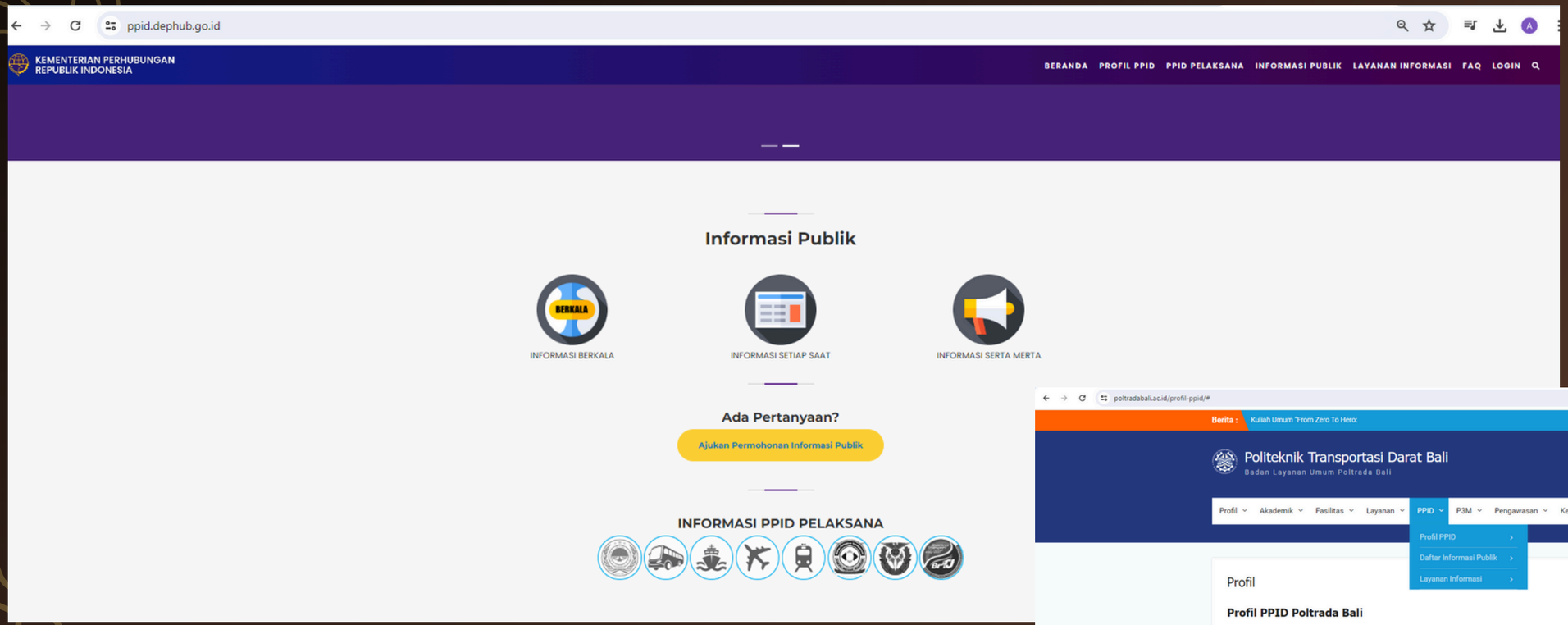

https://ppid.dephub.go.id/

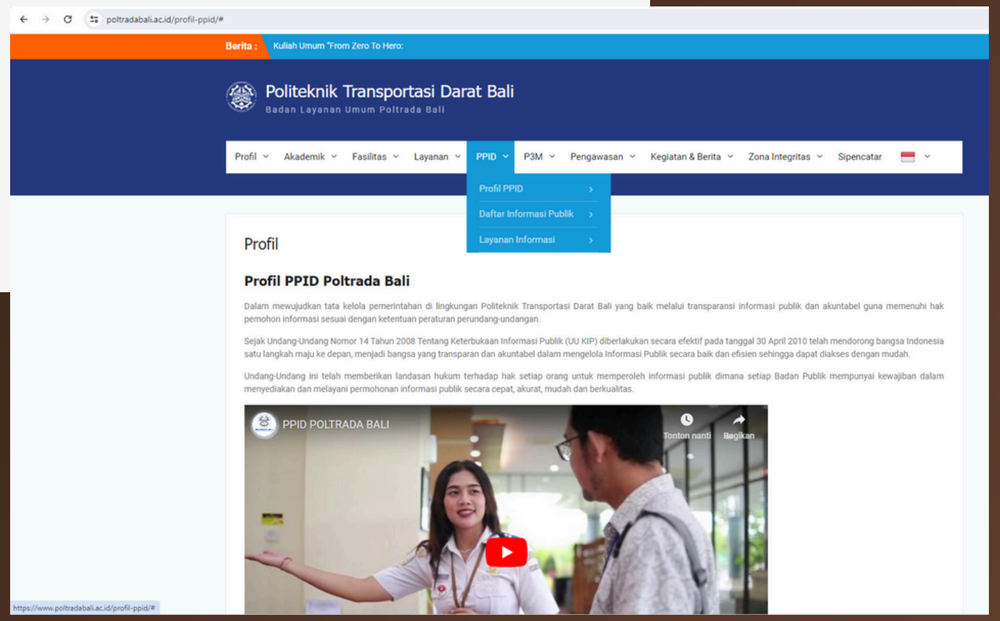

https://www.poltradabali.ac.id/profil-ppid/#

Lampirkan tangkap layar yang menunjukkan bahwa unit kerja Saudara memiliki website yang memuat informasi seputar PPID. Bisa alamat website khusus PPID di unit kerja Anda atau menu PPID di website unit kerja

2. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan konten keterbukaan informasi publik, diantaranya: Rencana Kerja tahun 2024 dan Laporan Tahunan tahun 2023 pada saluran komunikasi yang dimiliki unit kerja (website, media sosial, papan pengumuman, flyer, poster, dll)

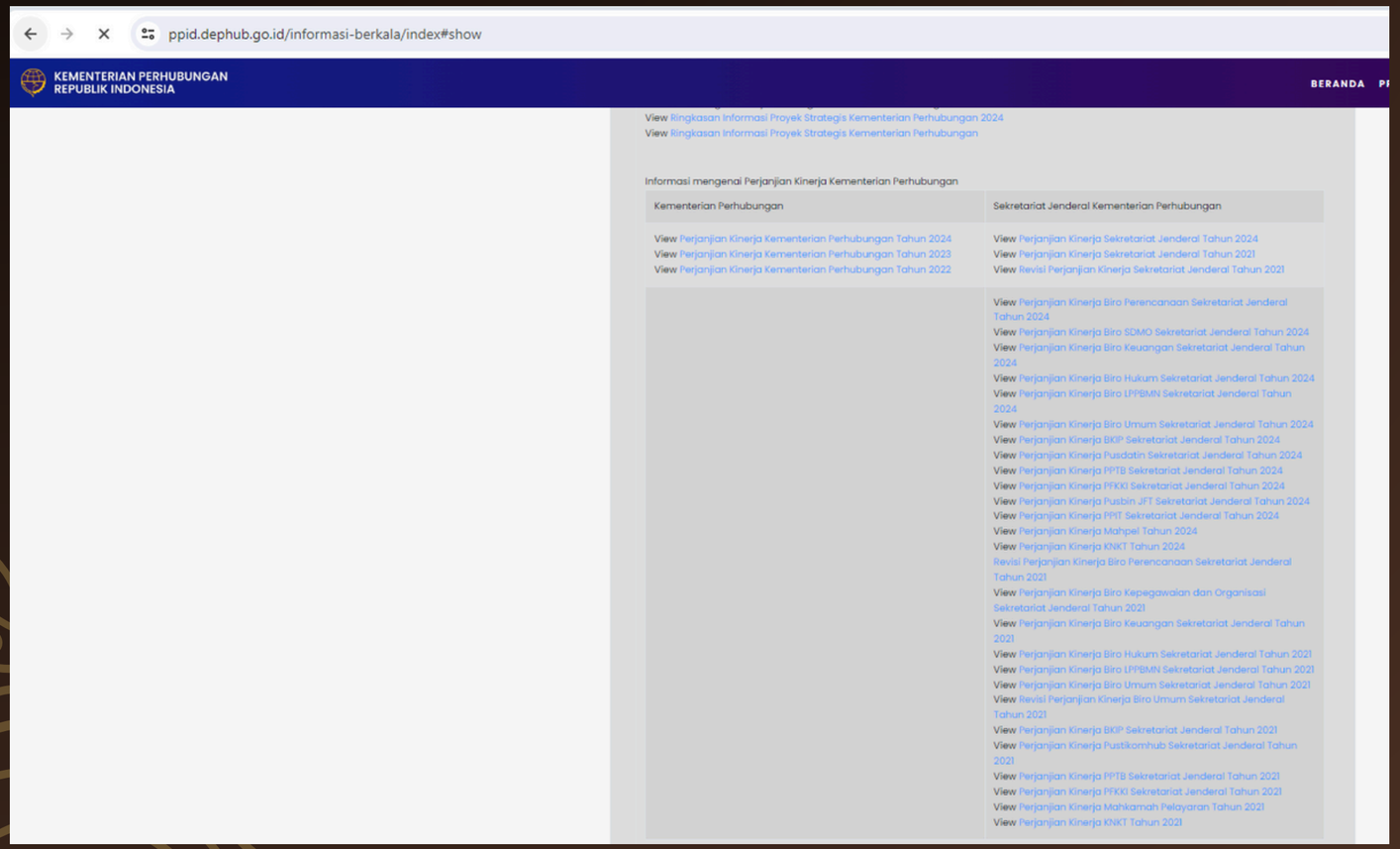

https://ppid.dephub.go.id/informasi-berkala/index#show

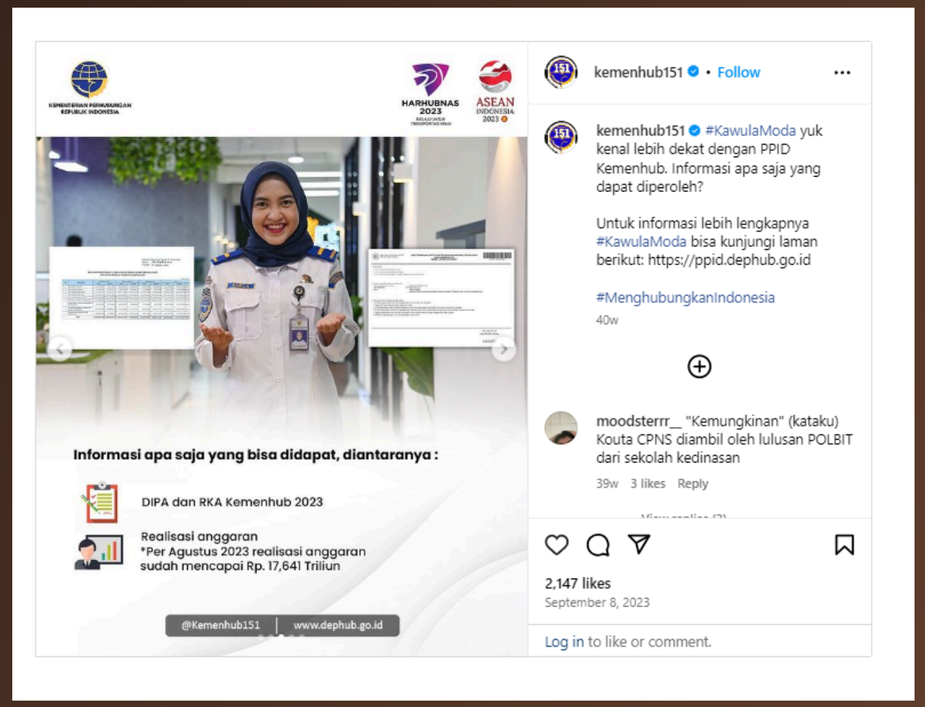

https://www.instagram.com/p/Cw6rZVAr0rB/?img_index=3

Lampirkan link atau tangkap layar yang menunjukkan bahwa unit kerja Saudara mengumumkan informasi seputar konten keterbukaan informasi Publik seperti Renja 2024 dan Laptah 2024 di saluran komunikasi

3. Apakah unit kerja Saudara memiliki akses/penunjuk yang memberikan keramahan pada penyandang disabilitas?

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Telp : 151
Website : ppid.dephub.go.id Email : ppid@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : / KIP /

(Nama)

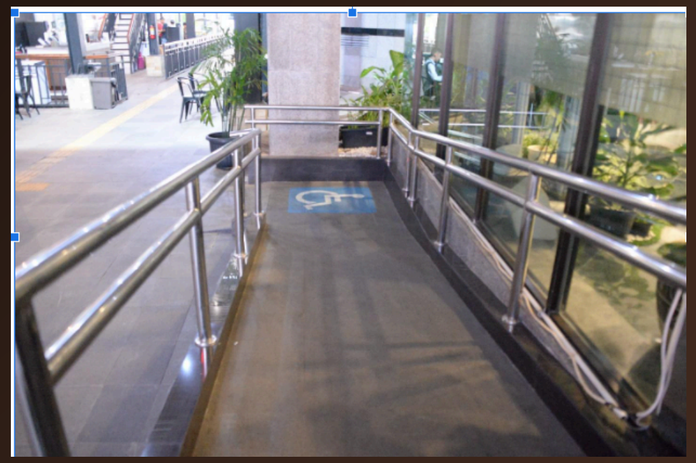

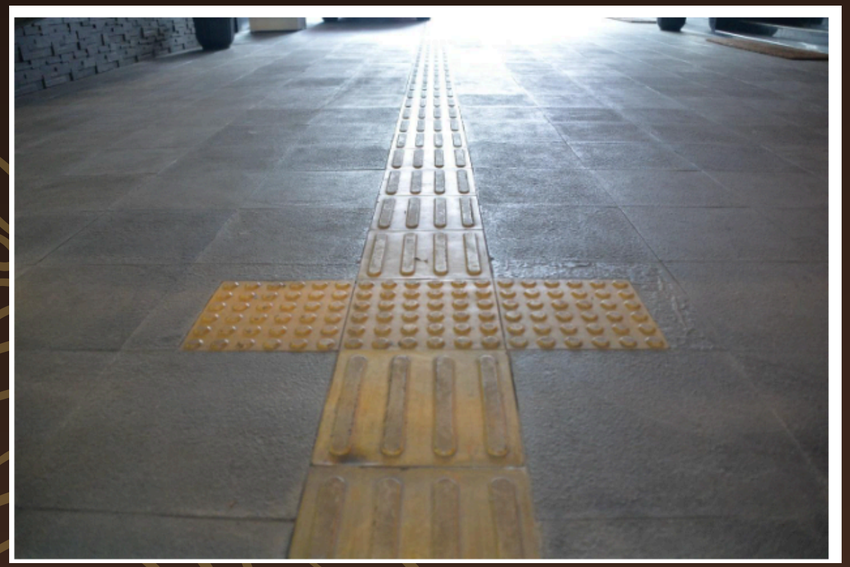

Lampirkan foto sarana dan prasarana yang ramah pada disabilitas, bisa berupa formulir permohonan dalam huruf braile, website yang ramah disabilitas, penyediaan kursi roda, Guiding Block Tactile Paving Jalur Difabel, dsb

INDIKATOR II

A. DIUMUMKAN BERKALA

1. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan profil unit kerja?
   a. Alamat kantor lengkap unit kerja (bukan alamat kantor PPID)
   b. Tugas fungsi
   c. Struktur organisasi

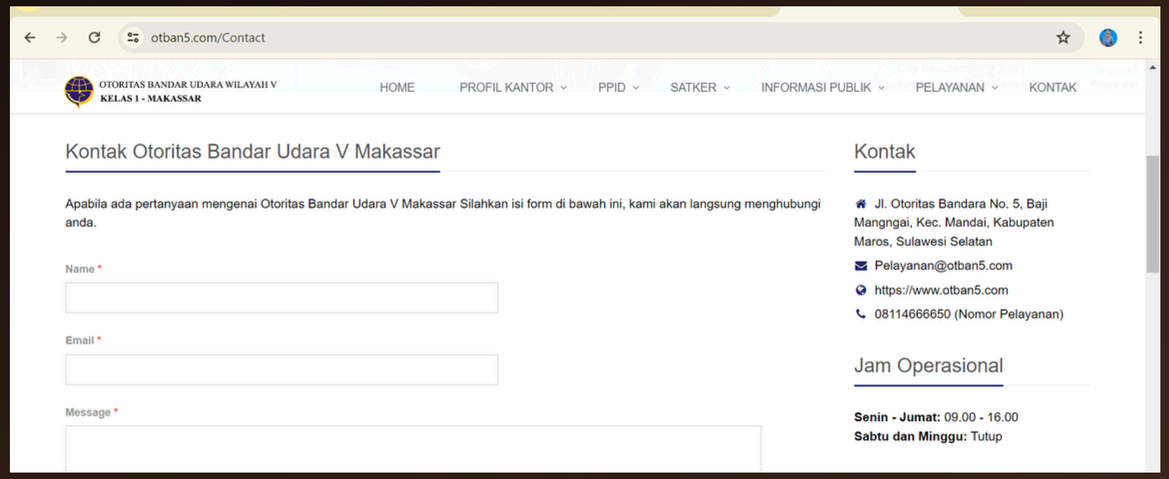

Alamat kantor lengkap dari unit kerja

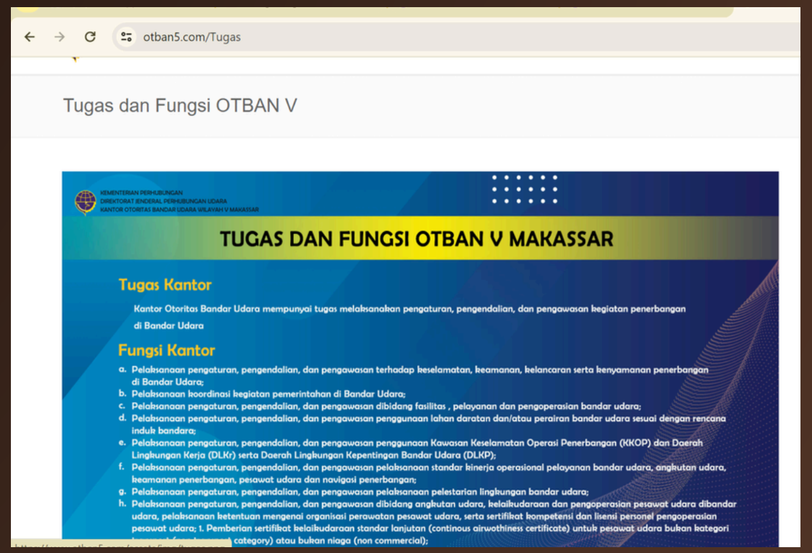

https://www.otban5.com/Tugas

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Lampirkan foto yang menunjukkan unit kerja Saudara mengumumkan profil unit kerja yang mencakup alamat kantor, tugas fungsi unit kerja, dan struktur organisasi. Bisa berupa tangkap layar dari website, atau foto banner yang dipasang di kantor, dsb.

2. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan lembar berita negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pemipinan unit kerja (tahun terakhir)?

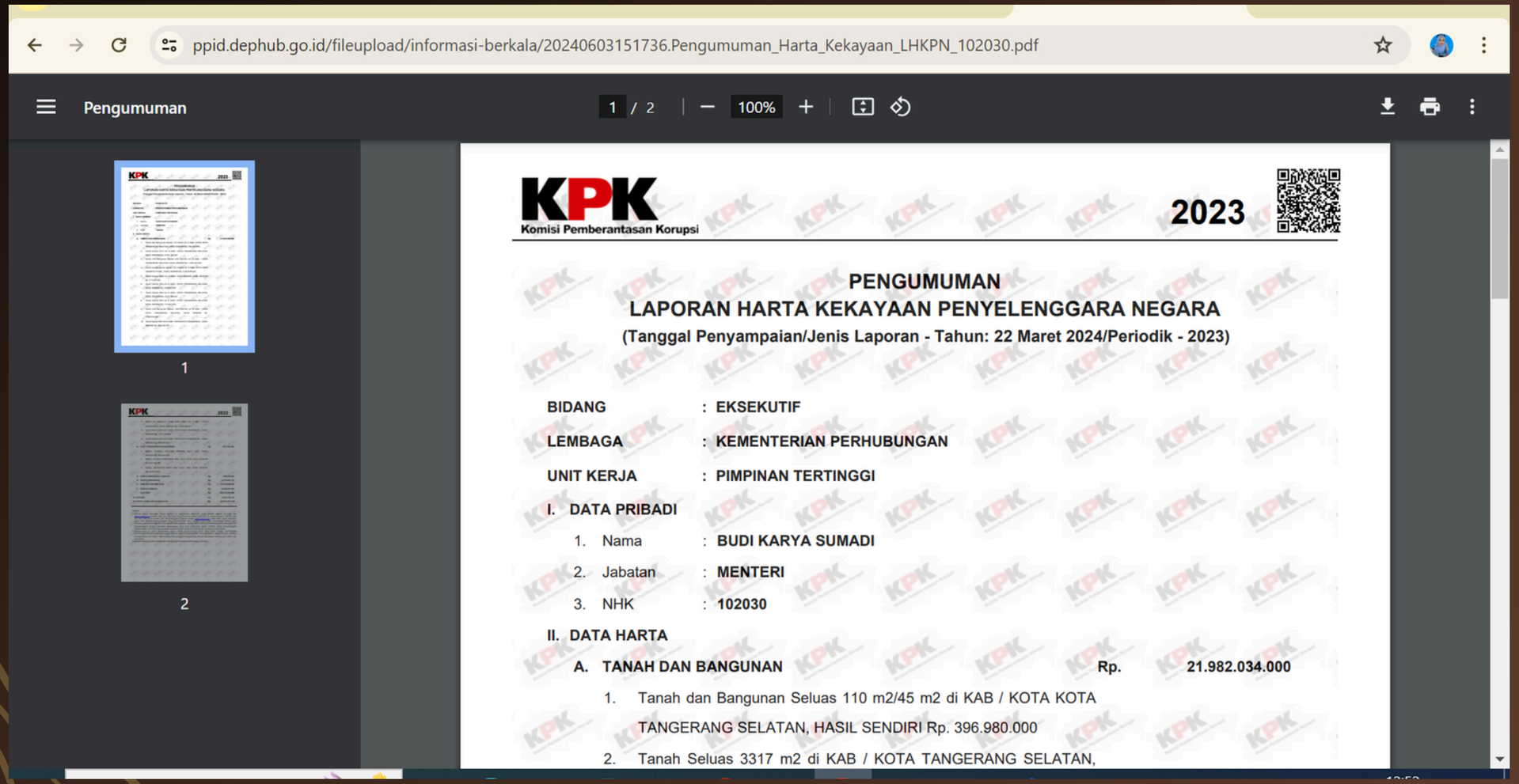

ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20240603151736.Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_102030.pdf

Pengumuman 1 / 2 100%

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi 2023

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**
LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT KERJA : **PIMPINAN TERTINGGI**

I. DATA PRIBADI
1. Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
2. Jabatan : **MENTERI**
3. NHK : **102030**

II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 21.982.034.000**
1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 396.980.000
2. Tanah Seluas 3317 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN,

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20240603151736.Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_102030.pdf

Lampirkan Pengumuman LHKPN dari pimpinan unit kerja yang sudah diunggah di website kantor atau dipasang di area yang mudah dijangkau publik di kantor. Pastikan yang diunggah adalah lembaran yang berisikan catatan harta dari pimpinan unit kerja dengan tahun pelaporan yang paling terkini. Contoh terupdate adalah LHKPN Menhub yang sudah diunggah di website PPID. INGAT: LHKPN Pejabat Publik adalah informasi terbuka.

3. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan laporan tahunan 2023?

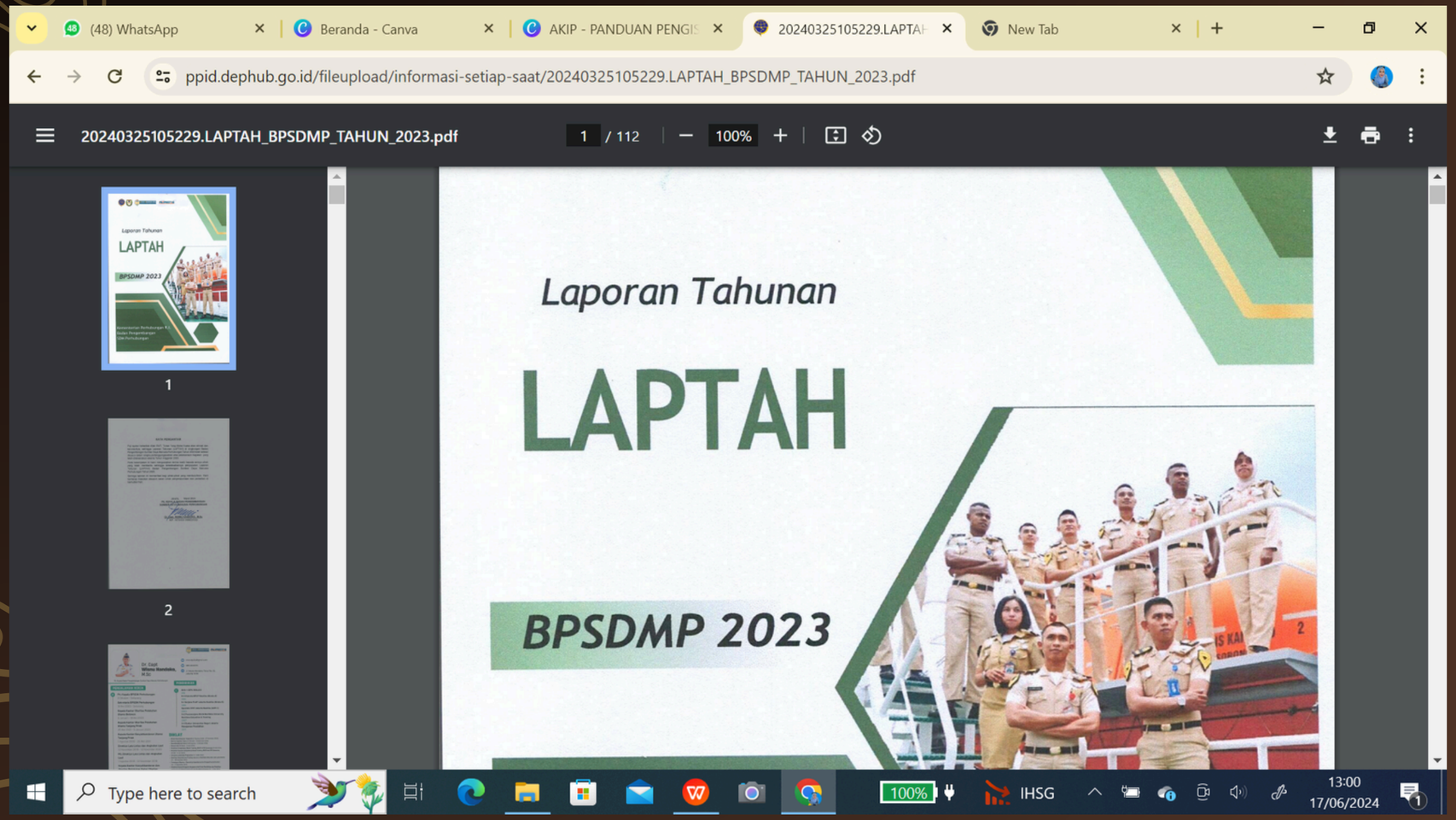

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-setiap-saat/20240325105229.LAPTAH_BPSDMP_TAHUN_2023.pdf

Lampirkan Laptah 2023 dari unit kerja Saudara yang telah diunggah di website kantor atau lampirkan foto laptah yang telah dicetak menjadi buku kemudian ditaruh di ruang PPID unit kerja Saudara. INGAT: LAPTAH yang diminta adalah tahun 2023

4. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan rencana kerja anggaran tahun 2024?

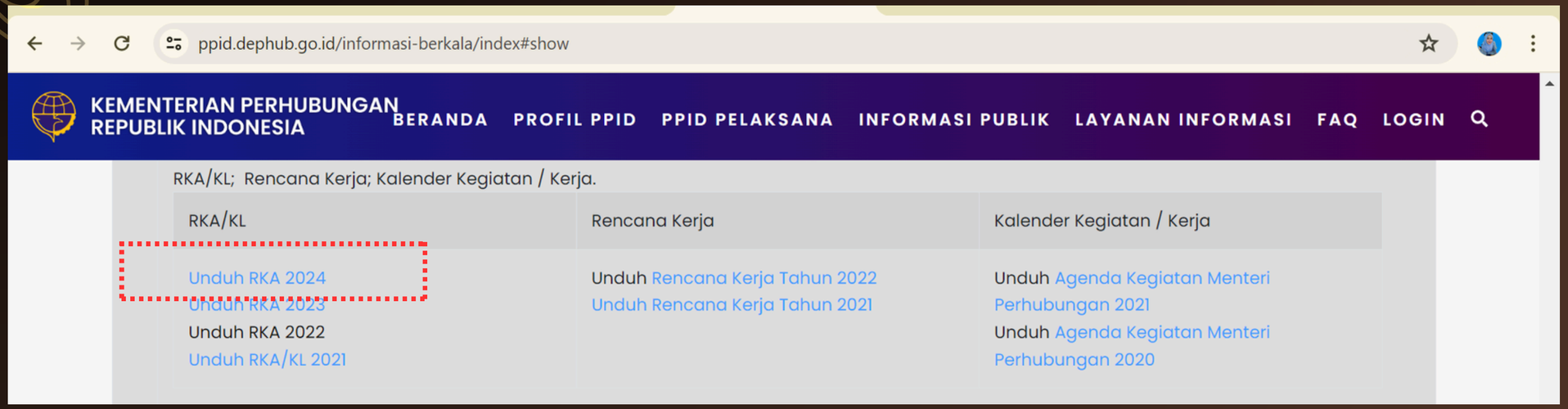

https://ppid.dephub.go.id/informasi-berkala/index#show

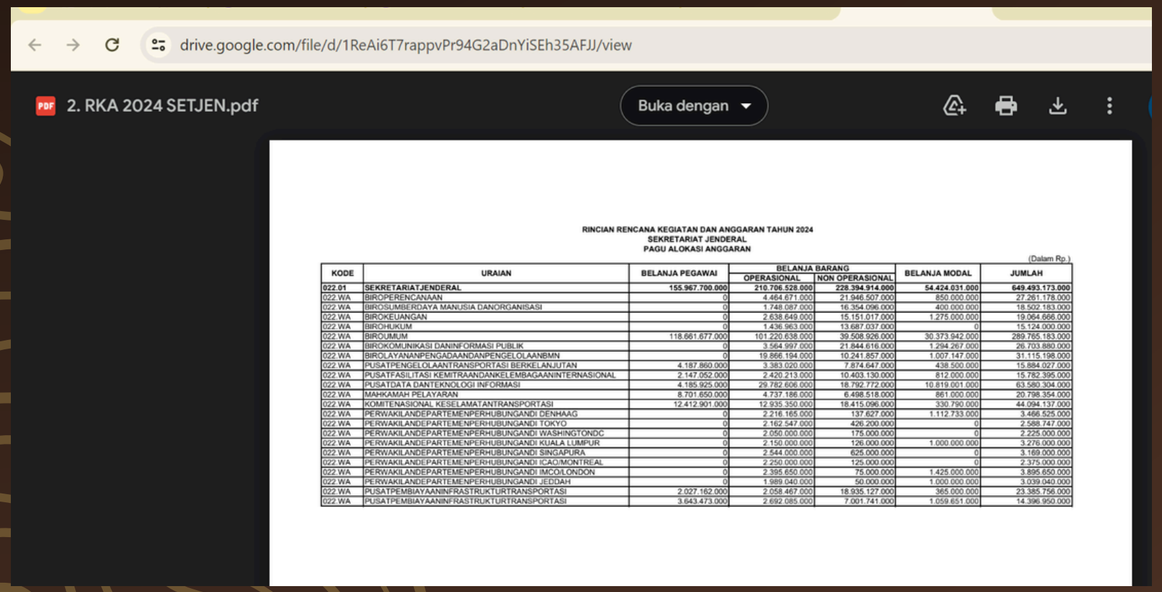

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL
PAGU ALOKASI ANGGARAN

(Dalam Rp.)

KODE	URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG		BELANJA MODAL	JUMLAH
			OPERASIONAL	NON OPERASIONAL		
022.01	SEKRETARIAT JENDERAL	155.967.700.000	210.706.528.000	228.394.914.000	54.424.031.000	649.493.173.000
022.WA	BIROPERENCANAAN	0	4.464.671.000	21.946.507.000	850.000.000	27.261.178.000
022.WA	BIROSUMBERDAYA MANUSIA DANORGANISASI	0	1.748.087.000	16.354.096.000	400.000.000	18.502.183.000
022.WA	BIROKEUANGAN	0	2.638.649.000	15.151.017.000	1.275.000.000	19.064.666.000
022.WA	BIROHUKUM	0	1.436.963.000	13.687.037.000	0	15.124.000.000
022.WA	BIROUMUM	118.661.677.000	101.220.638.000	39.508.926.000	30.373.942.000	289.765.183.000
022.WA	BIROKOMUNIKASI DANINFORMASI PUBLIK	0	3.564.997.000	21.844.616.000	1.294.267.000	26.703.880.000
022.WA	BIROLAYANANPENGADAANDANPENGELOLAANBMN	0	19.866.194.000	10.241.857.000	1.007.147.000	31.115.198.000
022.WA	PUSATPENGELOLAANTRANSPORTASI BERKELANJUTAN	4.187.860.000	3.383.020.000	7.874.647.000	438.500.000	15.884.027.000
022.WA	PUSATFASILITASI KEMITRAANDANKELEMBAGAANINTERNASIONAL	2.147.052.000	2.420.213.000	10.403.130.000	812.000.000	15.782.395.000
022.WA	PUSATDATA DANTEKNOLOGI INFORMASI	4.185.925.000	29.782.606.000	18.792.772.000	10.819.001.000	63.580.304.000
022.WA	MAHKAMAH PELAYARAN	8.701.650.000	4.737.186.000	6.498.518.000	861.000.000	20.798.354.000
022.WA	KOMITENASIONAL KESELAMATANTRANSPORTASI	12.412.901.000	12.935.350.000	18.415.096.000	330.790.000	44.094.137.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI DENHAAG	0	2.216.165.000	137.627.000	1.112.733.000	3.466.525.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI TOKYO	0	2.162.547.000	426.200.000	0	2.588.747.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI WASHINGTONDC	0	2.050.000.000	175.000.000	0	2.225.000.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI KUALA LUMPUR	0	2.150.000.000	126.000.000	1.000.000.000	3.276.000.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI SINGAPURA	0	2.544.000.000	625.000.000	0	3.169.000.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI ICAO,MONTREAL	0	2.250.000.000	125.000.000	0	2.375.000.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI IMCO,LONDON	0	2.395.650.000	75.000.000	1.425.000.000	3.895.650.000
022.WA	PERWAKILANDEPARTEMENPERHUBUNGANDI JEDDAH	0	1.989.040.000	50.000.000	1.000.000.000	3.039.040.000
022.WA	PUSATPEMBIAYAANINFRASTRUKTURTRANSPORTASI	2.027.162.000	2.058.467.000	18.935.127.000	365.000.000	23.385.756.000
022.WA	PUSATPEMBIAYAANINFRASTRUKTURTRANSPORTASI	3.643.473.000	2.692.085.000	7.001.741.000	1.059.651.000	14.396.950.000

RKA Kemenhub bisa diakses melalui website PPID di menu informasi berkala lalu silakan gulirkan ke bawah hingga menemukan tautan RKA, lalu akan diarahkan ke tautan Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1LEslqIBTXJarPjmlB7Kfgi0M5ytSG-qG yang berisikan RKA 2024 Kemenhub yang terhimpun dari seluruh unit eselon 1

Lampirkan RKA Unit Kerja Saudara yang sudah diunggah di website kantor atau foto yang menunjukkan RKA tersebut diletakkan di ruang PPID sehingga mudah diakses publik. Bisa juga lampirkan foto RKA yang dipasang di papan pengumuman di kantor.

5. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat unit kerja? (WBS atau SP4N-LAPOR)

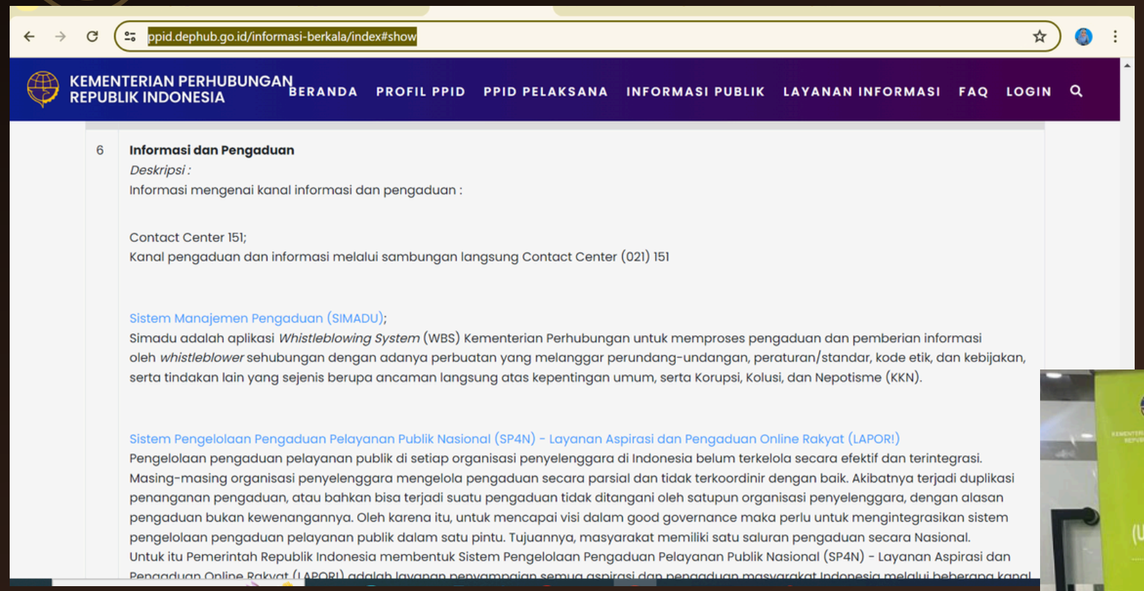

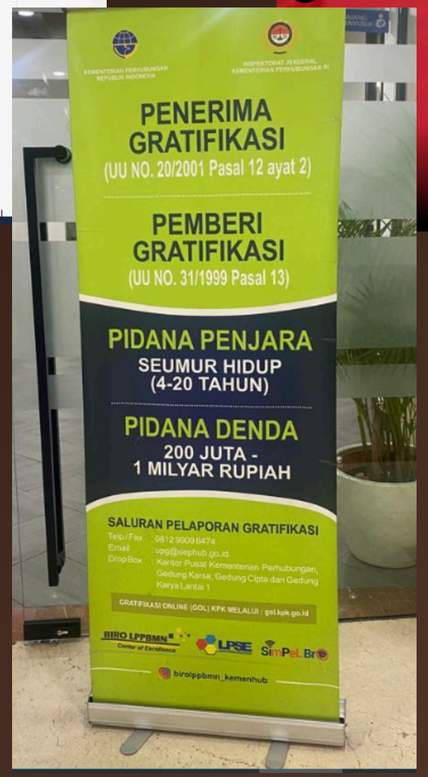

Lampirkan tangkap layar di website kantor yang mengumumkan tata cara pelaporan melalui SP4N-Lapor atau menggunakan Whistle Blower System. Bisa juga melampirkan foto yang menunjukkan tata cara pengaduan sudah ditempel sebagai poster atau dipajang sebagai banner di kantor

7. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh unit kerja tahun 2023 tentang:
a. Kepegawaian
b. Keuangan

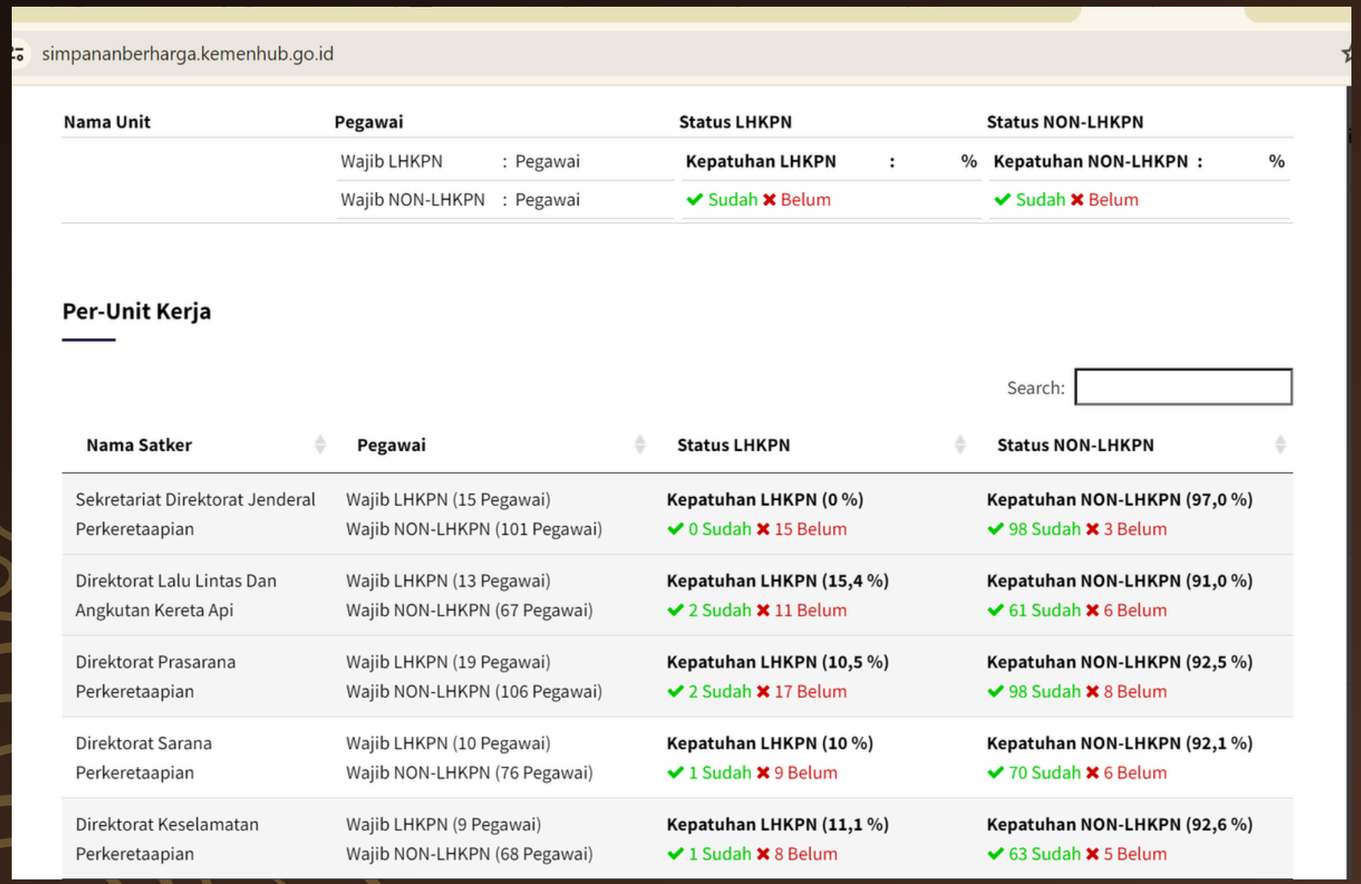

simpananberharga.kemenhub.go.id

Nama Unit	Pegawai	Status LHKPN	Status NON-LHKPN
	Wajib LHKPN : Pegawai	Kepatuhan LHKPN : %	Kepatuhan NON-LHKPN : %
	Wajib NON-LHKPN : Pegawai	✔ Sudah ✘ Belum	✔ Sudah ✘ Belum

Per-Unit Kerja

Search:

Nama Satker	Pegawai	Status LHKPN	Status NON-LHKPN
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Wajib LHKPN (15 Pegawai) Wajib NON-LHKPN (101 Pegawai)	**Kepatuhan LHKPN (0 %)** ✔ 0 Sudah ✘ 15 Belum	**Kepatuhan NON-LHKPN (97,0 %)** ✔ 98 Sudah ✘ 3 Belum
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	Wajib LHKPN (13 Pegawai) Wajib NON-LHKPN (67 Pegawai)	**Kepatuhan LHKPN (15,4 %)** ✔ 2 Sudah ✘ 11 Belum	**Kepatuhan NON-LHKPN (91,0 %)** ✔ 61 Sudah ✘ 6 Belum
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Wajib LHKPN (19 Pegawai) Wajib NON-LHKPN (106 Pegawai)	**Kepatuhan LHKPN (10,5 %)** ✔ 2 Sudah ✘ 17 Belum	**Kepatuhan NON-LHKPN (92,5 %)** ✔ 98 Sudah ✘ 8 Belum
Direktorat Sarana Perkeretaapian	Wajib LHKPN (10 Pegawai) Wajib NON-LHKPN (76 Pegawai)	**Kepatuhan LHKPN (10 %)** ✔ 1 Sudah ✘ 9 Belum	**Kepatuhan NON-LHKPN (92,1 %)** ✔ 70 Sudah ✘ 6 Belum
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Wajib LHKPN (9 Pegawai) Wajib NON-LHKPN (68 Pegawai)	**Kepatuhan LHKPN (11,1 %)** ✔ 1 Sudah ✘ 8 Belum	**Kepatuhan NON-LHKPN (92,6 %)** ✔ 63 Sudah ✘ 5 Belum

Contoh: silakan lampirkan link di website unit kerja Saudara yang mengumumkan tentang kepatuhan LHKASN di unit kerja Saudara, ataupun yang mengumumkan tentang tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai di unit kerja Saudara.

Contoh:
https://simpananberharga.kemenhub.go.id/

8. Apakah unit kerja Saudara menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2022-2023 (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021)

Yang dilampirkan adalah bentuk dokumen, bukan tangkap layar. Lakukan penghitaman/pemburaman apabila terdapat informasi yang dikecualikan. Ingat prinsip, yang dikecualikan adalah informasi, bukan dokumennya

Untuk pemenuhan data dukung, silakan berkoordinasi dengan PPK Unit Kerja.

8.1.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

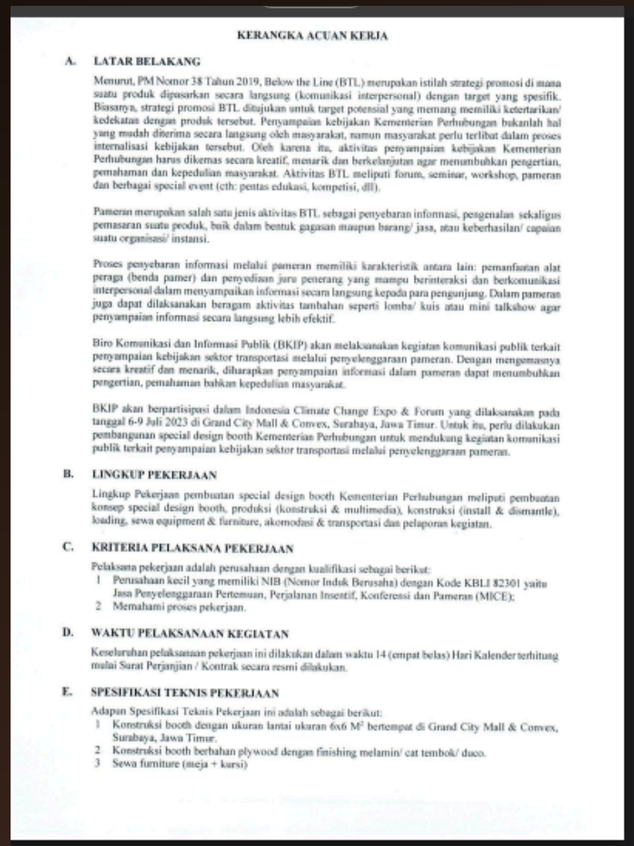

KERANGKA ACUAN KERJA

A. LATAR BELAKANG

Menurut, PM Nomor 38 Tahun 2019, Below the Line (BTL) merupakan istilah strategi promosi di mana suatu produk dipasarkan secara langsung (komunikasi interpersonal) dengan target yang spesifik. Biasanya, strategi promosi BTL ditujukan untuk target potensial yang memang memiliki ketertarikan/ kedekatan dengan produk tersebut. Penyampaian kebijakan Kementerian Perhubungan bukanlah hal yang mudah diterima secara langsung oleh masyarakat, namun masyarakat perlu terlibat dalam proses internalisasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktivitas penyampaian kebijakan Kementerian Perhubungan harus dikemas secara kreatif, menarik dan berkelanjutan agar menumbuhkan pengertian, pemahaman dan kepedulian masyarakat. Aktivitas BTL meliputi forum, seminar, workshop, pameran dan berbagai special event (cth: pentas edukasi, kompetisi, dll).

Pameran merupakan salah satu jenis aktivitas BTL sebagai penyebaran informasi, pengenalan sekaligus pemasaran suatu produk, baik dalam bentuk gagasan maupun barang/ jasa, atau keberhasilan/ capaian suatu organisasi/ instansi.

Proses penyebaran informasi melalui pameran memiliki karakteristik antara lain: pemanfaatan alat peraga (benda pamer) dan penyediaan juru penerang yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi interpersonal dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada para pengunjung. Dalam pameran juga dapat dilaksanakan beragam aktivitas tambahan seperti lomba/ kuis atau mini talkshow agar penyampaian informasi secara langsung lebih efektif.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) akan melaksanakan kegiatan komunikasi publik terkait penyampaian kebijakan sektor transportasi melalui penyelenggaraan pameran. Dengan mengemasnya secara kreatif dan menarik, diharapkan penyampaian informasi dalam pameran dapat menumbuhkan pengertian, pemahaman bahkan kepedulian masyarakat.

BKIP akan berpartisipasi dalam Indonesia Climate Change Expo & Forum yang dilaksanakan pada tanggal 6-9 Juli 2023 di Grand City Mall & Convex, Surabaya, Jawa Timur. Untuk itu, perlu dilakukan pembangunan special design booth Kementerian Perhubungan untuk mendukung kegiatan komunikasi publik terkait penyampaian kebijakan sektor transportasi melalui penyelenggaraan pameran.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan pembuatan special design booth Kementerian Perhubungan meliputi pembuatan konsep special design booth, produksi (konstruksi & multimedia), konstruksi (install & dismantle), loading, sewa equipment & furniture, akomodasi & transportasi dan pelaporan kegiatan.

C. KRITERIA PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksana pekerjaan adalah perusahaan dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan kecil yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan Kode KBLI 82301 yaitu Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
2. Memahami proses pekerjaan.

D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Keseluruhan pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung mulai Surat Perjanjian / Kontrak secara resmi dilakukan.

E. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Adapun Spesifikasi Teknis Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi booth dengan ukuran lantai ukuran 6x6 M^2 bertempat di Grand City Mall & Convex, Surabaya, Jawa Timur.
2. Konstruksi booth berbahan plywood dengan finishing melamin/ cat tembok/ duco.
3. Sewa furniture (meja + kursi)

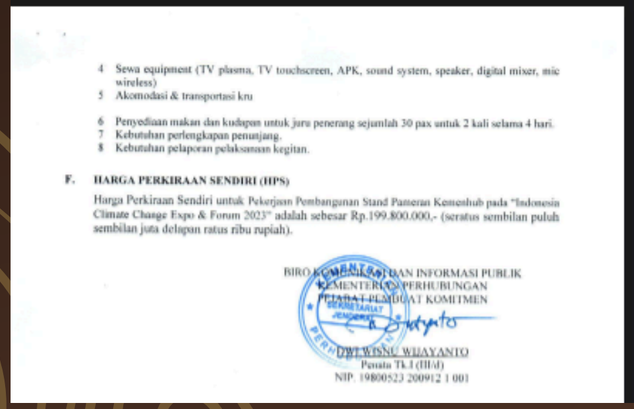

4. Sewa equipment (TV plasma, TV touchscreen, APK, sound system, speaker, digital mixer, mic wireless)
5. Akomodasi & transportasi kru
6. Penyediaan makan dan kudapan untuk juru penerang sejumlah 30 pax untuk 2 kali selama 4 hari.
7. Kebutuhan perlengkapan penunjang.
8. Kebutuhan pelaporan pelaksanaan kegitan.

F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri untuk Pekerjaan Pembangunan Stand Pameran Kemenhub pada "Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023" adalah sebesar Rp.199.800.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PENGAT PEMBUAT KOMITMEN

DWI WISNU WIJAYANTO
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800523 200912 1 001

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan Kerangka Acuan Kerja dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh KAK:

https://drive.google.com/file/d/1aAjDekkuxPSs1j2Lagxq2qfSbUflwbKC/view

8.1 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS

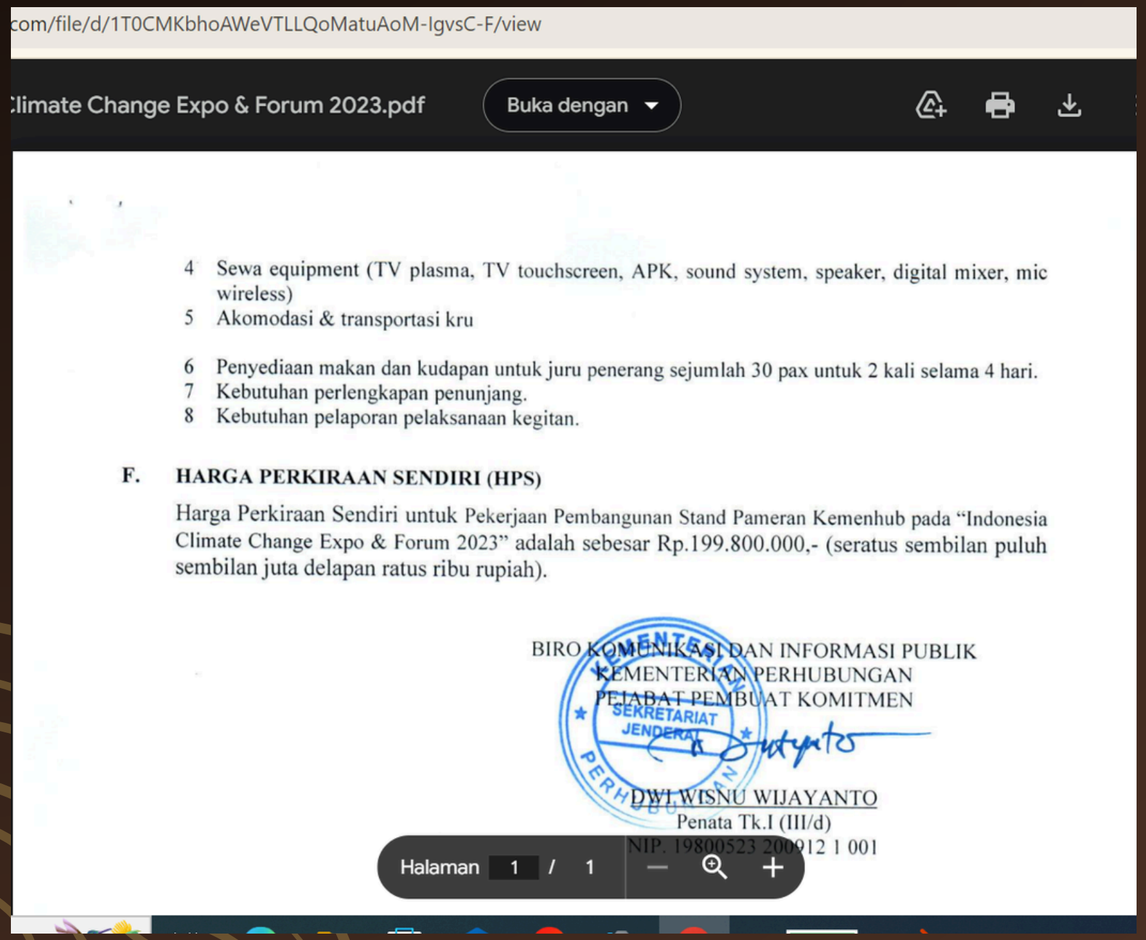

com/file/d/1T0CMKbhoAWeVTLLQoMatuAoM-IgvsC-F/view

Climate Change Expo & Forum 2023.pdf Buka dengan

4 Sewa equipment (TV plasma, TV touchscreen, APK, sound system, speaker, digital mixer, mic wireless)
5 Akomodasi & transportasi kru

6 Penyediaan makan dan kudapan untuk juru penerang sejumlah 30 pax untuk 2 kali selama 4 hari.
7 Kebutuhan perlengkapan penunjang.
8 Kebutuhan pelaporan pelaksanaan kegitan.

F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri untuk Pekerjaan Pembangunan Stand Pameran Kemenhub pada "Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023" adalah sebesar Rp.199.800.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SEKRETARIAT JENDERAL

DWI WISNU WIJAYANTO
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800523 200912 1 001

Halaman 1 / 1

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan HPS dan riwayat HPS dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh HPS:

https://drive.google.com/file/d/1T0CMKbhoAWeVTLLQoMatuAoM-IgvsC-F/view

8.1 3. Spesifikasi Teknis

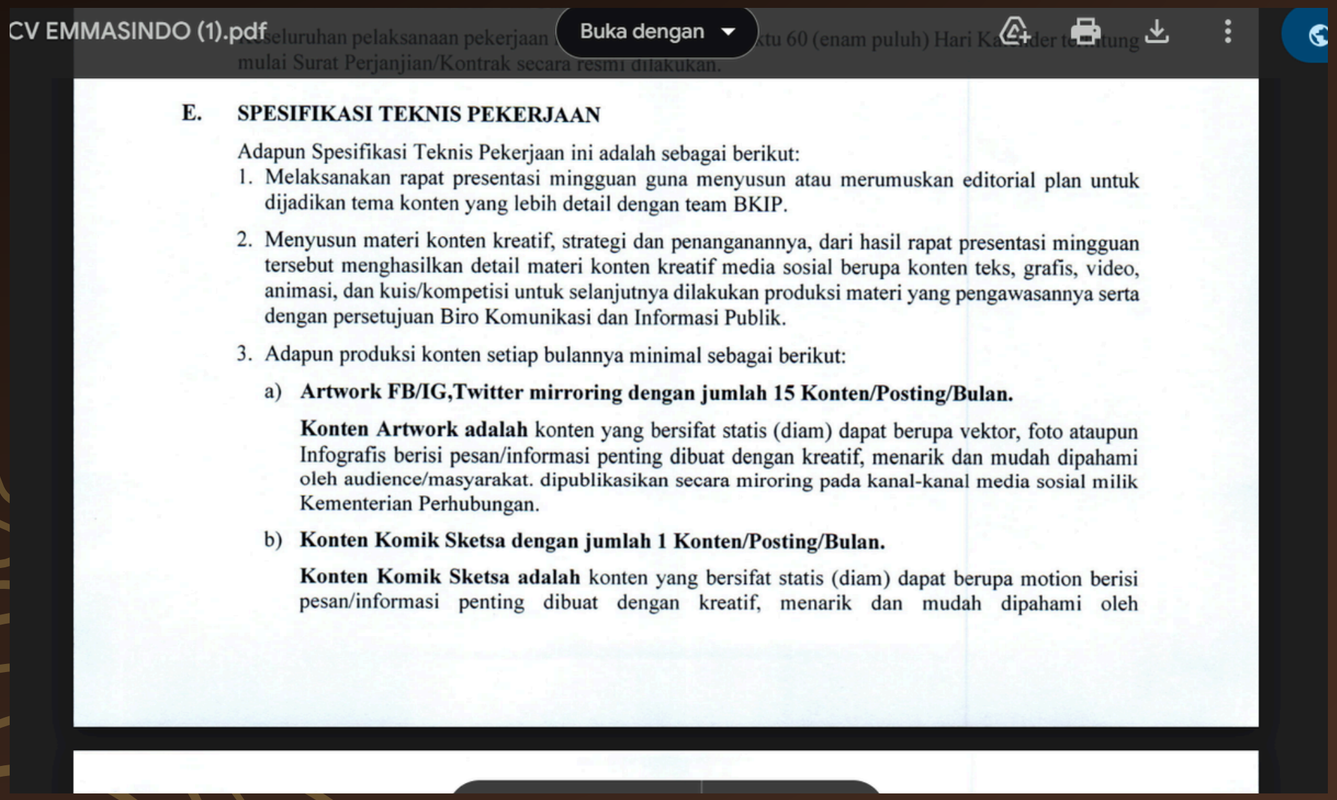

CV EMMASINDO (1).pdf Buka dengan

mulai Surat Perjanjian/Kontrak secara resmi dilakukan.

E. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Adapun Spesifikasi Teknis Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat presentasi mingguan guna menyusun atau merumuskan editorial plan untuk dijadikan tema konten yang lebih detail dengan team BKIP.
2. Menyusun materi konten kreatif, strategi dan penanganannya, dari hasil rapat presentasi mingguan tersebut menghasilkan detail materi konten kreatif media sosial berupa konten teks, grafis, video, animasi, dan kuis/kompetisi untuk selanjutnya dilakukan produksi materi yang pengawasannya serta dengan persetujuan Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
3. Adapun produksi konten setiap bulannya minimal sebagai berikut:
   a) **Artwork FB/IG,Twitter mirroring dengan jumlah 15 Konten/Posting/Bulan.**

      Konten Artwork adalah konten yang bersifat statis (diam) dapat berupa vektor, foto ataupun Infografis berisi pesan/informasi penting dibuat dengan kreatif, menarik dan mudah dipahami oleh audience/masyarakat. dipublikasikan secara miroring pada kanal-kanal media sosial milik Kementerian Perhubungan.

   b) **Konten Komik Sketsa dengan jumlah 1 Konten/Posting/Bulan.**

      Konten Komik Sketsa adalah konten yang bersifat statis (diam) dapat berupa motion berisi pesan/informasi penting dibuat dengan kreatif, menarik dan mudah dipahami oleh

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan spesifikasi teknis dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh Spektek:

https://drive.google.com/file/d/1jkTrUfzeWoE80CnQIVWeKeH8o69wOQ2S/view

8.1 4. Rancangan Kontrak

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 21/RPL/BKIP-PPK/VI/2023

Yth. : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Hal : Rencana Pengadaan Langsung Pekerjaan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Transportasi melalui Kegiatan Below The Line "Pentas Edukasi Transportasi".

Tanggal : 5 Juni 2023

Bersama ini di sampaikan rencana pengadaan langsung pekerjaan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Transportasi melalui Kegiatan Below The Line "Pentas Edukasi Transportasi" di sub bagian Edukasi Publik pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mekanisme pelaksanaan pemilihan penyedia di laksanakan melalui pengadaan langsung Jasa Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimohon untuk dapat memproses pelaksanaan pengadaan langsung kegiatan dimaksud, terlampir di sampaikan:

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
c. Draft Rancang Surat Perintah Kerja (SPK).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Dr. Ir. Wisnu Wijayanto
NIP. 19800523 200912 1 001

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan rancangan kontrak dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh rancangan kontrak:

https://drive.google.com/file/d/1CkzRSSWh4dixNy2sQr0qkg3UfSo_pn3R/view

8.1 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi

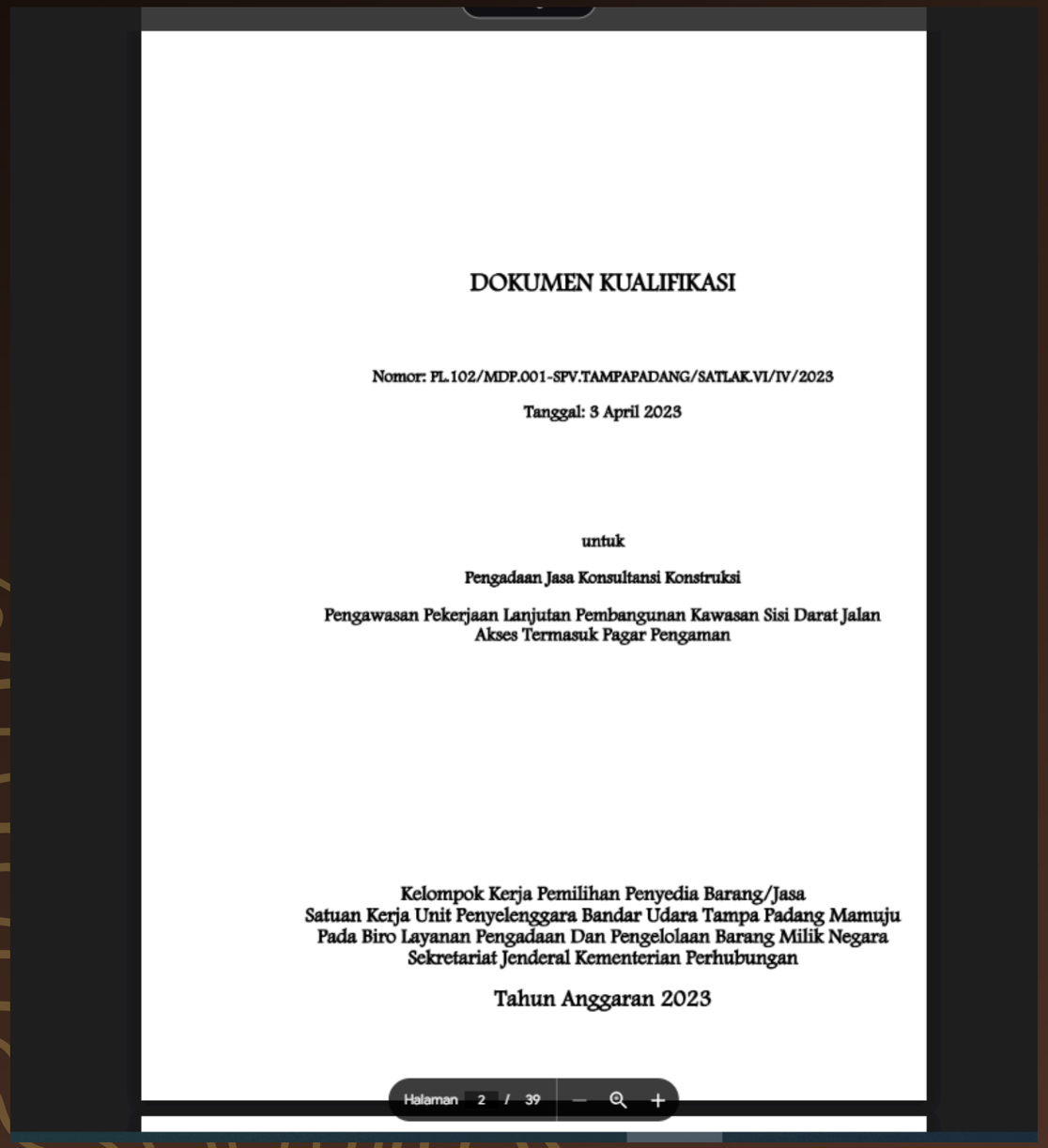

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: PL.102/MDP.001-SPV.TAMPAPADANG/SATLAK.VI/IV/2023

Tanggal: 3 April 2023

untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kawasan Sisi Darat Jalan Akses Termasuk Pagar Pengaman

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Satuan Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang Mamuju
Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Tahun Anggaran 2023

Halaman 2 / 39

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1ujPT0eIk-O-mz3N88XnWtlu3emcqZ4Ge/view

8.1 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan

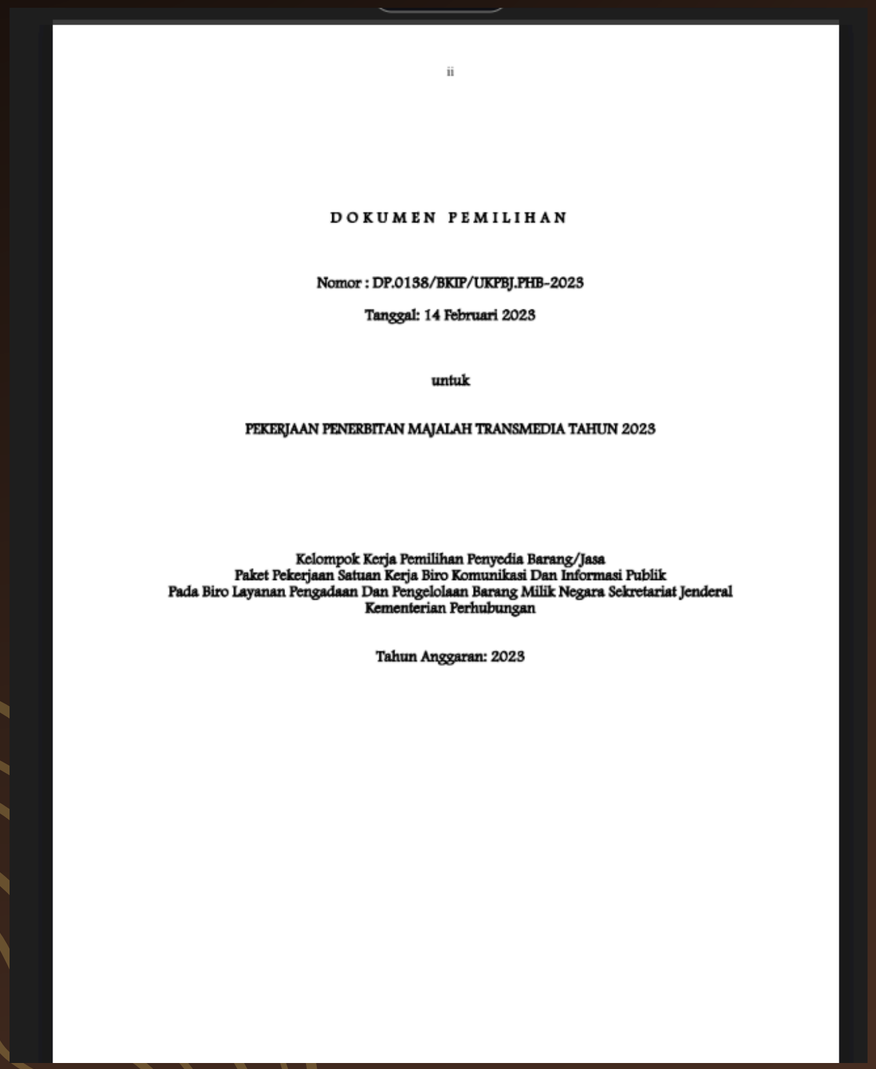

ii

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : DP.0138/BKIP/UKPBJ.PHB-2023

Tanggal: 14 Februari 2023

untuk

PEKERJAAN PENERBITAN MAJALAH TRANSMEDIA TAHUN 2023

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Satuan Kerja Biro Komunikasi Dan Informasi Publik
Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Tahun Anggaran: 2023

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1kjXBq8YLN3H_bAkKVujMoERf1isOnwkw/view

8.1 7. Daftar Kuantitas dan Harga

Buka dengan

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kode Tender 90800114
Nama Paket Pekerjaan Penerbitan Majalah Transmedia Tahun 2023

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Total
BIAYA PERSONIL				
a. Manajer Proyek	Oter	4		
b. Editor Penulisan	Oter	4		
c. Editor Foto	Oter	4		
d. Reporter	Oter	8		
e. Fotografer	Oter	8		
f. Desainer Grafis	Oter	4		
g. Ilustrator	Oter	4		
h. Sekretariat \/ Administrasi Umum	Oter	4		
i. Videographer	Oter	4		
j. Video Editor	Oter	4		
k. Distributor Officer	Oter	4		
l. Printing Supervisor	Oter	4		
m. Digital Video Motion Graphic	Oter	4		
n. Copywriter Media Sosial	OB	9		
o. Desainer grafis Media Sosial	OB	9		
p. Admin dan Report Media Sosial	OB	9		
q. Web Content Manager	OB	9		
BIAYA PENCETAKAN MAJALAH TRANSMEDIA	EKS	1000		
spesifikasi teknis - isi uk. A4 matte paper 150 gr (tertutup) - cover uk. A4 art carton 230 gr (tertutup) - jumlah halaman cover 4 halaman, cetak 4\/4 - jumlah halaman isi 60 halaman, cetak 4\/4 - finishing (lem panas,laminating doff + spot UV wrapping)				
BIAYA DISTRIBUSI DAN PENGEMASAN				
- Jasa Pengiriman	EKS	1000		
- Labelling	EKS	1000		
- Reporting	ED	4		
BIAYA HONOR KONTRIBUTOR				
- Kontributor Opini Ahli	KL	8		
BIAYA PENGELOLAAN WEBSITE				
- Pengelolaan Website	LS	4		
BIAYA BELANJA BAHAN				
- Giveaway Media Sosial	PKT	4		
- Souvenir Narasumber Liputan	PKT	40		
- Pembelian Data Sekunder dan Foto	LS	4		

Halaman 1 / 2

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/169cWC5R5fJzg5hjN_ELIbZfHgYruCou1/view

8.1 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan

PkbxujMXZ2xPoLb8c/view

4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 14 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Juni 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

Jakarta, 7 Juni 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

Dwi Wisnu Wiryanto
NIP. 198005252000912 1 001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. ADI MULYA INDONESIA

Anwito Mulya Adisasmita
Direktur Utama

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

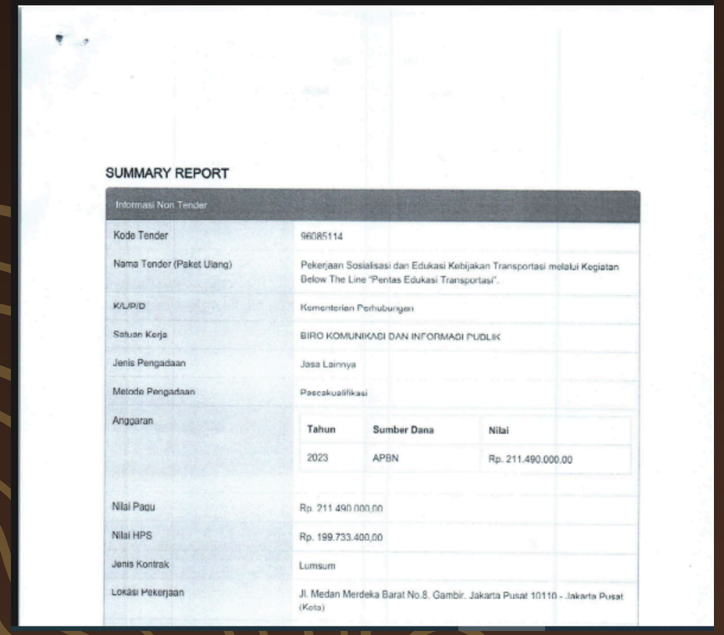

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender	
Kode Tender	99085114
Nama Tender (Paket Ulang)	Pekerjaan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Transportasi melalui Kegiatan Below The Line "Pentas Edukasi Transportasi".
K/L/P/D	Kementerian Perhubungan
Satuan Kerja	BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi
Anggaran	Tahun: 2023; Sumber Dana: APBN; Nilai: Rp. 211.490.000,00
Nilai Pagu	Rp. 211.490.000,00
Nilai HPS	Rp. 199.733.400,00
Jenis Kontrak	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Gambir, Jakarta Pusat 10110 - Jakarta Pusat (Kota)

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1WkBHdUGji3tOd2uPkbxujMXZ2xPoLb8c/view

8.1 9. Gambar Rancangan Pekerjaan

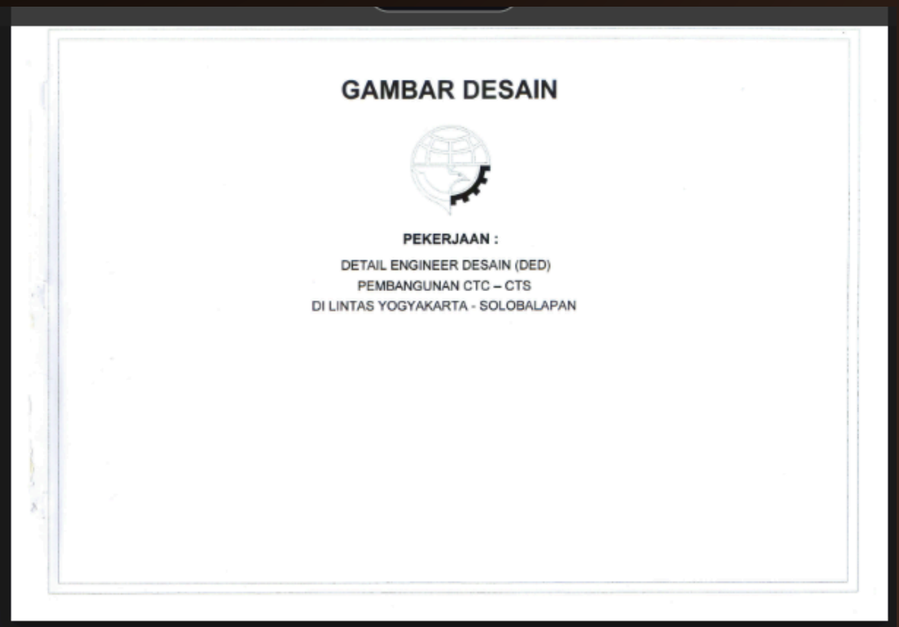

GAMBAR DESAIN

PEKERJAAN :

DETAIL ENGINEER DESAIN (DED)
PEMBANGUNAN CTC – CTS
DI LINTAS YOGYAKARTA - SOLOBALAPAN

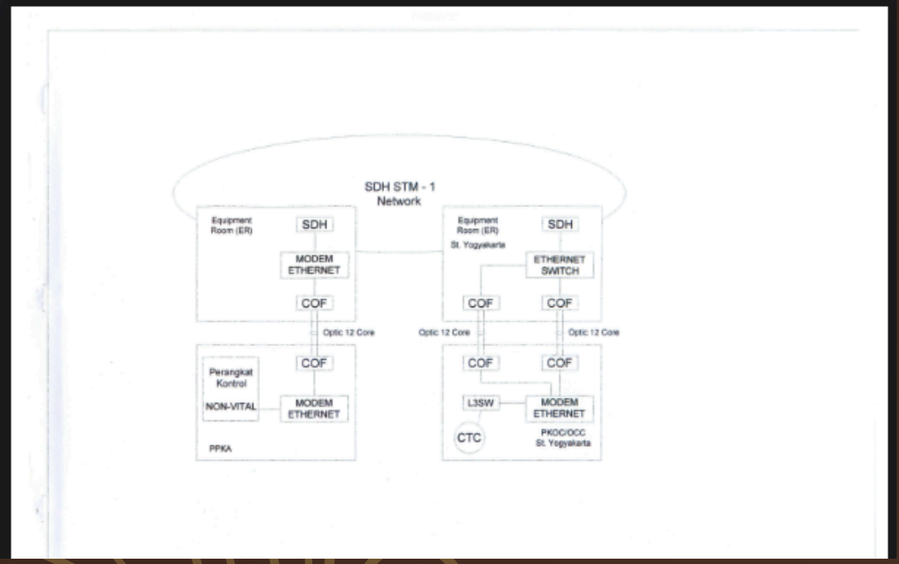

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1avSGm_L-W9ZRu9lDZlY2Y_1baUUXPYBO/view

8.1 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

hbnSkjCLmAwRmetJOof/view

Buka dengan

PT BATUTA CHEMICAL INDUSTRIAL PARK
Bakrie Tower Lantai 6th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR. Rasuna Sad
Jakarta 12940 – Indonesia. Telp. 021 – 56100300, 56100700. Fax. 021-29912307

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKL-RPL)

RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI KIMIA
PT BATUTA CHEMICAL INDUSTRIAL PARK

Keputusan Bupati Kutai Timur No. 647/K-789/HK/XII/2011
Tanggal 28 Desember 2011
Luas Area : 943,8 Ha

Lokasi Kegiatan :
Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

SANGATTA
2023

Halaman 1 / 166

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1uGmc2gBD3DSWsmbnSkjCLmAwRmetJOof/view

8.1 11. Dokumen Penawaran Administratif

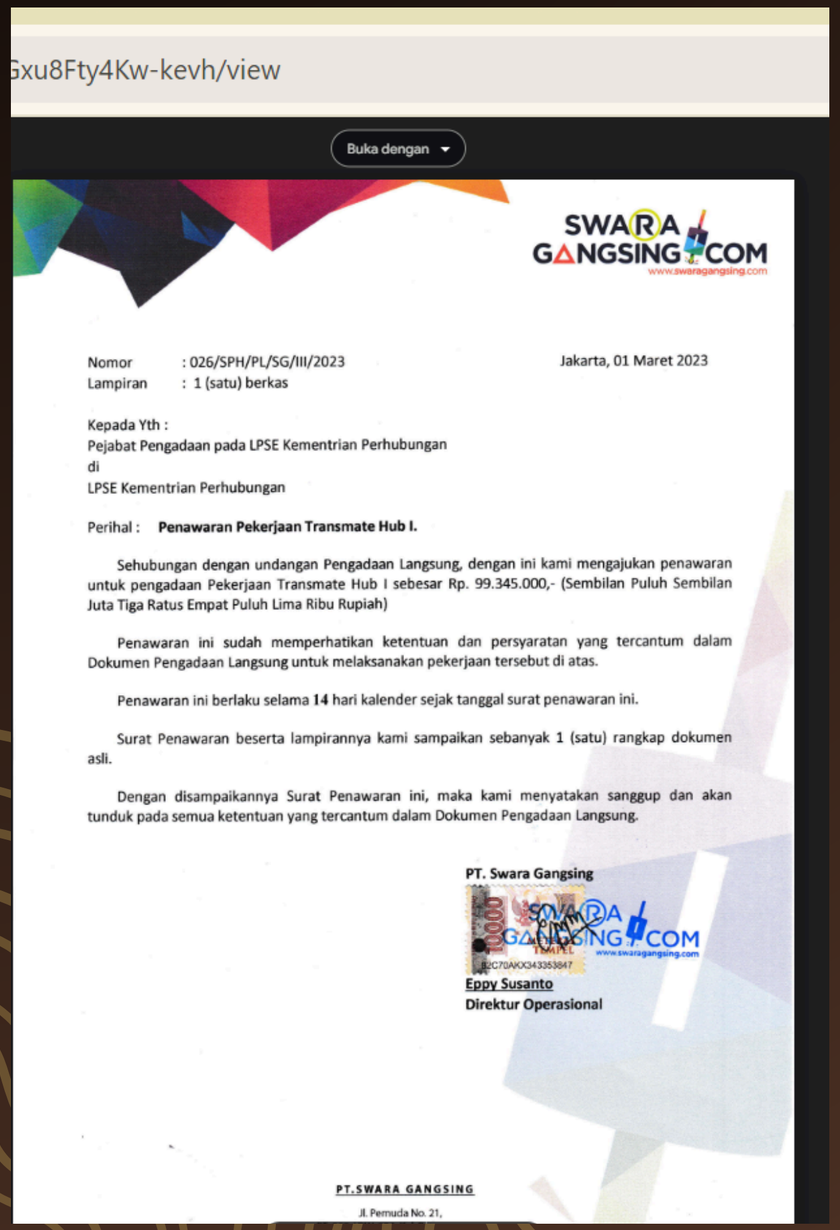

Gxu8Fty4Kw-kevh/view

Buka dengan

SWARA GANGSING.COM
www.swaragangsing.com

Nomor : 026/SPH/PL/SG/III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 01 Maret 2023

Kepada Yth :
Pejabat Pengadaan pada LPSE Kementrian Perhubungan
di
LPSE Kementrian Perhubungan

Perihal : **Penawaran Pekerjaan Transmate Hub I.**

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Pekerjaan Transmate Hub I sebesar Rp. 99.345.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 14 hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. Swara Gangsing

Eppy Susanto
Direktur Operasional

PT.SWARA GANGSING
Jl. Pemuda No. 21,

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1mhzoj7gIIzg7-4T3VGxu8Fty4Kw-kevh/view

8.1 12. Surat Penawaran Penyedia

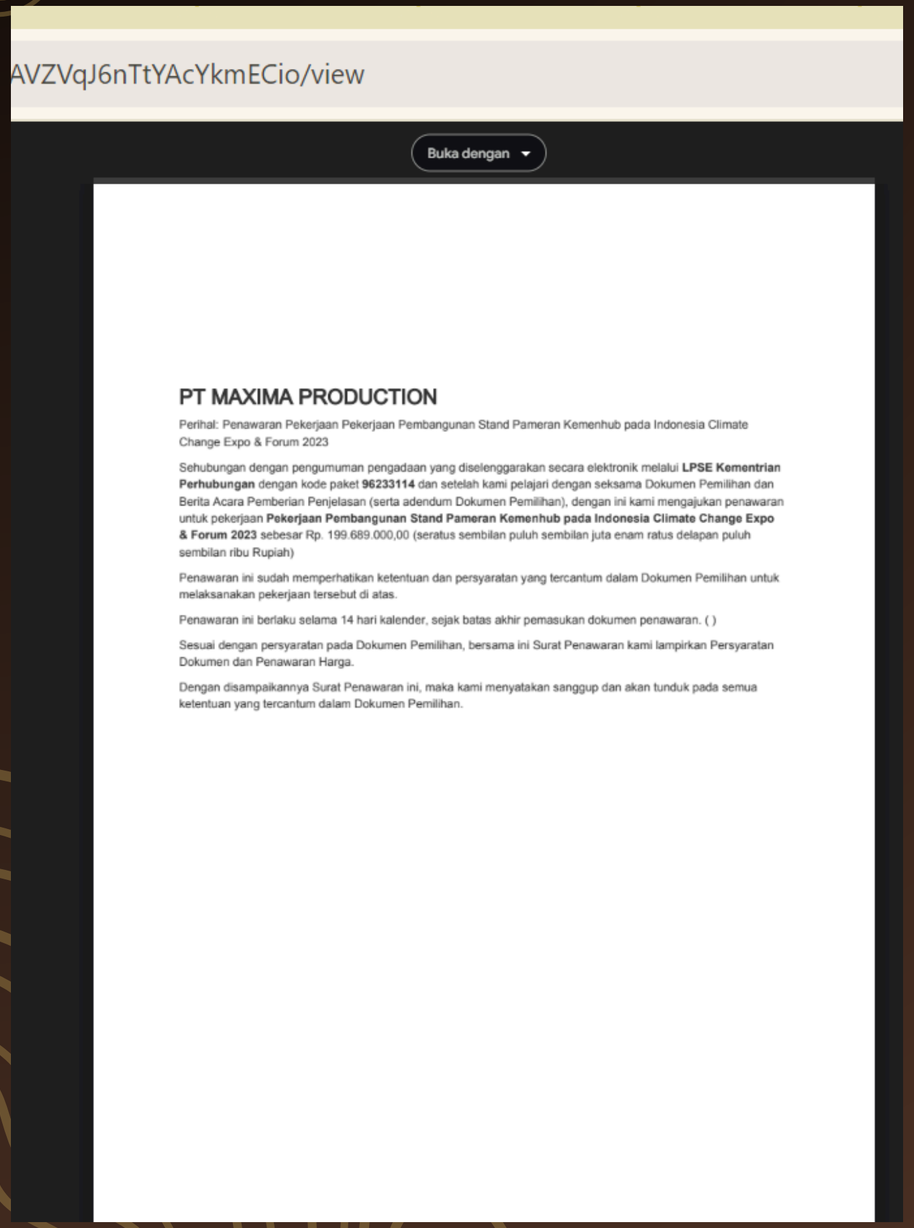

AVZVqJ6nTtYAcYkmECio/view

Buka dengan

PT MAXIMA PRODUCTION

Perihal: Penawaran Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Stand Pameran Kemenhub pada Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kementrian Perhubungan** dengan kode paket **96233114** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pekerjaan Pembangunan Stand Pameran Kemenhub pada Indonesia Climate Change Expo & Forum 2023** sebesar Rp. 199.689.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 14 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ( )

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1avfbScEJcxLOAVZVqJ6nTtYAcYkmECio/view

8.1 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202127402, 10 Juni 2021
Pencipta		
Nama	:	**Listantari, Yessi Gusleni, dan Joewono Soemardjito**
Alamat	:	Komplek Perhub B No. 11, Rawasari, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, 10570
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**
Alamat	:	Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, 10110
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Keterpaduan Pelayanan Transportasi Antarmoda Di Kota Palembang**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	30 Desember 2020, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	:	000253663

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1udB4COtxmTTxW2xNM0utzA2In8bXvEnh/view

8.1 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan

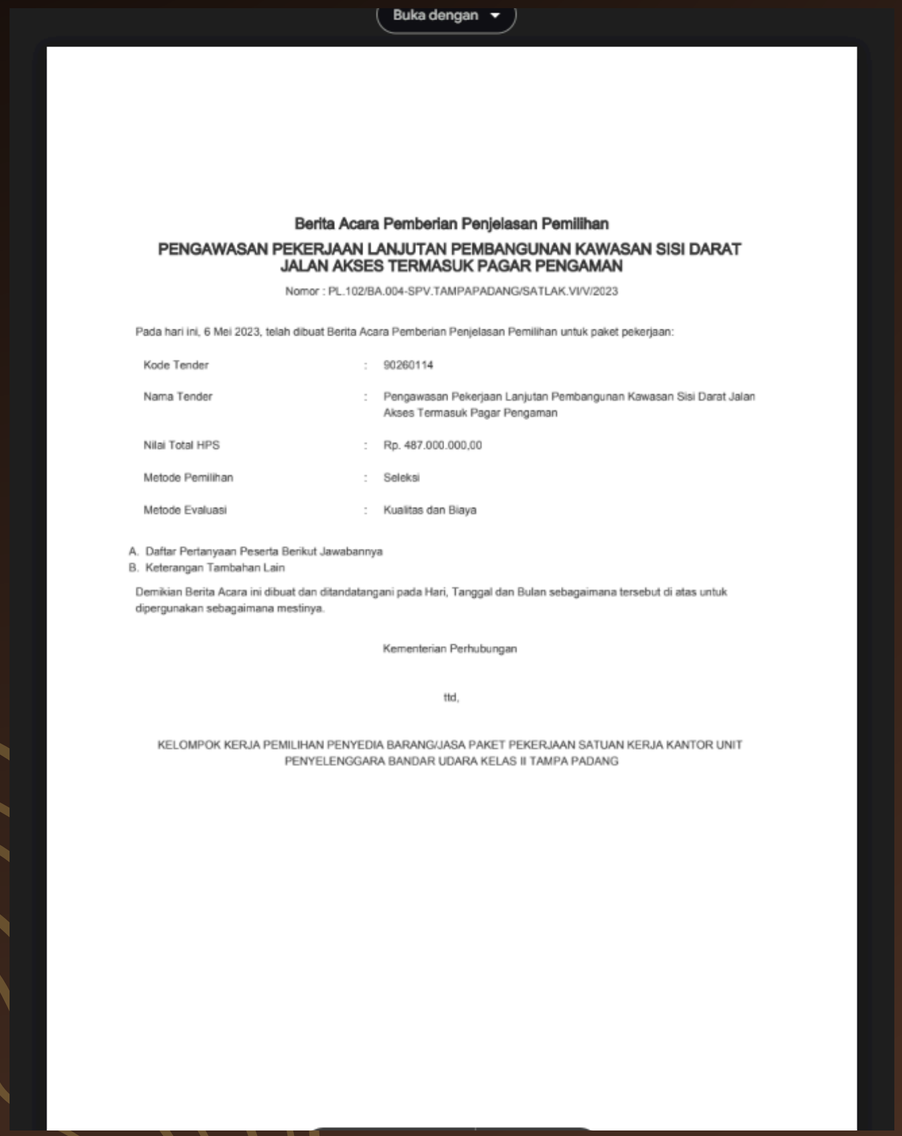

Buka dengan

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan

PENGAWASAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN SISI DARAT JALAN AKSES TERMASUK PAGAR PENGAMAN

Nomor : PL.102/BA.004-SPV.TAMPAPADANG/SATLAK.VI/V/2023

Pada hari ini, 6 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	90260114
Nama Tender	:	Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kawasan Sisi Darat Jalan Akses Termasuk Pagar Pengaman
Nilai Total HPS	:	Rp. 487.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya
B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Perhubungan

ttd,

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TAMPA PADANG

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1YD6ldbVoXaM_Qd08MRimeA8bg23ArULm/view

8.1 15 Berita Acara Pengumuman Negosiasi

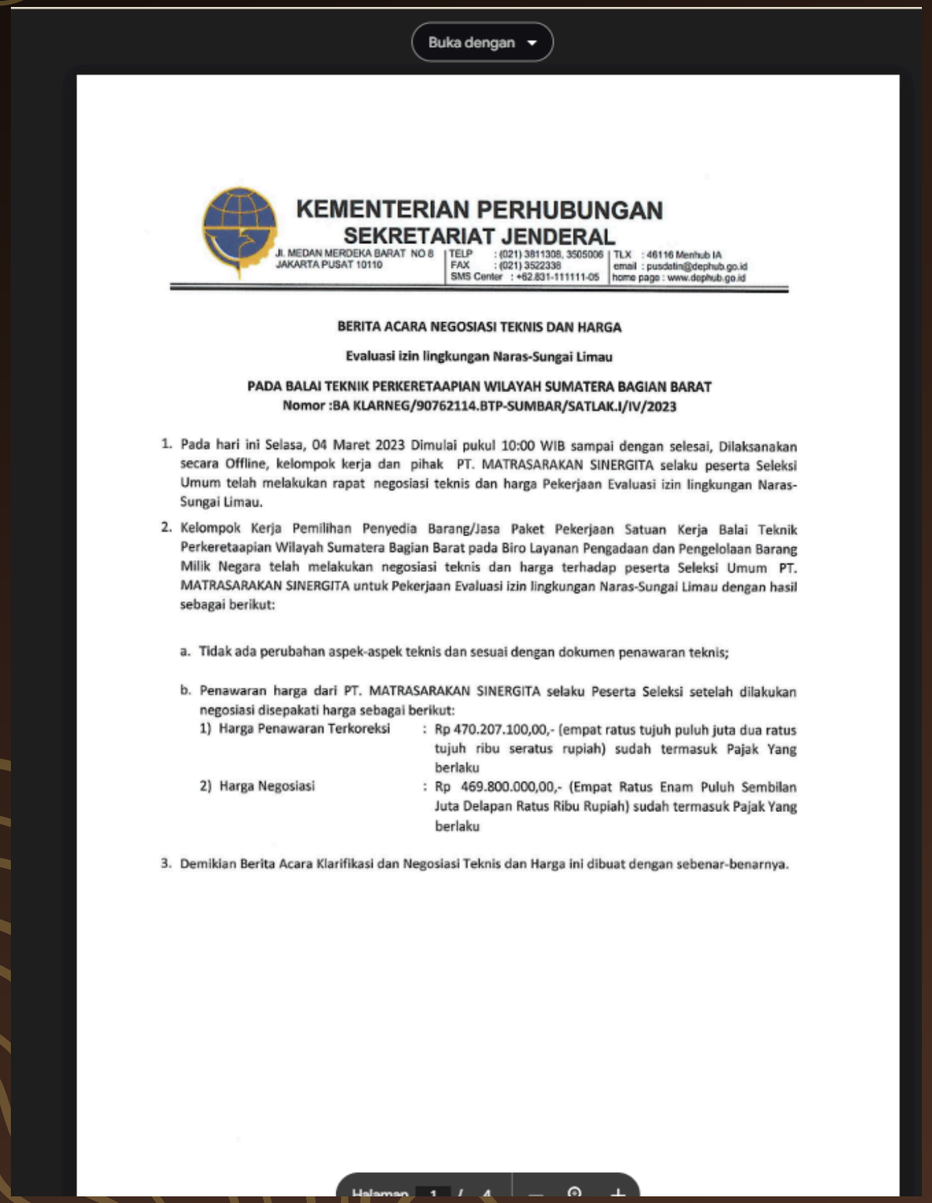

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62.831-111111-05

TLX : 46116 Merhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Evaluasi izin lingkungan Naras-Sungai Limau

PADA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
Nomor :BA KLARNEG/90762114.BTP-SUMBAR/SATLAK.I/IV/2023

1. Pada hari ini Selasa, 04 Maret 2023 Dimulai pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai, Dilaksanakan secara Offline, kelompok kerja dan pihak PT. MATRASARAKAN SINERGITA selaku peserta Seleksi Umum telah melakukan rapat negosiasi teknis dan harga Pekerjaan Evaluasi izin lingkungan Naras-Sungai Limau.
2. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara telah melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap peserta Seleksi Umum PT. MATRASARAKAN SINERGITA untuk Pekerjaan Evaluasi izin lingkungan Naras-Sungai Limau dengan hasil sebagai berikut:

   a. Tidak ada perubahan aspek-aspek teknis dan sesuai dengan dokumen penawaran teknis;

   b. Penawaran harga dari PT. MATRASARAKAN SINERGITA selaku Peserta Seleksi setelah dilakukan negosiasi disepakati harga sebagai berikut:
      1) Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 470.207.100,00,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus rupiah) sudah termasuk Pajak Yang berlaku
      2) Harga Negosiasi : Rp 469.800.000,00,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Yang berlaku
3. Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Halaman 1 / 4

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1JaJ7HbhuVhWHAXcUzl-G4zXYXCbs1gRP/view

8.1 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding

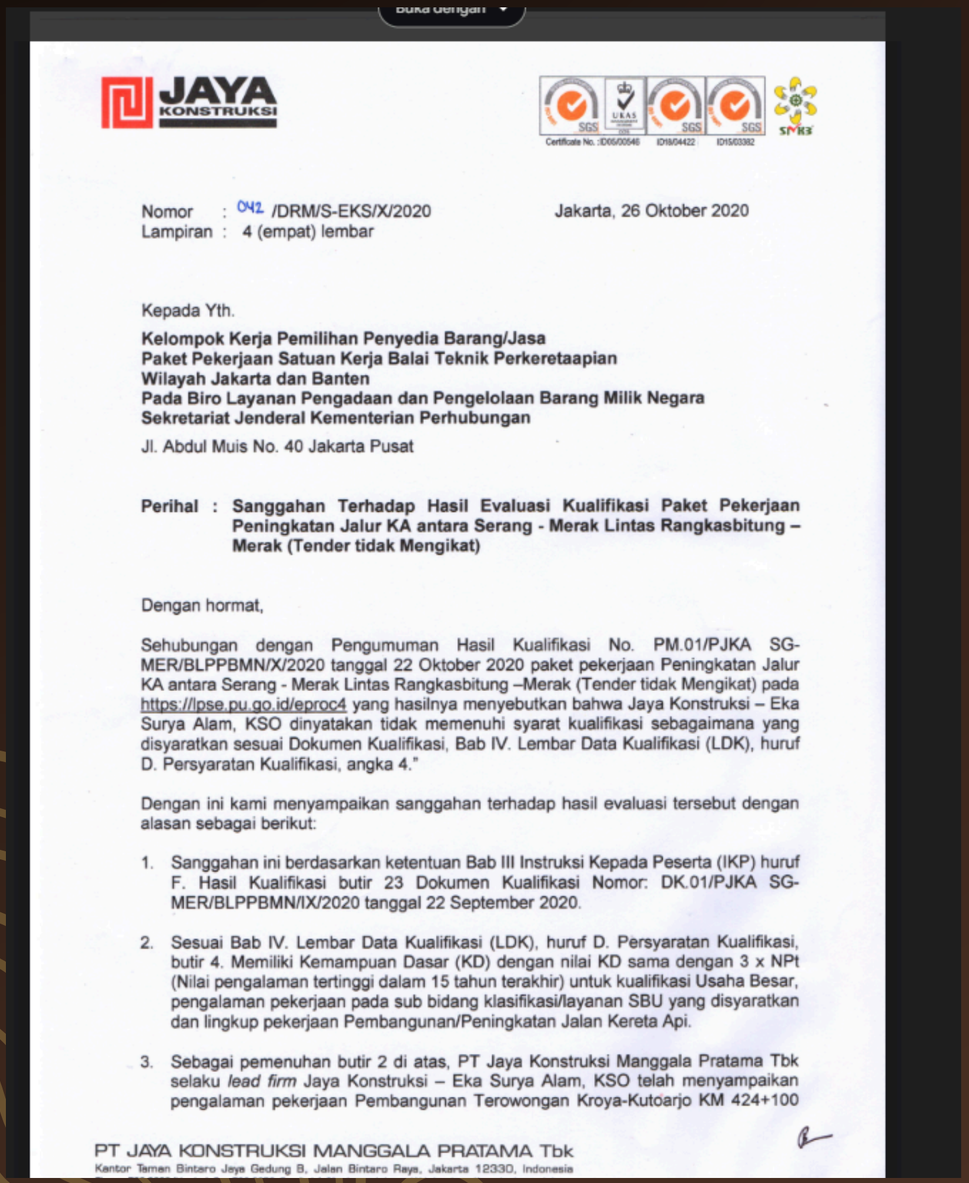

JAYA KONSTRUKSI

Nomor : 042 /DRM/S-EKS/X/2020 Jakarta, 26 Oktober 2020
Lampiran : 4 (empat) lembar

Kepada Yth.

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian
Wilayah Jakarta dan Banten
Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat

Perihal : Sanggahan Terhadap Hasil Evaluasi Kualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung – Merak (Tender tidak Mengikat)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman Hasil Kualifikasi No. PM.01/PJKA SG-MER/BLPPBMN/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 paket pekerjaan Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung –Merak (Tender tidak Mengikat) pada https://lpse.pu.go.id/eproc4 yang hasilnya menyebutkan bahwa Jaya Konstruksi – Eka Surya Alam, KSO dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan sesuai Dokumen Kualifikasi, Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK), huruf D. Persyaratan Kualifikasi, angka 4."

Dengan ini kami menyampaikan sanggahan terhadap hasil evaluasi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Sanggahan ini berdasarkan ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F. Hasil Kualifikasi butir 23 Dokumen Kualifikasi Nomor: DK.01/PJKA SG-MER/BLPPBMN/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
2. Sesuai Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK), huruf D. Persyaratan Kualifikasi, butir 4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kereta Api.
3. Sebagai pemenuhan butir 2 di atas, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk selaku *lead firm* Jaya Konstruksi – Eka Surya Alam, KSO telah menyampaikan pengalaman pekerjaan Pembangunan Terowongan Kroya-Kutoarjo KM 424+100

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk
Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330, Indonesia

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1lRA1fe44pROHGG2mjYuSSmfDVE85MZWN/view

8.1 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia

qkcQZM0-W_QaJ9DnS_/view

Buka dengan

Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGAWASAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN SISI DARAT JALAN AKSES TERMASUK PAGAR PENGAMAN

Nomor : PL.102/BA.007-SPV.TAMPAPADANG/SATLAK.VI/V/2023

Pada hari ini, 6 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	90260114
Nama Tender	:	Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kawasan Sisi Darat Jalan Akses Termasuk Pagar Pengaman
Nilai Total HPS	:	Rp. 487.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 15 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. INOVASI KONSULINDO RAYA
2	PT. ARTA GRAHA CIPTA
3	PT. GEOMETRIK REKAYASA PRATAMA
4	PT. MADINAH ARAMAS CONSULT OETAMA
5	PT.NIPLEZ JUSERO PERSADA
6	CV. FAYA KUNTURA SENTOSA
7	CV FASADE NUSANTARA
8	PT.KINGSTOM TEKNITAMA KONSULTAN
9	CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN
10	PT. MIFTAH MULTI DESIGN
11	CV. RAMAYANA RANCANG BANGUN
12	CV.AMANAH JAYA GEMILANG
13	CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN
14	PT. DUTA CIPTA CONSULTINDO
15	CV. HOMAZ

2. Dari 15 Peserta yang mendaftar terdapat 6 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. INOVASI KONSULINDO RAYA
2	CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN

1

Halaman 1 / 4

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1J0VIMZr5S3E_2DqkcQZM0-W_QaJ9DnS_/view

8.1 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

WnaJ3I037C5u8gVYmhFV/view

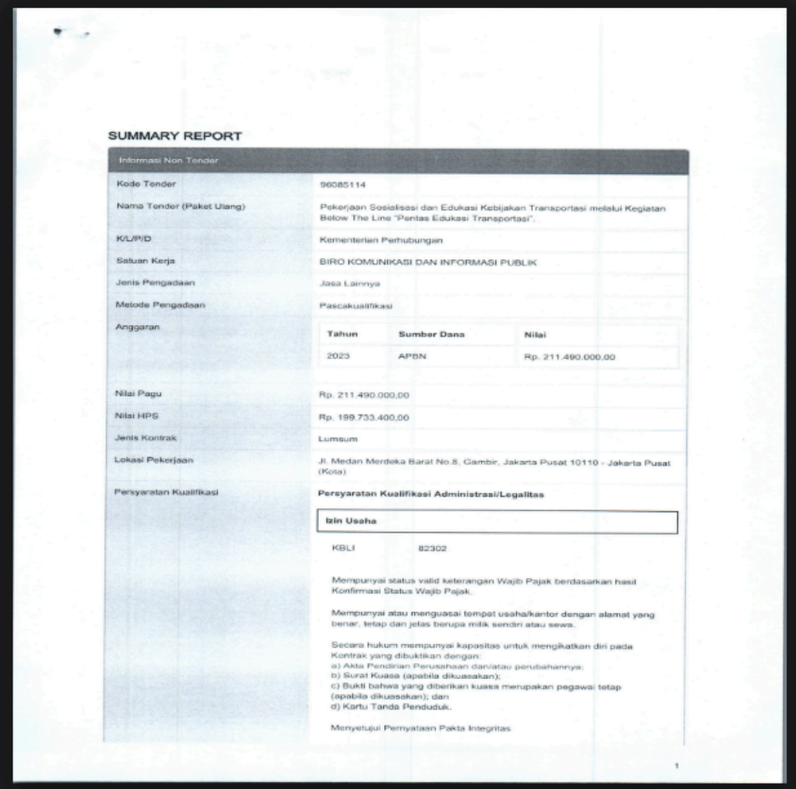

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	96085114
Nama Tender (Paket Ulang)	Pekerjaan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Transportasi melalui Kegiatan Below The Line "Pentas Edukasi Transportasi".
K/L/P/D	Kementerian Perhubungan
Satuan Kerja	BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi
Anggaran	Tahun: 2023; Sumber Dana: APBN; Nilai: Rp. 211.490.000,00
Nilai Pagu	Rp. 211.490.000,00
Nilai HPS	Rp. 199.733.400,00
Jenis Kontrak	Lumsum
Lokasi Pekerjaan	Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Gambir, Jakarta Pusat 10110 - Jakarta Pusat (Kota)
Persyaratan Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas**

Izin Usaha

KBLI 82302

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

1

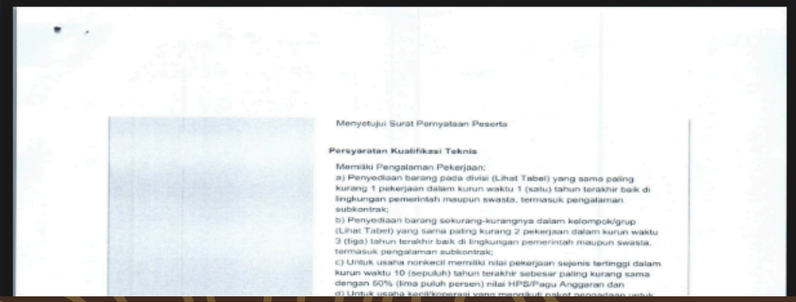

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 2 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1vzqnEknY7eUKWnaJ3I037C5u8gVYmhFV/view

8.1 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

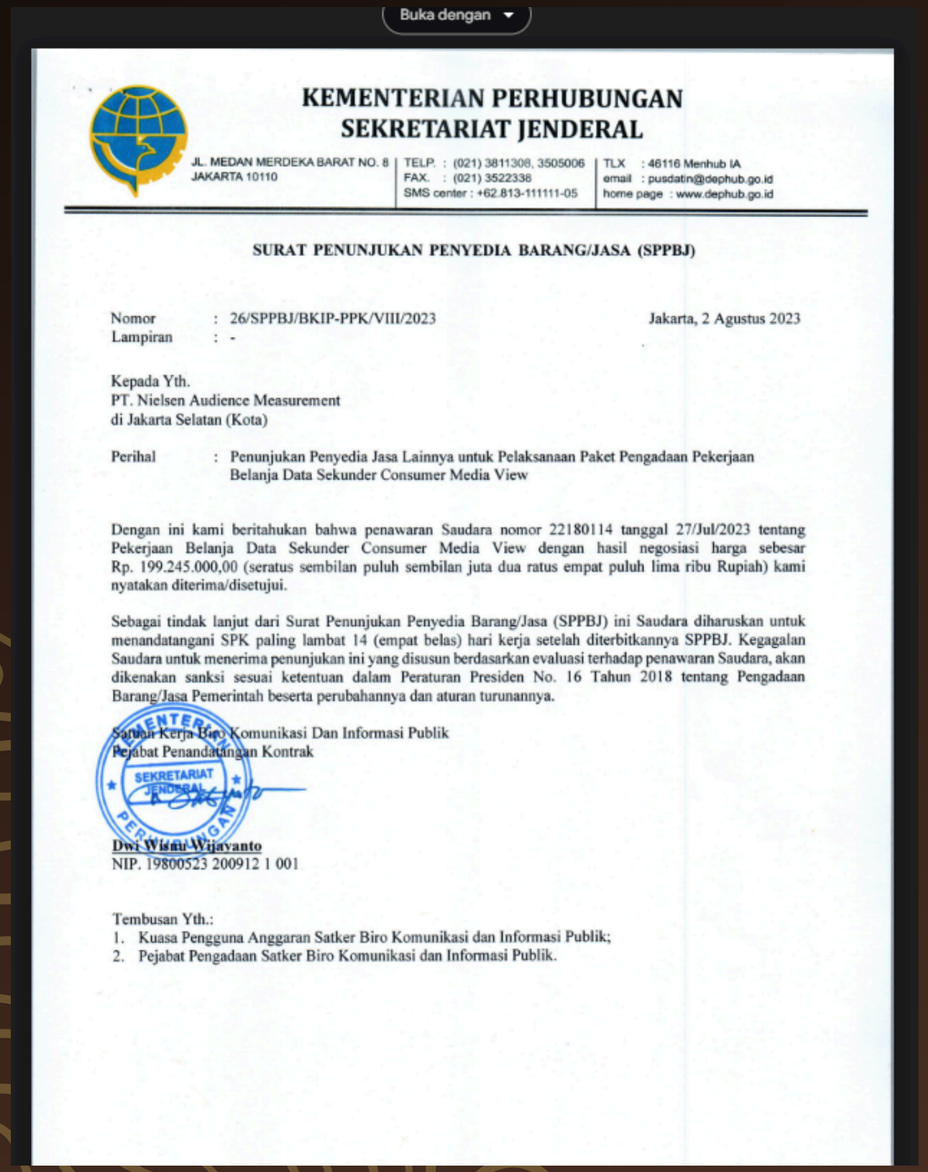

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 26/SPPBJ/BKIP-PPK/VIII/2023
Lampiran : -

Jakarta, 2 Agustus 2023

Kepada Yth.
PT. Nielsen Audience Measurement
di Jakarta Selatan (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Belanja Data Sekunder Consumer Media View

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 22180114 tanggal 27/Jul/2023 tentang Pekerjaan Belanja Data Sekunder Consumer Media View dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 199.245.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja Biro Komunikasi Dan Informasi Publik
Pejabat Penandatangan Kontrak

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Dwi Wisnu Wijayanto
NIP. 19800523 200912 1 001

Tembusan Yth.:
1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
2. Pejabat Pengadaan Satker Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1I2FuihCd6-T_XjBvIyr1r8sleZABS9tY/view

8.1 20. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan

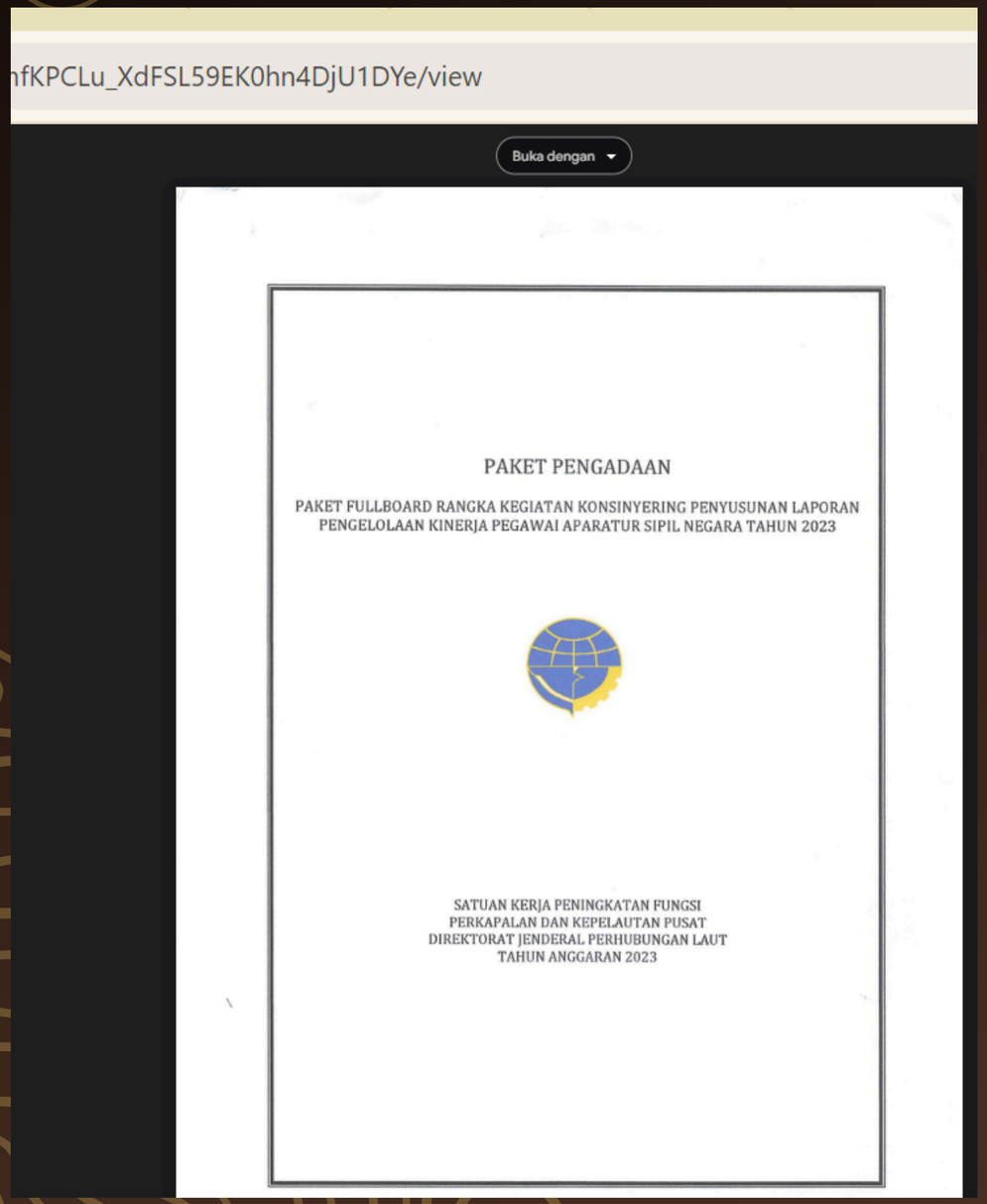

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1KeqNmfKPCLu_XdFSL59EK0hn4DjU1DYe/view

8.1 21. Surat Perintah Mulai Kerja

0yoToDdIPo6DlVtC9Th8I/view

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522336
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 19/SPMK/BKIP-PPK/V/2023

Paket Pekerjaan : Penyusunan Lini Massa di Media Sosial II

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dwi Wisnu Wijayanto
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Penyusunan Lini Massa di Media Sosial II nomor 19/SPK/BKIP-PPK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, bersama ini memerintahkan:

CV. Emmasindo
Gd. Yarnati Lt.4 R. 411, Jl. Proklamasi No. 44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
yang dalam hal ini diwakili oleh: Nikson Panjaitan
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan : Penyusunan Lini Massa di Media Sosial II
2. Tanggal mulai kerja : 26 Mei 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 60 Hari Kalender (26 Mei 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Juli 2023
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

Jakarta, 26 Mei 2023
Untuk dan atas nama Biro Komunikasi Dan Informasi Publik
Pejabat Penandatangan Kontrak

SEKRETARIAT JENDERAL

Dwi Wisnu Wijayanto
NIP. 19800523 200912 1 001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. Emmasindo

Nikson Panjaitan
Direktur Utama

"Tingkatkan Kese... Jasa Transportasi"

Halaman 1 / 1

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1CND4_h3KaE-0yoToDdIPo6DlVtC9Th8I/view

8.1 22. Surat Jaminan Pelaksanaan

Buka dengan

ASURANSI UMUM BUMIDA

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : PSKSG1044114223030009 Nilai :IDR. 36,430,533.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT INTEGRA CIPTA KREASI, Gedung one pacific place level 11, SCBD, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kelurahan. Senayan, Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok G No.6, Jl. Boulevard Artha Gading - Jakarta Utara 14240 Telp. 021-4514038 / 24520189 Fax. 021- 4514043 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Biro Komunikasi Dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 36,430,533.00,- (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Kegiatan Penerbitan Majalah Transmedia Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01/SPPBJ-TRSMD/BKIP-PPK/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023 untuk pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Majalah Transmedia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023.

4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di :JAKARTA
Pada Tanggal :10 Maret 2023

PRINCIPAL
PT. INTEGRA CIPTA KREASI

Syarifah Noor Hidayati
Direktur

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

JATMIKO JP
KEPALA CABANG

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

002651652

Halaman 3 / 3

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1dXmLFy44zROpuqSpll4IhUZh1aDOWNv_/view

8.1 23. Surat Jaminan Uang Muka

Buka dengan

ASURANSI UMUM BUMIDA

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : PSKSG1044114323030004 **Nilai : Rp.145.722.132,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT INTEGRA CIPTA KREASI, Gedung one pacific place level 11, SCBD, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok G No.6, Jl. Boulevard Artha Gading - Jakarta Utara 14240 Telp. 021-4514038 / 24520189 Fax. 021- 4514043 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pelabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Biro Komunikasi Dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 08 Jakarta 10110** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 145.722.132,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).**
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan paket pekerjaan **Kegiatan Penerbitan Majalah Transmedia Tahun 2023** sebagaimana ditetapkan dalam **Kontrak No : 02/KTR-TRSMD/BKIP-PPK/III/2023** tanggal **13 Maret 2023** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **270 (dua ratus tujuh puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **13 Maret 2023** sampai dengan tanggal **07 Desember 2023.**
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan mudah dicairkan dan tidak bersyarat tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji /lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **14 Maret 2023**

TERJAMIN
PT. INTEGRA CIPTA KREASI

integriti creative house

Syarifah Noor Hidayati
Direktur

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

METERAI TEMPEL
5BFAKX291757895

JATMIKO JP
KEPALA CABANG

PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723

002651649

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1qYIVMywUtJKk4rufrg3VdaluzJqfRElR/view

8.1 24. Surat Jaminan Pemeliharaan

98r44Pl6vnaXDBu6n/view

Buka dengan

Model 54

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk
KANTOR CABANG BANDUNG ASIA AFRIKA
Menara BRI Bandung Lantai I, II Jl. Asia Afrika No.57-59 Bandung – 40111
Telepon : 4200350 (Hunting) Telex: 24142,24143 BRIBD IA, Facs : 4239142, Kawat : CABRI BDAA

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. 0000522010500002

Yang bertanda tangan dibawah ini : **R. Mochamad Yogiprayogi** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Asia Afrika yang berkedudukan di Menara BRI Bandung Lantai I, II Jl. Asia Afrika No.57-59, Bandung 40111.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN,**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Area III Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah
Alamat : Jl. Kenari No. 66 Yogyakarta 55165

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 2.180.594.550,- (Dua miliar seratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)** dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan **Pembangunan Operation Center CTC - CTS Di Daop 6 Yogyakarta (MYC 2020-2021)** berdasarkan **Surat Perjanjian No. SPP-03/CTC-CTS/AREA.III/XI/2020 tanggal 06 November 2020, Addendum I No. SPP-03/ADD.I/CTC-CTS/AREA.III/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, Addendum II No. SPP-03/ADD.II/CTC-CTS/AREA.III/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Addendum III No. SPP-03/ADD.III/CTC-CTS/AREA.III/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, Addendum IV No. SPP-03/ADD.IV/CTC-CTS/AREA.III/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: BA.A3/18/BAST/BTP-JTGDIY/2021 Tanggal 31 Desember 2021** apabila:

Nama : PT. Len Railway Systems
Alamat : Grha Giri Suseno, PT. Len Building Jl. Soekarno Hatta No. 442 Bandung 40254 Indonesia

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya Kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **730 (Tujuh ratus tiga puluh) hari** kalender, dari tanggal **31 Desember 2021** sampai dengan **30 Desember 2023.**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat *(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai /tidak memenuhi kewajibannya.

1/2

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1UAWFe1OPhFjgKva98r44Pl6vnaXDBu6n/view

8.1.25. Surat Tagihan

Lz4KtKNxjUZA1ZZCdgVTx/view

Buka dengan

PT. ADI MULYA INDONESIA

Tangerang, 23 Juni 2023

No. : 845/PP-AMI/06/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Dengan Hormat,
Terkait adanya Pekerjaan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Transportasi melalui Kegiatan Below The Line Pentas Edukasi Transportasi 2023 dengan No. SPK 21/SPK/BKIP-PPK/VI/2023 maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran untuk pekerjaan SOSIALISASI tersebut sebesar **Rp. 199.067.400,-** ***(#Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah#).***

Untuk pembayaran pekerjaan tersebut dapat di bayarkan kepada :

PT. ADI MULYA
INDONESIABCA KCP
PONDOK LESTARI No
rek : 3452388887

Demikianlah Surat Permohonan ini kami buat, Atas perhatiaan dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih.

Hormat Kami
PT. ADI MULYA INDONESIA

ANANTO MULYA ADISASMITA
Direktur Utama

PT. ADI MULYA INDONESIA
Ruko Palem Ganda Asri Blok A6 No.5 Karang Tengah, Ciledug Tangerang 15157, Indonesia
T. +62 812 872 155 53 +62 896 867 74 234 | F. +6221 731 0511

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1mZpfG7Jva7hLz4KtKNxjUZA1ZZCdgVTx/view

8.1.26. Surat Pesanan E-purchasing

dyirltVTPFVC6_QIC/view

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62.813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pekerjaan Sewa Kendaraan Mobil Listrik

Nomor: 01/BASTB/MBLEV/BKIP-PPK/I/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (27-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dwi Wisnu Wijayanto
   NIP : 19800523 200912 1 001
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   SK Jabatan dari : Kuasa Pengguna Anggaran
   Nomor/Tanggal SK : KP 26 Tahun 2023 Tanggal 4 Januari 2023
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : Aman Pribadi
   Nomor KTP : 3201130603750012
   Jabatan : Sales & Marketing Manager
   Nomor/Tgl SPK/Kontrak : 01/KTR-MBLEV/BKIP-PPK/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023
   Nomor/Tgl Surat Tagihan : 723/PMS-PP/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

- Pihak kedua telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil listrik Hyundai Ioniq Prime EV sesuai dengan dokumen kontrak nomor 01/KTR-MBLEV/BKIP-PPK/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023
- Pihak pertama telah memeriksa dan menerima 1 (satu) unit mobil listrik Hyundai Ioniq Prime EV tersebut dengan baik sesuai dengan yang tercantum di klausul kontrak tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan tanggung jawab dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen	PT Golden Bird Metro
DWI WISNU WIJAYANTO	AMAN PRIBADI
NIP. 19800523 200912 1 001	Sales & Marketing Manager

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1eFwKKMBXTdo2Emxdyirltvtpfvc6_QIC/view

8.1.27. Surat Perintah Membayar

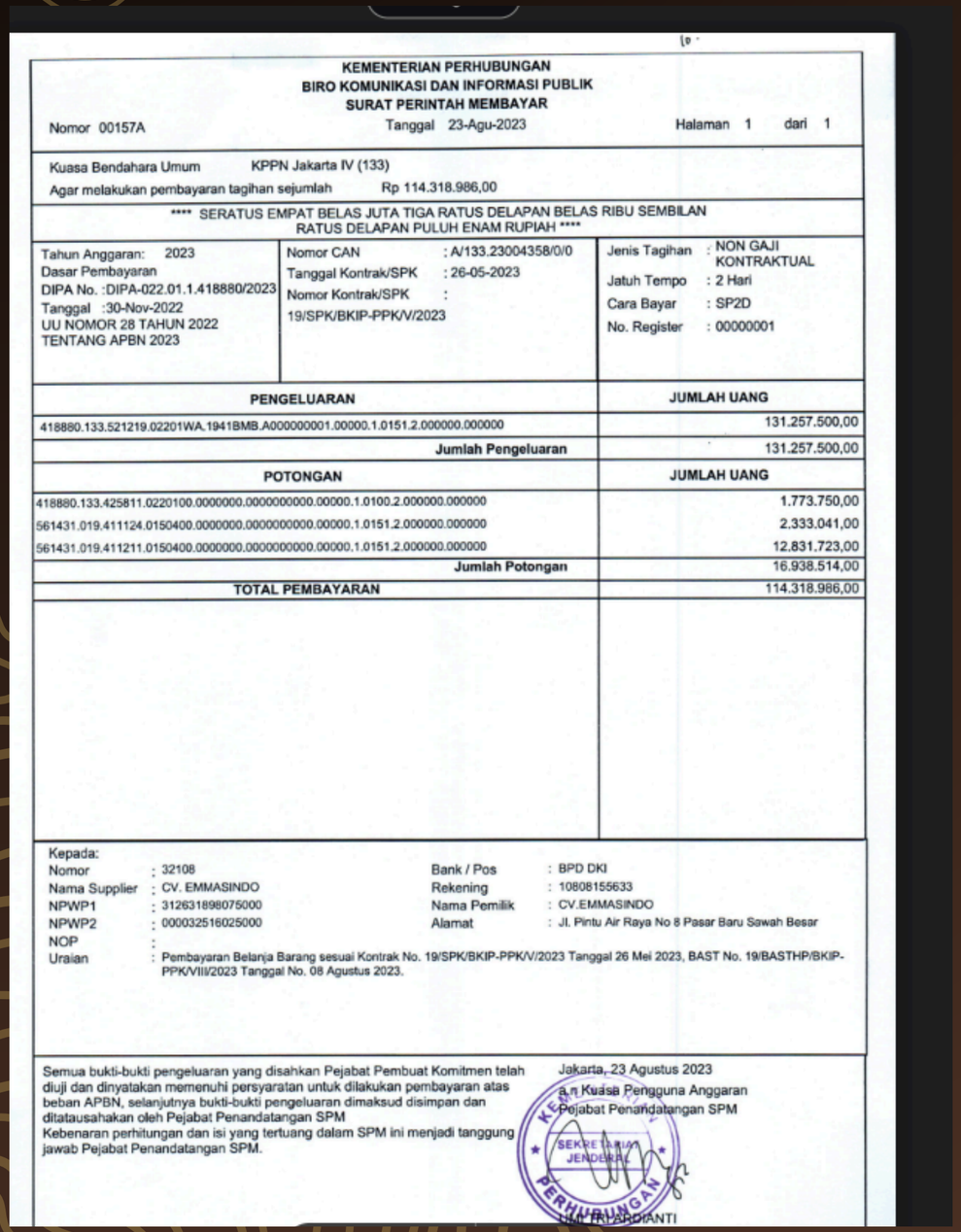

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00157A | Tanggal 23-Agu-2023 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta IV (133)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 114.318.986,00

**** SERATUS EMPAT BELAS JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.01.1.418880/2023 Tanggal :30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN 2023	Nomor CAN : A/133.23004358/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 26-05-2023 Nomor Kontrak/SPK : 19/SPK/BKIP-PPK/V/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
418880.133.521219.02201WA.1941BMB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	131.257.500,00
Jumlah Pengeluaran	131.257.500,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
418880.133.425811.0220100.0000000.0000000000.00000.1.0100.2.000000.000000	1.773.750,00
561431.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	2.333.041,00
561431.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000	12.831.723,00
Jumlah Potongan	16.938.514,00
TOTAL PEMBAYARAN	114.318.986,00

Kepada:

Nomor	: 32108	Bank / Pos	: BPD DKI
Nama Supplier	: CV. EMMASINDO	Rekening	: 10808155633
NPWP1	: 312631898075000	Nama Pemilik	: CV.EMMASINDO
NPWP2	: 000032516025000	Alamat	: Jl. Pintu Air Raya No 8 Pasar Baru Sawah Besar
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No. 19/SPK/BKIP-PPK/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023, BAST No. 19/BASTHP/BKIP-PPK/VIII/2023 Tanggal No. 08 Agustus 2023.		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Jakarta, 23 Agustus 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

SEKRETARIAT JENDERAL

Ir. ERI HARDIANTI

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/11KkYzQVsVTJmf_uhW71_ILI9O5MStaMS/view

8.1.28. Surat Perintah Pencairan Dana

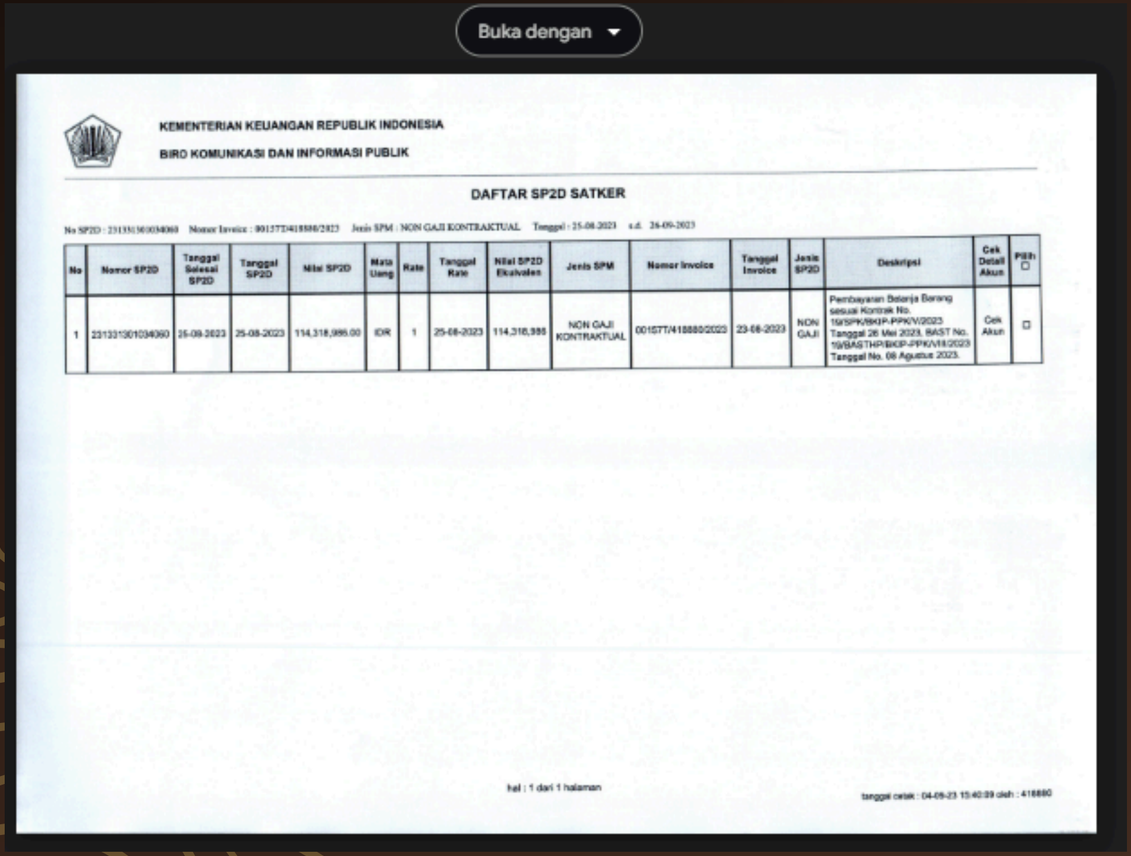

Buka dengan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 23133150034060 Nomor Invoice : 001577/418880/2023 Jenis SPM : NON GAJI KONTRAKTUAL Tanggal : 25-08-2023 s.d. 26-09-2023

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	23133150034060	26-09-2023	25-08-2023	114,318,986.00	IDR	1	25-08-2023	114,318,986	NON GAJI KONTRAKTUAL	001577/418880/2023	23-08-2023	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No. 15/SPK/BKIP-PPK/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023, BAST No. 19/BASTHP/BKIP-PPK/VIII/2023 Tanggal No. 08 Agustus 2023.	Cek Akun	☐

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 04-09-23 15:40:39 oleh : 418880

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1pvF3TizF_mWfPhKR6xDvtzYpd52xyPAN/view

8.1.29. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:

https://drive.google.com/file/d/1xZmGtGa7ehbTDIzgsO5YmWAmCmVCJl8g/view

8.1.30. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1GYTQVwePUEHnN8GI8H7v9I3smnWHSQym/view

8.1.31. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

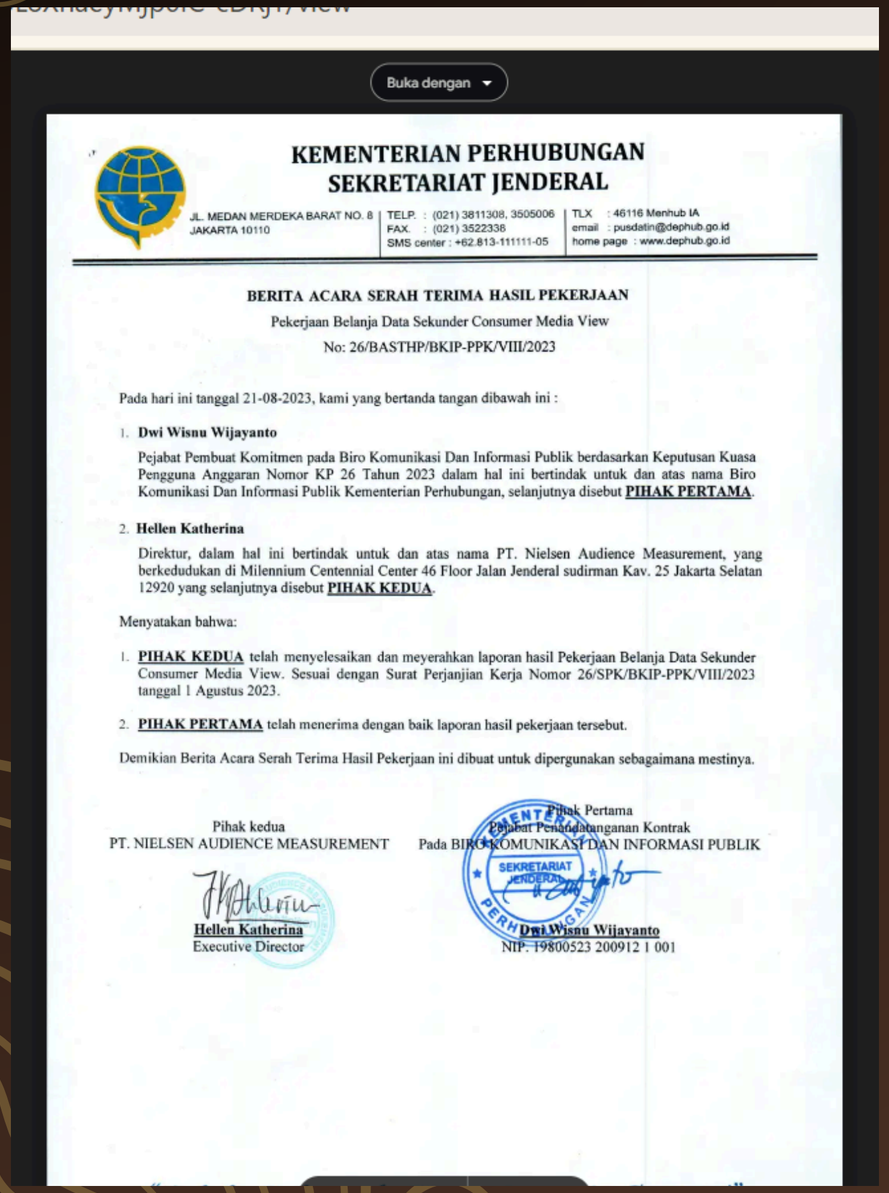

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522336
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pekerjaan Belanja Data Sekunder Consumer Media View

No: 26/BASTHP/BKIP-PPK/VIII/2023

Pada hari ini tanggal 21-08-2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dwi Wisnu Wijayanto**

   Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Komunikasi Dan Informasi Publik berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KP 26 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Hellen Katherina**

   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nielsen Audience Measurement, yang berkedudukan di Milennium Centennial Center 46 Floor Jalan Jenderal sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan dan meyerahkan laporan hasil Pekerjaan Belanja Data Sekunder Consumer Media View. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 26/SPK/BKIP-PPK/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik laporan hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak kedua	Pihak Pertama
PT. NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT	Pejabat Penandatanganan Kontrak
	Pada BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Hellen Katherina	**Dwi Wisnu Wijayanto**
Executive Director	NIP. 19800523 200912 1 001

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1awm94uYHEEwvoL8XnaeyMjp0IC-cDRjT/view

Berita acara pemeriksanaan hasil pekerjaan umumnya ada di proyek infrastruktur

8.1.32. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

Jl. CANDI PRAMBANAN BARAT RAYA NO.1 A NGALIYAN SEMARANG | TELP : (024) 7618176 | FAX : (024) 7618176

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
Nomor : BA.A3/19/BAST/BTP-JTGDIY/2021

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ALBERTUS DITO MIGRASTO**
   NIP. : 19851118 200912 1 005
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Area III
   Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah
   Alamat : Jl. Kenari No. 66 Yogyakarta 55165

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah No SK.KPA/034/BTP-JTGDIY/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pengelola Anggaran Pada Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **AGUNG DARMAWAN**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Len Railway Systems
   Alamat : Grha Giri Suseno Len Industri Jl. Soekarno Hatta Nomor 442 RT.001 RW. 008, Pasirluyu Regol, Bandung 40254, Jawa Barat

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Len Railway Systems untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 138/BAPP/SPV-PPS/RK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan ini kedua belah pihak telah mengadakan Serah Terima Pertama pada Pekerjaan **Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan (MYC 2020 - 2021)**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima dengan baik.

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor : SPP-05/SINYAL/AREA.III/XI/2020 tanggal 18 November 2020, Adendum I No. SPP-05/ADD.I/SINYAL/AREA.III/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Adendum II No. SPP-05/ADD.II/SINYAL/AREA.III/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan Adendum III No. SPP-05/ADD.III/SINYAL/AREA.III/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1QKE897ZRPBCByZF-cDU1vix7tESRpko5/view

8.1.33. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

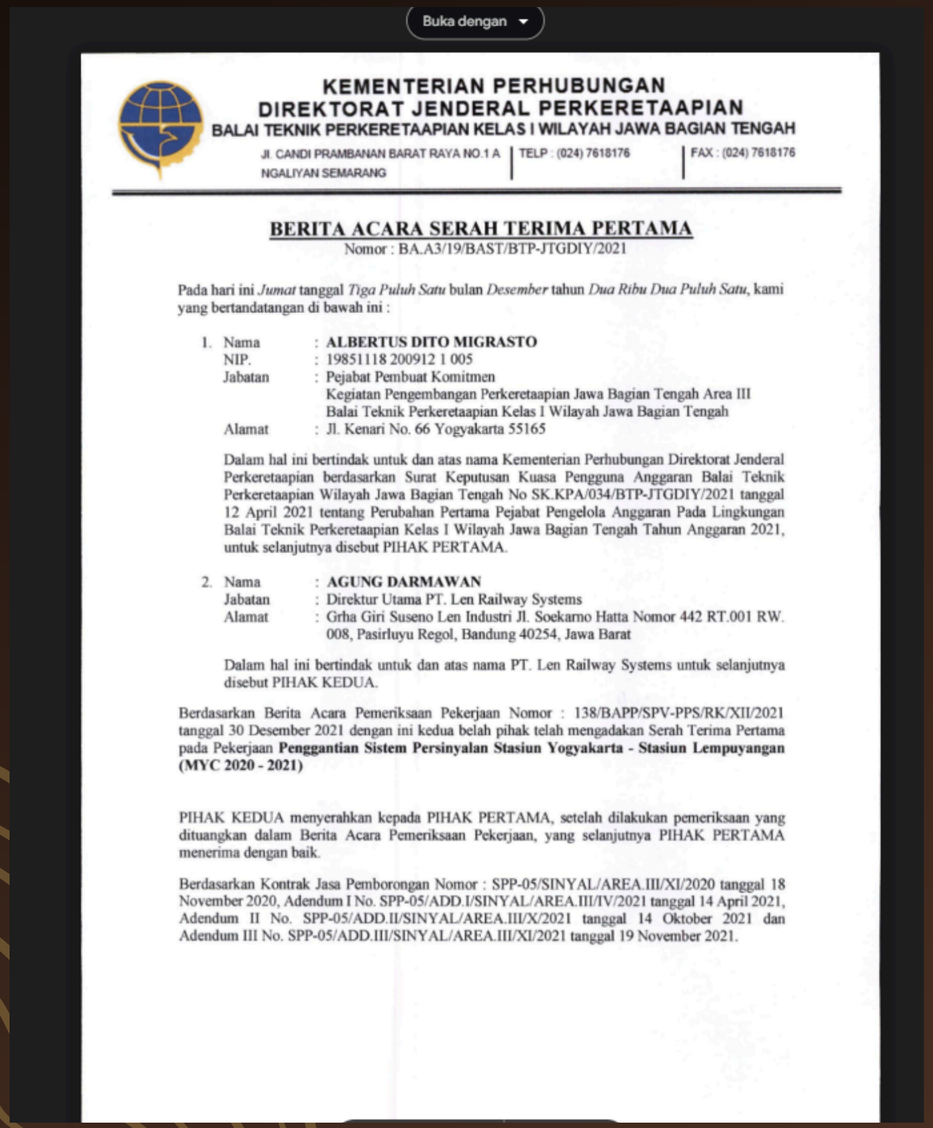

Buka dengan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

Jl. CANDI PRAMBANAN BARAT RAYA NO.1 A NGALIYAN SEMARANG | TELP : (024) 7618176 | FAX : (024) 7618176

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
Nomor : BA.A3/19/BAST/BTP-JTGDIY/2021

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ALBERTUS DITO MIGRASTO**
   NIP. : 19851118 200912 1 005
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Area III
   Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah
   Alamat : Jl. Kenari No. 66 Yogyakarta 55165

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah No SK.KPA/034/BTP-JTGDIY/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pengelola Anggaran Pada Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **AGUNG DARMAWAN**
   Jabatan : Direktur Utama PT. Len Railway Systems
   Alamat : Grha Giri Suseno Len Industri Jl. Soekarno Hatta Nomor 442 RT.001 RW. 008, Pasirluyu Regol, Bandung 40254, Jawa Barat

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Len Railway Systems untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 138/BAPP/SPV-PPS/RK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan ini kedua belah pihak telah mengadakan Serah Terima Pertama pada Pekerjaan **Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan (MYC 2020 - 2021)**

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima dengan baik.

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor : SPP-05/SINYAL/AREA.III/XI/2020 tanggal 18 November 2020, Adendum I No. SPP-05/ADD.I/SINYAL/AREA.III/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Adendum II No. SPP-05/ADD.II/SINYAL/AREA.III/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dan Adendum III No. SPP-05/ADD.III/SINYAL/AREA.III/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Silakan lampirkan tautan drive penyimpanan (bisa google drive atau cloud dengan akses privasi yang terbuka) yang berisikan dokumen dimaksud dari pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 dengan ketentuan: sudah diaudit, bukan tahun jamak, sudah selesai pelaksanaan, dan ketentuan lain sehingga tidak mengandung informasi dikecualikan.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1tAem-SgzQyp4p4C5QSrUsMhfFVs7XeZa/view

INDIKATOR II

B. DIUMUMKAN SETIAP SAAT

1. Apakah unit kerja Saudara telah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) 2024

45%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP-SKJ 25 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023;
b. bahwa dalam rangka pemutakhiran secara berkala, perlu menetapkan daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN: . . .

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Silakan lampirkan tautan yang menunjukkan bahwa DIP 2024 sudah diunggah di website unit kerja Saudara atau sertakan foto yang menunjukkan bahwa DIP 2024 sudah dicetak menjadi buku yang diletakkan di ruang PPID kantor Anda secara representatif.

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20240610102903.DIP_Kemenhub_Tahun_2024.pdf

2. Apakah unit kerja Saudara menyediakan peraturan/kebijakan/SOP yang telah disahkan dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat?

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor : KP - DJPL 692 Tahun 2022
Tanggal : 21 OKTOBER 2022

	SOP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nomor SOP	: SOP - DJPL 2 Tahun 2022
		Tgl. Disahkan	: 21 OKTOBER 2022
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	
		Disahkan oleh	: DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ARIS TOHA NIP. 196708201992031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL INDONESIA DI PERAIRAN INDONESIA

Dasar Hukum:		Cara Mengatasi :	
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;	1	Kehadiran Terperiksa (Awak Kapal, Pandu, Pihak terkait lainnya)
2	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	2	Mengumpulkan data dan dokumen;
3	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	3	Melakukan pemeriksaan kepada Terperiksa;
4	Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 7 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelaporan Kecelakaan Kapal	4	Mencatata dan menggunakan alat perekam audio ;
5	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 734/DJPL/2020 tentang Atribut dan Perlengkapan Kerja Pemeriksa Kecelakaan Kapal	5	Penggunaan identitas pemeriksa kecelakaan kapal;
6	*IMO Resolution MSC 255 (84) adopted on 16 May 2008 Adoption of the Code of the International Standars and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code)*		

Keterkaitan:	Peralatan :
1 Pemeriksa Kecelakaan Kapal 2 Awak Kapal; 3 Pandu; 4 Designated Person Ashore; 5 Perusahaan Pelayaran 6 KNKT 7 BMKG 8 Disnav/ Stasiun Radio Pantai	1 Surat Tugas atau Surat Perintah 2 Komputer 3 Alat Tulis Kantor 4 Kamera 5 Alat Perekam Audio 6 Jaket Pemeriksa Kecelakaan Kapal
Peringatan:	
Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menjaga integritas dan independensi dalam melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kapal dan memperhatikan batas waktu pemeriskaan	

Silakan lampirkan tautan yang menunjukkan bahwa SOP yang terdapat di unit kerja Saudara sudah diunggah di website unit kerja Saudara atau sertakan foto yang menunjukkan bahwa SOP tersebut sudah dicetak menjadi buku yang diletakkan di ruang PPID kantor Anda secara representatif. Bisa juga SOP tersebut dipajang di unit kerja Saudara.

Lampirkan pula dokumen-dokumen SOPnya melalui link Google Drive.

Contoh dokumen:
https://hubla.dephub.go.id/storage/portal/documents/post/13076/SOP_KECELAKAAN_KAPAL_TAHUN_2022.pdf

3. Apakah unit kerja Saudara menyediakan surat menyurat dari dan ke unit kerja tahun 2022 - 2023? (terdiri dari 1 surat masuk dan 1 surat keluar pada tiap tahunnya)

Buka dengan

CLEAN AIR ASIA

PHONE +632 8631 1042

EMAIL info@cleanairasia.org

Unit 3505 Robinsons Equitable Tower
ADB Avenue, Pasig City 1605,
PHILIPPINES

18 August 2023
No. 002/CAA/SDICA/VIII/2023
Attention:
Bapak Novie Riyanto Raharjo
Secretary General
Ministry of Transportation (MOT)
The Republic of Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Bapak Arif Toha Tjahjagama
Director General
Directorate General of Sea Transportation (DGST)
Ministry of Transportation (MOT)
The Republic of Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Subject: Shipping Decarbonization in China and Asia (SDICA): Invitation to Participate the Project Survey

Dear **Bapak Novie** and **Bapak Arif**,

Thank you for participating in our initial consultation last 27 July 2023. Your dedication and commitment to addressing the pressing issues of decarbonizing the maritime transport sector are commendable. The discussions clarified the role the role of the Ministry of Transporation (MOT) of the Republic of Indonesia [in particular, the Directorate General of Sea Transportation (DGST)], its current initiatives, and the opportunities/ challenges in decarbonizing the maritime transport sector in Indonesia.

We write to you with great enthusiasm to continue our collaboration towards the initiative's next phase. In this phase, two types of questionnaires will be distributed. The first questionnaire is an Analytical Hierarchy Process (AHP) survey that employs a pairwise comparison to determine the relative importance of different emissions reductions that are more appropriate and relevant to Indonesia's efforts. We kindly request that you participate in the AHP survey by answering the attached AHP questionnaire (Face-to-face) or following the attached step-by-step AHP Online System Guide (online). Another questionnaire collects information about existing and planned emission reduction initiatives at container ports in Indonesia, specifically Tanjung Priok and Tanjung Perak (or any other container port based on your suggestion). We have attached a copy of the questionnaires to this letter.

Your active participation in the survey will help shape the priorities that align with stakeholders in decarbonizing the maritime transport sector in Indonesia. A final report showcasing Indonesia's efforts and best practices in reducing emissions at container ports will be launched in November 2023 at the Better Air Quality (BAQ) conference hosted by Clean Air Asia in Manila, Philippines. Several participants will be invited to this knowledge-sharing forum to provide insights on measures to reduce emissions at container ports.

Lastly, we are finalizing a Memorandum of Understanding (MoU) to formalize the collaboration between Pelindo and Clean Air Asia and outline the scope of our engagement. We will send the MoU soon. In the meantime, we aim to conduct the survey through this letter

cleanairasia.org @cleanairasia

Surat Masuk

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.005/3/6 PHB 2021 Jakarta, 29 Desember 2021
Klasifikasi :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Yth. Presiden Republik Indonesia

Bersama ini dengan hormat dilaporkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, diatur bahwa dalam penyusunan perancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan izin prakarsa kepada Presiden dengan disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud.

Kementerian Perhubungan telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan mengakomodir perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Dapat kami sampaikan pula bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dimaksud memuat pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. penambahan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi, antara lain spion dengan kamera dan layar monitor, penggunaan teknologi yang mempunyai pengganti fungsi ban cadangan, dan sistem suspensi yang dirancang mampu menahan beban, getaran, dan kejutan;
2. penambahan perlengkapan keselamatan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi, antara lain sabuk keselamatan harus dipasang pada tempat duduk pengemudi dan tempat duduk lainnya, alat pemantul cahaya berupa stiker, alat pemadam api ringan, ganjal ban, dan perisai kolong belakang yang wajib dipasang pada jenis mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 5.000 (lima ribu) kilogram atau lebih;
3. pengaturan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang dan dapat dilengkapi motor listrik, motor bakar, dan/atau motor penggerak lainnya;

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AJ.001/1/2 Phb 2023 Jakarta, 17 Februari 2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Percepatan Pembangunan TIP di Jalan Tol Trans Jawa

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa penyelenggaraan Angkutan Labaran 2023 dan sesuai dengan arahan Presiden RI serta hasil rapat di Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu terkait usulan tambahan lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di jalan tol Trans Jawa, perlu diprioritaskan pembangunan **TIP yang berlokasi di KM 97 Jakarta – Merak, KM 81 Cipali dan KM 158 Cipali**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 sudah semakin dekat, dimohon percepatan pembangunan TIP KM 81 Cipali dengan pertimbangan lahan lokasi TIP dimaksud telah tersedia agar dapat difungsikan **sementara** pada masa Angkutan Lebaran **sehingga diperlukan upaya BUJT melakukan konstruksi**.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Sekretaris Jenderal, Kemenhub;
3. Inspektur Jenderal, Kemenhub;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Surat Keluar

Lampirkan tautan Google Drive yang berisikan dokumen surat menyurat tersebut. Pastikan akses Google Drive sudah terbuka untuk umum.

4. Apakah unit kerja Saudara menyediakan Informasi Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara Tahun 2023 ?

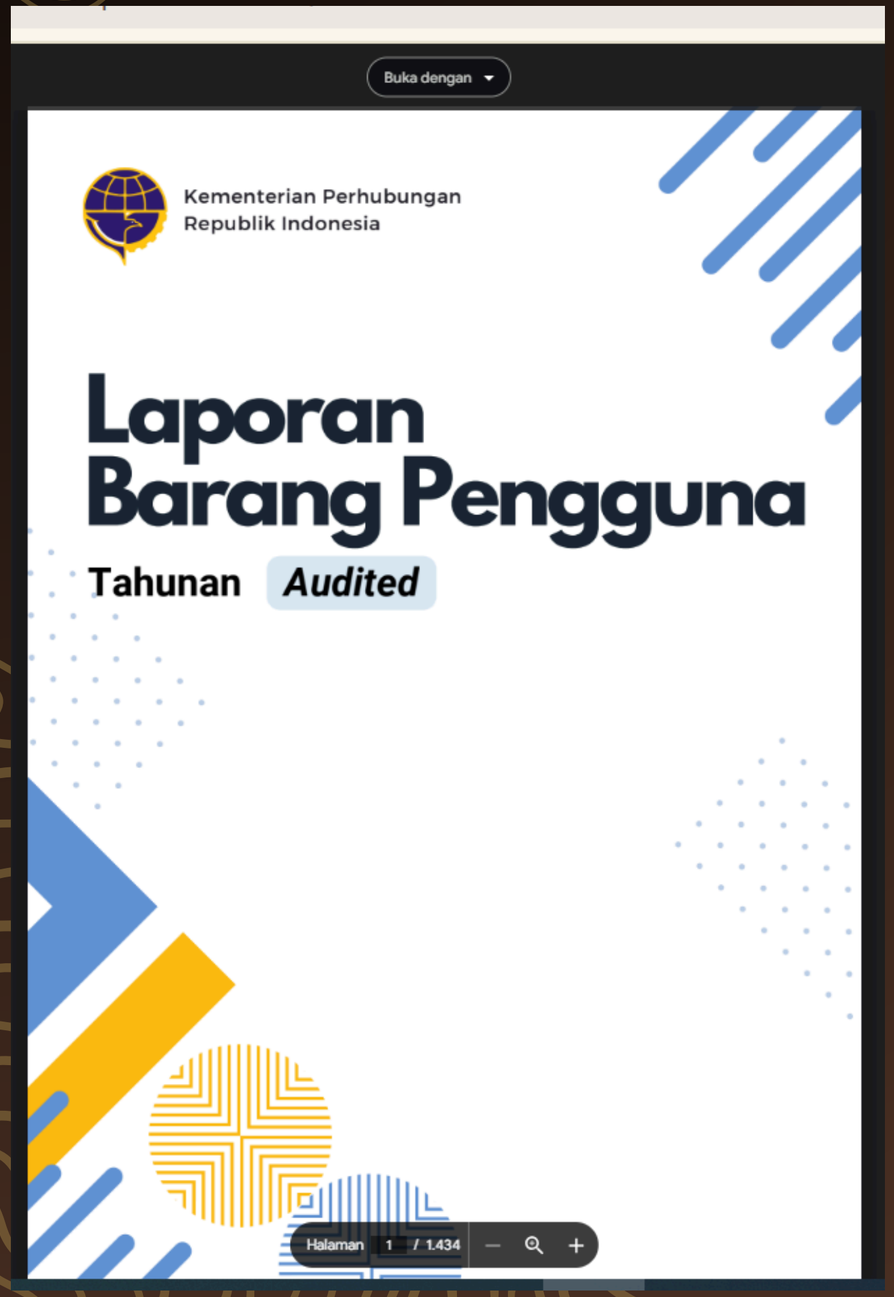

Lampirkan Laporan BMN 2023 audited dari unit kerja Saudara. Anda bisa melampirkan tautan website yang menunjukkan bahwa Laporan BMN tersebut sudah diumumkan. Bisa juga melampirkan tautan Google Drive yang berisikan laporan BMN dimaksud.

Contoh dokumen:
https://drive.google.com/file/d/1mAXK08npO4dj9aEY0Kt3q3MOhmkEuB0A/view

INDIKATOR II

C. DIUMUMKAN SERTA MERTA

1. Apakah unit kerja Saudara mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya terkait penutupan sarana dan prasarana transportasi, kebijakan terkait kepentingan umum, gempa bumi, dll?

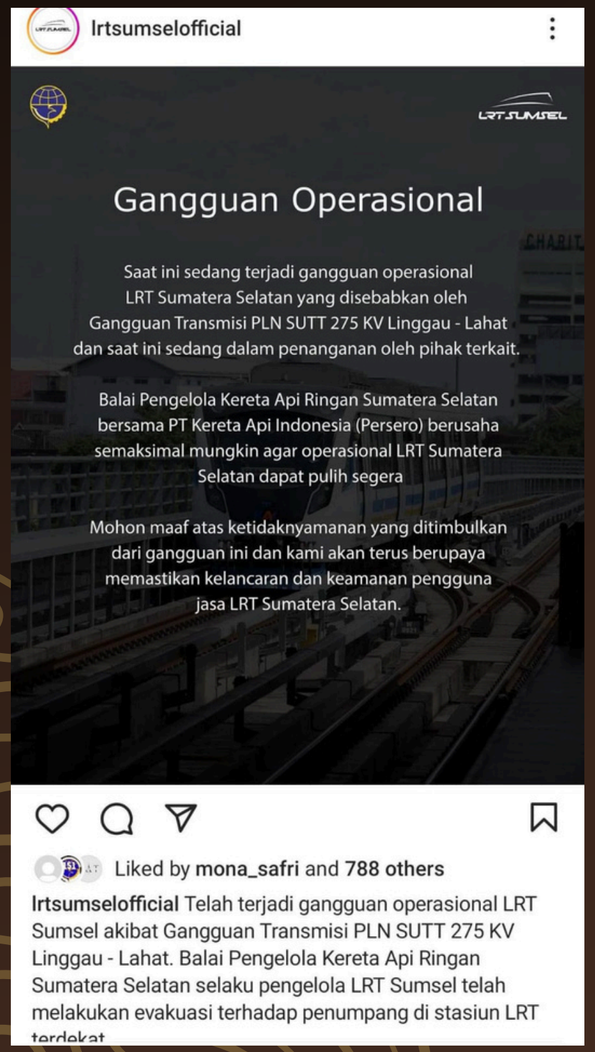

Lampirkan foto informasi serta merta yang dipasang menjadi banner atau bentuk pengumuman lainnya di unit kerja Saudara. Bisa pula melampirkan tautan website atau media sosial dari pengumuman informasi serta-merta tersebut.

INDIKATOR III

A. INOVASI DALAM PELAYANAN

1. Apakah unit kerja Saudara memiliki inovasi atau perubahan yang belum pernah dilakukan terkait pelayanan informasi ?

Silakan ceritakan inovasi apa yang sudah dilakukan di unit kerja Saudara dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan mendorong kerja PPID di unit kerja Saudara. Misalnya, penyelenggaraan forum PPID perdana, pembangunan akses paving block ramah disabilitas, menyediakan DIP dan DIK online di website, pemutakhiran fitur di website, dsb.

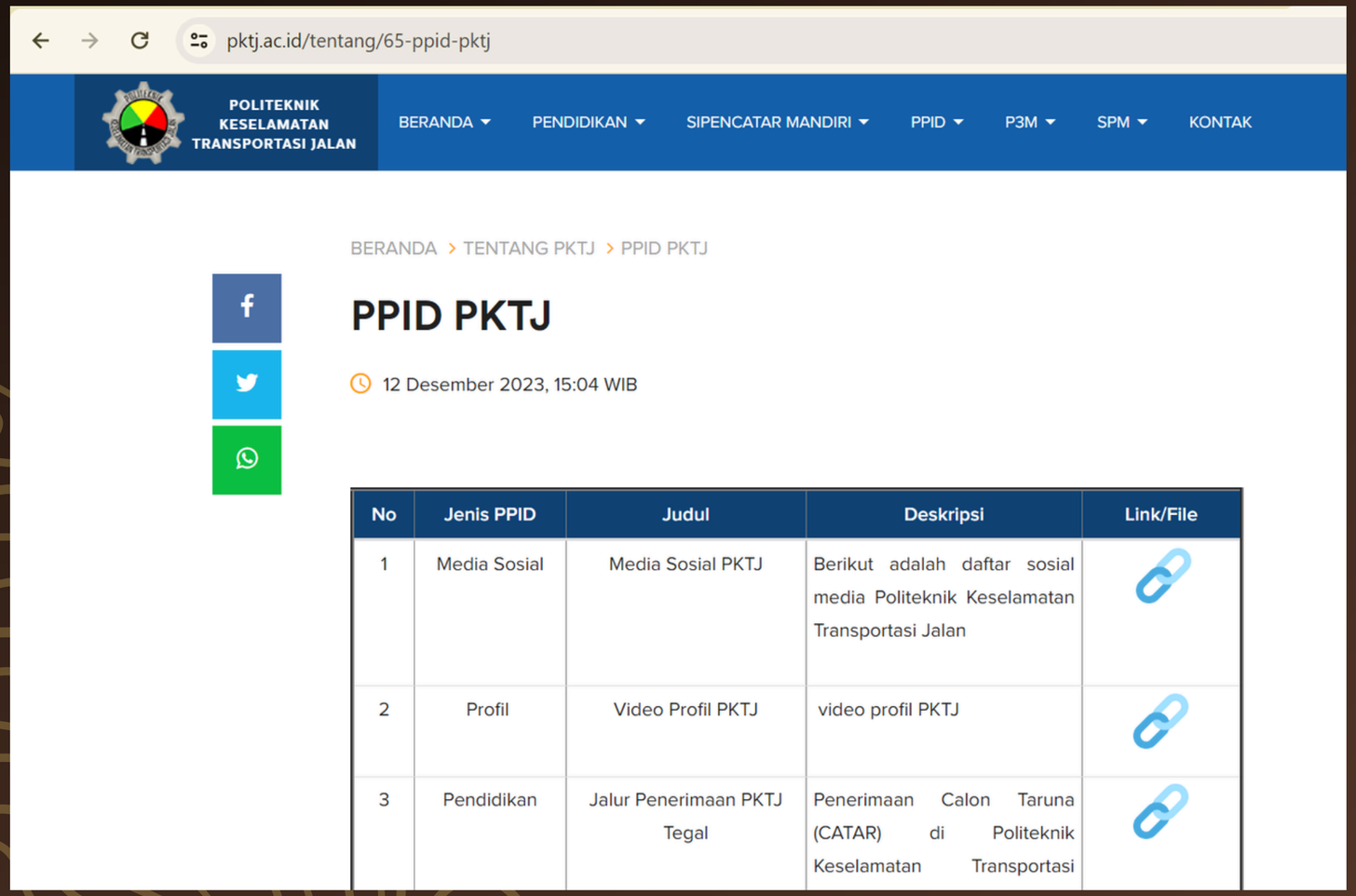

No	Jenis PPID	Judul	Deskripsi	Link/File
1	Media Sosial	Media Sosial PKTJ	Berikut adalah daftar sosial media Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	
2	Profil	Video Profil PKTJ	video profil PKTJ	
3	Pendidikan	Jalur Penerimaan PKTJ Tegal	Penerimaan Calon Taruna (CATAR) di Politeknik Keselamatan Transportasi	

Contohnya, PKTJ Tegal membangun fitur DIP online yang memudahkan pemohon informasi publik dalam mencari dokumen yang berisi informasi publik

https://pktj.ac.id/tentang/65-ppid-pktj

TERIMA KASIH